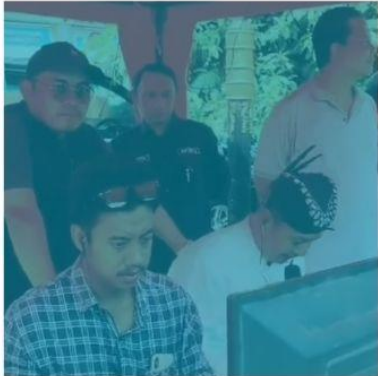




Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Jombang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mendukung Tujuan Renstra Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yaitu tujuan ke- (5) yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”, sedangkan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yaitu : “Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik”.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jombang, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG



ENDRO WAHYUDI, S.STP., M.KP

Pembina Tingkat I

NIP. 198005281999121001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	40
1.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir.....	192
1.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah.....	198
1.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional.....	220
1.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja	228
1.2 Realisasi Anggaran.....	234
1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran ...	234
1.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	242
1.3 Upaya Perbaikan Kinerja	
BAB IV PENUTUP	266
LAMPIRAN.....	278



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJiP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJiP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Bupati 37 Tahun 2025 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4 STRUKTUR ORGANISASI



Dalam menjalankan peran strategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Jabatan Fungsional
 - Perencana Ahli Muda
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
 - a. Jabatan fungsional
 - Pranata Hubungan Masyarakat
4. Bidang Aplikasi Informatika
 - a. Jabatan Fungsional
 - Pranata Komputer
5. Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Jabatan Fungsional
 - Statistisi
 - Sandiman

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- Pejabat eselon II	: 1 orang
- Pejabat eselon III	: 5 orang
- Pejabat eselon IV	: 2 orang
- Fungsional	: 7 orang
- Pelaksana (ASN dan Non ASN)	: 20 orang
- PPPK Paruh Waktu	: 9 orang
- Tenaga Ahli Programmer + Statisti	: 6 orang
- Tenaga Call Center 112	: 8 orang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah,

- serta pelayanan informasi publik;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - e. Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
 - h. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
 - i. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
 - j. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi

- informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan

- persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5 ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis dalam Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik yang akan dihadapi pada rentang waktu 2025 - 2029 antara lain :

1. Isu Strategis dibidang Humas dan Komunikasi Publik
 - a. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;
Masih adanya berita yang tendensius sehingga berita yang disampaikan oleh media masih dengan kecenderungan atau keberpihakan tertentu, sehingga tidak netral dan tidak sepenuhnya objektif oleh karena itu perlu dilaksanakan Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Mempererat hubungan dan membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan media melalui kegiatan audiensi dengan media;
 - b. Agenda setting humas berfokus kepada publikasi program prioritas Pemerintah Kabupaten Jombang;
Agenda setting adalah upaya mengatur atau menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui media dan komunikasi. Humas secara strategis menentukan isu atau topik yang akan lebih sering dan lebih kuat disampaikan ke publik, dengan tujuan agar masyarakat memberikan perhatian utama pada program-program prioritas Pemkab Jombang. Informasi tersebut dipublikasikan secara konsisten melalui media massa, media sosial, siaran pers, dan kanal komunikasi lainnya seperti website dan radio. Tujuannya agar masyarakat memahami, mendukung, dan memberi perhatian pada program Pemerintah Kabupaten Jombang.
Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui radio, website, media social dan iklan layanan masyarakat. Sementara media luar ruang dalam

bentuk Videotron, Baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-Umbul. Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melalui website jombangkab.go.id.

- c. Peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital;

Kondisi saat ini belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Kehumasan di Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menyesuaikan perkembangan digital. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Penguatan Kapasita Tim Pengelola Website dan Media Sosial Resmi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jombang dengan harapan mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi yang konstruktif terkait pelaksanaan program kerja dan kinerja OPD melalui optimalisasi platform digital yang tersedia.

- d. Penguatan peran PPID pembantu yang ada disetiap OPD;

Permasalahan saat ini Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah belum berjalan secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Belum optimalnya kinerja PPID Pembantu di setiap Perangkat Daerah berdampak pada belum maksimalnya implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan fungsi PPID Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengelolaan dokumentasi, pelayanan informasi publik, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan Workshop PPID untuk pemahaman pentingnya peran PPID dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Badan publik wajib membuka

informasi terkait institusi, kebijakan, kegiatan, hingga penggunaan anggaran sebagai dasar pemahaman regulasi, klasifikasi informasi publik yang bersifat informasi berkala, setiap saat maupun serta merta dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan kepada PPID pembantu.

e. Sosialisasi SP4N LAPOR

Belum semua masyarakat memanfaatkan SPAN LAPOR untuk pengaduan pelayanan publik. Untuk itu perlu adanya sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai pusat pengelolaan pengaduan pelayanan publik terintegrasi. Sosialisasi dilaksanakan berbagai elemen masyarakat, termasuk pesantren dan kampus, untuk meningkatkan kualitas layanan, kecepatan respons, dan transparansi aduan, baik terkait Pemkab Jombang maupun pusat.

2. Isu Strategis dibidang Aplikasi dan Informatika

a. Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi;

Kondisi saat ini cakupan jaringan internet Pemkab Jombang pada seluruh perangkat daerah telah terkoneksi namun terdapat beberapa perangkat daerah mengalami koneksi lambat atau tidak stabil pada beberapa titik dan Wifi Publik Desa telah terkoneksi, namun beberapa titik masih tidak stabil. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor Keterbatasan anggaran untuk perluasan jaringan fiber optik dan Topografi/geografi wilayah yang menyulitkan pemasangan infrastruktur.

Oleh karena itu perlu adanya penguatan konektivitas jaringan broadband dengan monitoring dan evaluasi koneksi lambat dan stabil serta Kerjasama pengadaan vendor internet berkecepatan tinggi yang bisa menjangkau seluruh Kabupaten Jombang.

b. Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki pusat data, namun masih dalam kapasitas terbatas (kapasitas penyimpanan, redundansi, dan backup belum optimal), selain itu Belum semua OPD memigrasikan data atau sistem ke pusat data

yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dikarenakan faktor belum adanya kepercayaan pada perangkat daerah terhadap sistem keamanan pada ruang server.

Untuk meningkatkan infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi perlu adanya penambahan infrastruktur server, berlangganan cloud yang menyesuaikan kebutuhan pusat data pada setiap perangkat daerah yang ditempatkan secara terpusat. Selain itu perlu adanya penguatan regulasi terkait pusat data di Pemerintah Kabupaten Jombang dan perlu adanya monitoring pusat data secara realtime..

- c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah;
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kondisi saat ini tidak semua aplikasi terintegrasi, menyebabkan duplikasi data dan proses kerja yang tidak efisien. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi dan Pengembangan aplikasi belum sesuai arsitektur SPBE. Untuk memastikan pelaksanaannya menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- d. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi;
Layanan darurat 112 yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Jombang membutuhkan peningkatan kualitas agar dapat merespons keluhan, laporan, dan situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait (kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit, BPBD, dll.). Integrasi antar sistem dan antar perangkat daerah masih perlu diperkuat. Selain itu layanan kedaruratan 112 belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 dengan Strategi yang mencakup pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM operator, standarisasi SOP, integrasi lintas instansi, monitoring berkelanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan

respons, koordinasi, dan kualitas layanan darurat di Kabupaten Jombang, selain itu perlu adanya edukasi kepada penggunaan layanan 112 dilaksanakan melalui media sosial, website Pemkab, radio, dan kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang

3. Isu Strategis dibidang Statistik dan Persandian

a. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data;

Ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin meningkat, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data. Hal tersebut dikarenakan minimnya tingkat kematangan keamanan informasi di sebagian besar Perangkat Daerah. Padahal dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik melalui SPBE, ketahanan siber menjadi elemen kunci dalam melindungi data pemerintah dan masyarakat. Dalam hal infratraktur digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang memiliki pengamanan berupa lisensi, firewall dan server backup data with self encryption protection. Dalam hal persandian dan keamanan informasi juga diperkuat dengan peralatan dan pengamanan informasi mobile yang bisa digunakan lebih mudah

Terbatasnya kesadaran SDM mengenai ancaman siber dan pentingnya keamanan informasi, serta minimnya tenaga ahli dibidang keamanan siber di Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk itu perlu dilakukan penguatan literasi keamanan siber bagi pegawai pemerintahan sangat penting untuk mencegah serangan siber akibat kelalaian manusia.

b. Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Analisis Data dan Kualitas Data yang Tidak Memadai;

Kurangnya tenaga ahli statistik dan analisis data dilingkungan pemerintahan daerah serta terbatasnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya tata kelola data yang baik. Padahal dalam rangka mendukung Satu Data Jombang sangat dibutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dibidang pengelolaan dan analisis data.

Oleh karena itu Diskominfo Kabupaten Jombang berupaya untuk melaksanakan Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan

data statistik sehingga dapat meningkatkan kualitas data statistik sektoral di Kabupaten Jombang.

- c. Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang menghasilkan data sehingga tidak bisa menyajikan data secara realtime.

Belum optimalnya integrasi data antar perangkat daerah Data yang terpublikasi sudah tervalidasi dan memiliki metadata standar sehingga masih ditemukan data yang tidak konsisten, tidak sinkron antar-OPD, dan tidak memiliki metadata.

Satu Data Jombang bertujuan untuk menyelaraskan data sektoral guna mendukung efisiensi kebijakan dan pembangunan berbasis data. Langkah yang diambil yaitu penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait standarisasi dan interoperabilitas data antar perangkat daerah, meningkatkan koordinasi lintas sector melalui forum data daerah dan pemanfaatan aplikasi sambang.jombangkab.go.id dengan fitur-fitur yang user friendly.

1. 6 CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Dinas Kominfo mendukung :

1. Misi 5 RPJMD : Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif
2. Tujuan 5 RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD yang bersih dan efektif
3. Sasaran 11 RPJMD : Terwujudnya Transformasi Birokrasi Berbasis Digital

Cascading adalah proses manajemen kinerja organisasi dan bagaimana cara melakukannya. Diskominfo Kabupaten Jombang memiliki skema sebagai berikut :

**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas
Kominfo Tahun 2025-2029**

Misi 3 :

Menghadirkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif

Tujuan RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi PD yang bersih dan efektif	Tujuan PD : Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Sasaran Strategis PD: Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah
	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
	Optimalnya data statistik sektoral
	Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2025 – 2029

Tujuan :	Indikator Tujuan :
Meningkatkan transformasi digital dan keterbukaan informasi publik	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital
Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital
Optimalisasi Pengelolaan	1. Tingkat tindak lanjut

Komunikasi dan Informasi Publik	pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
	2. Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025,

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi tahun 2025-2029.

RENCANA KERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025.

Indikator Tujuan pada PK awal dengan PK Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat perubahan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 sehingga terdapat penyesuaian, pada perjanjian kinerja awal berdasarkan sasaran dari RPD 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan

Kinerja Birokrasi” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten menjadi mendukung tujuan RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Transformasi Birokrasi Berbasis Digital” dengan indikator Indeks SPBE.

Dalam hal target, definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data maka tujuan dan sasaran indikator tersebut terdapat penyesuaian sebagai berikut :

PK AWAL (RPD) TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Target
TUJUAN			
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	72
SASARAN :			
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	67 (sedang)
	2	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK)	Level 3
	3	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika	2.88 (terkelola)
	4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.5 (terkelola)
	5	Indeks Keamanan Informasi 620 (tinggi) (KAMI)	620 (tinggi)
	6	Nilai Evaluasi AKIP PD	80.10

PK PERUBAHAN (RPJMD) TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
TUJUAN :		
1	Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan	1. Indeks SPBE/Pemerintah Digital 4.10

Tujuan/Sasaran		Indikator		Target
	Informasi Publik			
No	SASARAN :			
1	Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	1	Indeks Layanan Digital	9.4%
2	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
		3	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%
4	Optimalnya data statistik sektoral	4	Indeks Pembangunan Statistik	2,5
5	Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	5	Indeks KAMI	640
6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	6	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,10

RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebagai berikut : Anggaran setelah perubahan : Rp. 24,340,787,745 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.170.531.957,00	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 3.465.713.750,00	APBD, DBHCHT
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 7.636.502.065,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 1.345.374.148,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 722.665.825,00	APBD

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100	11.170.531.957
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100	38.851.000

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	17.727.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	21.124.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	orang/bulan	32	5.899.622.044
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	5.715.508.044

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	181.754.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.360.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	455.471.818
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	Paket	12	13.819.800

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
			angan Bangunan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	62.088.578
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	132.778.400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	46.080.440
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	12.612.000

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	188.092.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	821.390.900
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	404.920.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	416.470.900
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	3.955.196.195

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	47.540.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	220.100.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	187.837.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	63	3.499.719.195

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi	%	10	3.465.713.750
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	3.4	3.465.713.750
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	Laporan	3	2.600.165.780

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
			kegiatan relasi media			
		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	146.174.190
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	100	719.373.780
3	Optimalisasi Layanan Digital Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	%	100	7.636.502.065

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intra	Perangkat	53	76.771.920
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	76.771.920
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	2	7.559.730.145
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	10	602.556.000

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	294.199.145
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	10	706.997.500
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	84.650.000
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang	Perangkat	53	837.870.000

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
			terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	Program	1	2.663.670.000
		Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	4	69.787.500
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat	53	2.300.000.000
4	Optimalnya Data Statistik Sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	%	100	1.345.374.148

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	data	28	1.345.374.148
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	70	141.350.500
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	100	1.123.473.748
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	55.108.300

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1	25.441.600
5	Optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	55	722.665.825
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	PD	53	722.665.825
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	16.339.975

No	Nama Sasaran	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
					K	Rp
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	84.896.150
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat	53	621.429.700

Pada Anggaran Tahun 2025 terdapat perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dimana pada anggaran murni APBD sebesar **Rp 19.377.038.071** (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) berubah menjadi **Rp. 24,340,787,745** (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) pada anggaran perubahan Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi.

Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja ini akan dijelaskan Perbandingan target dan realisasi yang mengacu pada RPD 2024-2026 dengan tujuan, sasaran strategis yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan berdasarkan Renstra 2025-2029 mengacu Perubahan Kinerja Tahun 2025.

1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan PK Awal (Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	72	85.85	119.23
2	Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	67 (sedang)	68.55 (sedang)	102.31
		2	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK)	Level 3	Level 3	100
		3	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika	2.88 (terkelola)	Belum Rilis	Belum Rilis
		4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.5 (terkelola)	3.06	122.40

No	Tujuan/Sasaran Strategis	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		5	Indeks Keamanan Informasi (tinggi) (KAMI) 620	620 (tinggi)	651	105
		6	Nilai Evaluasi AKIP PD	80.10	76.05	94.94
Rata-Rata Capaian						106%

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada RPD 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu 106%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 1 tujuan dan 6 sasaran strategis dengan capaian strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Target 72 dengan realisasi 85.85

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2025 Nomor : 000.8.6/9977/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85 dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	NILAI	
			2024	2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	7.16	8.19
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2.00	1.75
	Rencana Aksi	4%	2.33	3.17
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2.83	3.28
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	72.91	77.66
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41.01	43.29
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31.90	34.36
TOTAL			80.07	85.85

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 perindikator dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi
		2024	2025		
A	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	7.16	8.19	- Seluruh rekomendasi telah dicantumkan dalam rencana aksi, namun belum terlihat kecukupan secara substansi dimana indikator atas tindak lanjut belum menggambarkan output perubahan yang jelas - Rencana Aksi yang disusun sudah optimal dan terdapat peningkatan kualitas dari tahun sebelumnya, namun sebagian besar indikator rencana aksi hanya berbasis dokumen, belum seluruh indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari rencana aksi yang selaras dengan sasaran dan target indikator RB PD yang ditetapkan	- Melanjutkan kontribusi Agen Perubahan terhadap upaya perubahan pada unit kerja. - Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD. - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB secara berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi - Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi
		2024	2025		
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang				
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		90.18	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	4.00	5.00		
3	Indeks Penerapan SPBE	99.85	97.67		
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	96.91	89.57		
5	Nilai SAKIP	79.19	76.05	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian c Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	100.00	5.00	Tingkat 5 — Optimum dan Berorientasi Nilai Catatan: Kepuasan yang sangat tinggi mencerminkan layanan yang proaktif, adil, responsif, dan stabil pada beban kerja yang meningkat, disertai pengambilan keputusan berbasis data.	Rekomendasi: 1. Menerapkan pemantauan prediktif (peringatan dini lonjakan permohonan), penjadwalan petugas adaptif, dan pengingat masa berlaku dokumen. 2. Melaksanakan riset pengalaman pengguna berkelanjutan (wawancara periodik, uji kegunaan, A/B testing) serta co-design bersama perwakilan pengguna. 3. Memperkuat ketahanan layanan melalui tinjauan pascainsiden, target penurunan MTTR, dan uji ketangguhan (chaos testing) terbatas. 4. Mengoptimalkan efisiensi operasional melalui FinOps/Green IT dengan pengukuran biaya per transaksi tanpa menurunkan CSAT.
7	Tingkat Pembangunan ZI	2.00	3.75	Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai dengan ketentuan.	Terus melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	
		2024	2025			
					Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal ZI untuk penilaian awal unit kerja yang diusulkan mendapat predikat ZI WBK/WBBM Tahun 2026	
8	Maturitas SPIP	3.24	0	Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah	Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten	Ir
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5.00	5.00	HASIL KERJA KONSISTEN DAN SANGAT MEMUASKAN	PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH BAIK	D
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.53	3.79	Sangat jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.	B
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	71.13	85.24	Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	D P K
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	92.50	95.00			B B
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	83.78	95.66	Memuaskan	OK	B
14	Indeks Pengelolaan Aset	72.72	87.92	Komponen A (Prosesntase Ketepatan Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan) Terdapat ketidaksesuaian antara rencana pengadaan pada RKBMD dengan realisasi belanja BMD Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan) Terdapat beberapa laporan bulanan yang penyampaiannya terlambat Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan Penatausahaan Keuangan)	KOMPONEN A Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD, yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak	B

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	
		2024	2025			
				Sudah sesuai	berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya. KOMPONEN B Laporan pengadaan bulanan wajib dilaporkan kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini merupakan batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik KOMPONEN C Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset telah sesuai dengan data belanja modal.	
II	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	88.33	100.00			Ir
A	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional					
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	100.00	86.67	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai Perencanaan SKP hanya mencapai 6,67 dari 10, Pelaksanaan Kinerja memperoleh nilai 5 dari 10, serta Ketepatan Waktu Penilaian SKP juga	Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan SKP, melengkapi bukti dukung, serta memperbaiki ketepatan waktu penilaian melalui disiplin dan monitoring berkala.	B

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
		2024	2025			
				berada pada nilai 5 dari 10. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan ketepatan waktu penilaian kinerja masih belum optimal dan memerlukan peningkatan konsistensi serta ketelitian dalam penyusunan maupun pelaksanaannya.		
2	Indeks Profesionalitas ASN	87.98	87.36	Kecuali dimensi disiplin, pencapaian maksimal dari nilai semua dimensi masih belum optimal.	Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai, dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN, dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang belum optimal sesuai tingkat jabatan.	BKPSDM
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	2.00	65.80	Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum efektif dalam menanamkan budaya kerja yang telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi.	Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.	Bagian Organisasi
4	Indeks Pelayanan Publik	4.20	4.68	sesuai LHE	sesuai LHE	Bagian Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.11	94.42	untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah	segera melakukan Tindakanlanjutan dari RTL yg ditetapkan	Bagian Organisasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan mencapai kategori A- (Memuaskan dengan Catatan) dengan nilai 85,85. Dalam penilaian Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, nilai tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada peringkat ke-4 dari seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi. Urutan pertama yaitu Kecamatan Ngoro dengan nilai 86,47, urutan kedua yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 86,45, Urutan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 86,17, Urutan ke empat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 85,85 dan Urutan kelima yaitu Inspektorat dengan nilai 84,45.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar indikator penilaian pada area perubahan Reformasi Birokrasi dengan hasil melampaui target 72 dengan realisasi 85.85 dengan capaian 119,23%. Reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika menggambarkan bahwa kinerja tata kelola organisasi, akuntabilitas, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan sebagian besar perangkat daerah lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi yang akan diimplementasi dan ditindaklanjuti pada Tahun 2026.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP), Target 67 dengan realisasi 68,55 dengan capaian 102,31

IP-IKP adalah alat ukur komposit (gabungan) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). IP-IKP bertujuan untuk menilai dan memotret kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik (IKP) secara menyeluruh pada badan publik, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten).

Hasil I-PIKP Tahun 2025

Tabel 7.1. Hasil Pengukuran I-PIKP Tahun 2025

Dimensi Input					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
1	Anggaran	1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan	4,00	0,33	1,32
		2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP	3,50	0,33	1,16
		3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP	3,50	0,33	1,16
		4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP	3,50	0,33	1,16
		5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP	3,50	0,33	1,16
		6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	3,50	0,33	1,16
		7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia IKP	3,50	0,33	1,16
2	Bahan Informasi	1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP	5,00	0,67	3,35
		2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak	4,00	0,67	2,68

		konvensional (surat kabar dan majalah berita)			
		3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media eletronik konvensional (radio dan TV)	4,00	0,67	2,68
		4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring)	4,00	0,67	2,68
		5. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	4,00	0,67	2,68
		6. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi lain	4,00	1,00	4,00
		7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah	5,00	1,00	5,00
3	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi	7,00	0,67	4,69
		2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi	7,00	1,00	7,00
		3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	6,00	0,33	1,98
4	Media dan Saluran Komunikasi	1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan	7,00	1,00	7,00
		2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat	4,50	0,67	3,02
		3. Ketersediaan media partner	4,50	1,00	4,50
		4. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas	4,50	0,67	3,02
		5. Ketersediaan media partner	4,50	1,00	4,50
INDEKS DIMENSI INPUT			100,00		67,02
Dimensi Proses					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
5	Pengumpulan Data dan Informasi	1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP	9,00	0,33	2,97
		2. Frekuensi pengumpulan data	8,00	0,67	5,36

		dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik			
		3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain	8,00	0,67	5,36
6	Perencanaan	1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	6,25	0,67	4,19
		2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan	6,25	0,67	4,19
		3. Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan	6,25	1,00	6,25
		4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP	6,25	0,67	4,19
7	Pelaksanaan	1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah	5,00	1,00	5,00
		2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang	5,00	1,00	5,00
		3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka	5,00	1,00	5,00
		4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi	5,00	1,00	5,00
		5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi	5,00	1,00	5,00
		6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik	5,00	1,00	5,00
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	7,00	0,67	4,69

		2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	7,00	0,67	4,69
		3. Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"	6,00	0,67	1,98
INDEKS DIMENSI PROSES			100,00		75,90
Dimensi Output					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
9	Agenda Publik	1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah	-	-	61,23
		2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah	-	-	60,92
		3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)	-	-	53,85
		4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik	-	-	68,31
10	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	1. Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah	-	-	68,00
		2. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah	-	-	67,69
		3. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah	-	-	84,31
		4. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah	-	-	59,38
		5. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah	-	-	58,46
		6. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh	-	-	68,31

		informasi secara cepat, dan tidak berbayar			
		7. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	-	-	67,69
		8. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah	-	-	61,54
11	Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	1. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai	-	-	58,77
		2. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik	-	-	64,00
		3. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat	-	-	59,08
		4. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat	-	-	60,00
		5. Obyektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)	-	-	78,77
		6. Kelengkapan informasi publik pemerintah	-	-	64,00
		7. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah	-	-	74,15
		8. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami	-	-	74,77
		INDEKS DIMENSI OUTPUT			-
Dimensi Outcome					
No	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Total
12	Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	1. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu	-	-	65,23
		2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak	-	-	68,00
		3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi	-	-	66,15

		pemerintah daerah			
13	Pemerataan Informasi	1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum	-	-	65,85
		2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat	-	-	64,31
		3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas	-	-	57,85
		4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP	-	-	68,92
14	Keadilan Informasi	1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui	-	-	67,94
		2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah	-	-	66,35
INDEKS DIMENSI OUTCOME			-	-	65,62

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Penilaian I-PIKP tahun 2025 didasarkan pada perhitungan rata-rata dari total nilai I-PIKP masing-masing dimensi, yaitu dimensi input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan penilaian I-PIKP pada keempat jenis dimensi tersebut, maka perhitungan I-PIKP secara keseluruhan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (sedang)
2. I-PIKP Dimensi Proses : 75,90 (baik)
3. I-PIKP Dimensi Output : 65,66 (sedang)
4. I-PIKP Dimensi Outcome : 65,62 (sedang)
5. I-PIKP Tahun 2024 : 68,55 (sedang)

Berdasarkan hasil nilai rata-rata, maka I-PIKP tahun 2025 sebesar 68,55 atau dalam kategori 'Sedang'. Jenis dimensi dengan nilai I-PIKP tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah: (i) pertama adalah dimensi proses; (ii) kedua adalah dimensi input; (iii) ketiga adalah dimensi output; dan (iv) keempat adalah dimensi outcome. Berdasarkan hasil tersebut, maka secara umum jenis dimensi yang perlu diprioritaskan penanganannya secara berurutan dalam meningkatkan kinerja PIKP adalah jenis dimensi outcome, dan kemudian dimensi output, input, dan kemudian proses.

Prioritas kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP didasarkan pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi

- Berdasarkan analisis nilai disparitas melalui Diagram Radar, maka dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang perlu diprioritaskan atau yang harus mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi output dan kemudian disusul dimensi outcome. Sementara perbaikan dimensi input dan dimensi proses lebih ditekankan pada dimensi input karena ragam variabel dalam dimensi input mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja dimensi lainnya.
- Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara untuk dimensi outcome, juga banyak bersinggungan dengan kualitas pelayanan dan pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya dalam aplikasi Lapor SP4N. Penekanan lain yaitu pemerataan informasi yang mengharuskan kegiatan IKP mampu menjangkau seluruh kecamatan/desa, mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.

b. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel

- Pada total variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya yang paling tinggi.

- Pada total variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel agenda publik; (ii) variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik; dan (iii) variabel pemerataan informasi. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

c. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator

- Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi input dan dimensi proses secara berurutan adalah: (i) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP; (ii) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP; dan (iii) ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi”.
- Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan dimensi outcome secara berurutan adalah: (i) pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi); (ii) kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah; (iii) ketersediaan media komunikasi pemerintah (contoh : website / buletin milik pemerintah); dan (iv) kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

3. Strategi pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis strategi, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal

- Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (System Development Life Cycle) untuk mendukung kegiatan IKP
- Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih

menarik, baik offline maupun online

- Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas
- Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media partner yang dimiliki oleh Diskominfo
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri.

b. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menghadapi Ancaman Eksternal

- Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik
- Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media mainstream maupun non mainstream
- Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada masyarakat maupun pemangku kepentingan
- Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (Service Level Agreements)
- Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik.

c. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal

- Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline
- Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang informasi berbasis program prioritas daerah
- Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara pengumpulan data dan analisa aduan
- Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling
- Perlu adanya Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N.

d. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Eksternal

- Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP
- Penguatan politik anggaran pada Diskominfo
- Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk Policy Brief, setidaknya 3 bulanan
- Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP pelayanan IKP
- Peningkatan kapasitas bandwidth pada website Pemda Jombang
- Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian yang diperoleh adalah 68,55, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,31% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan informasi publik, penyebaran informasi pembangunan, serta penguatan komunikasi pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik, optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemerintah, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas pengelola informasi dan dokumentasi.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, upaya peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperluas jangkauan diseminasi informasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas konten informasi publik, serta memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah daerah, serta menindaklanjuti hasil rekomendasi I-PIKP pada tahun 2026.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 2 : Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK), target Level 3 dan realisasi pada tahun 2025 Level 3 dengan capaian yaitu 100%

Tujuan dari Pengukuran IKTIK dimaksudkan untuk menghasilkan strategi peningkatan kinerja tata kelola TIK yang efisien dan efektif untuk mewujudkan ekosistem e-government yang ideal melalui penyelenggaraan SPBE. Strategi ini sangat dibutuhkan sebagaimana Amanah Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE.

Pendekatan pengukuran IK-TIK di tahun 2025 sama dengan pengukuran di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan metode Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019. Pendekatan ini berfokus pada penilaian kapabilitas proses tata kelola dan manajemen TIK dalam organisasi Pemerintah Daerah. COBIT 2019 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif terkait tata kelola dan manajemen.

Tabel 4.3. Aspek dan Variabel Pembentuk Kuesioner COBIT 2019

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
Aspek Input		
1	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala prioritas pengembangan TIK 2. Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK 3. Proses evaluasi pengembangan e-government 4. Strategi kebijakan TIK 5. Keselarasan kebijakan TIK dengan visi misi instansi
2	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK 2. Program pelatihan TIK
3	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
		2. Proses penanggulangan bencana TIK
		3. Pengelolaan keamanan informasi
		4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
		5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
		6. Infrastruktur jaringan antar OPD
		7. Infrastruktur terkait akses internet terpusat
		8. Inventarisasi infrastruktur TIK
4	Aplikasi	1. Inventarisasi aplikasi TIK
		2. Situs resmi instansi /OPD
5	Perencanaan	1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
		2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
		3. Rencana induk TIK
		4. Anggaran penerapan TIK
Aspek Proses		
6	EDM01	1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7	EDM02	1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
8	EDM03	1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan TI
9	EDM04	1. Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat TI
10	EDM05	1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11	APO01	1. Mengintegrasikan proses pelaksanaan TI dengan orientasi instansi
12	APO02	1. Cara instansi mengidentifikasi potensi teknologi dan menciptakan pelayanan publik
13	APO03	1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan TI yang optimal
14	APO04	1. Ketersediaan divisi TI pada struktur instansi
15	APO05	1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan penawaran investasi
		2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan layanan dan kapabilitas TI
16	APO06	1. Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
17	APO07	1. Kesesuaian proses rekrutmen personil TI dengan kebijakan dan prosedur instansi
18	APO08	1. Koordinasi dalam penerapan integrasi pengelolaan jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19	APO09	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20	APO11	1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas TI
21	APO12	1. Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22	APO13	1. Kepemilikan keamanan TI yang memadai
23	BAI01	1. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan TI dengan strategi instansi
		2. Sistem pelaporan kinerja TIK
24	BAI 03	1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
		2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
		hardware
25	BAI04	1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI
26	BAI05	1. Penetapan rencana uji perubahan TI sudah sesuai dengan standar instansi
27	BAI06	1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara mendadak dan pendokumentasiannya
28	BAI07	1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai standar yang ada
29	BAI08	1. Perencanaan pengembangan SDM untuk solusi operasional
30	BAI09	1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI
31	BAI10	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang TI
32	DSS01	1. Implementasi prosedur operasi TI untuk mendukung kinerja instansi
33	DSS02	1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas sesuai dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan
		2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI, penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian resolusi
34	DSS03	1. Pengelolaan permasalahan TI sesuai dengan standar
35	DSS04	1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan hardware pada instansi
36	DSS05	1. Dukungan layanan TI pada instansi
37	DSS06	1. Prosedur untuk back-up data sejalan dengan layanan dan dukungan bisnis
38	MEA01	1. Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola TI dengan tata kelola instansi secara keseluruhan
39	MEA02	1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan
40	MEA03	1. Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur dan metodologi TI
Aspek Output		
41	Output	1. Kompleksitas layanan dilihat dari informasi, interaksi, transaksi dan integrasi
		2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk warga dan pelaku usaha
42	Usage	1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi website pemerintah
		2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan publik secara online

Sumber: Pedoman Baku Kuesioner COBIT 2019

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
		2. Proses penanggulangan bencana TIK
		3. Pengelolaan keamanan informasi
		4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi
		5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya
		6. Infrastruktur jaringan antar OPD
		7. Infrastruktur terkait akses internet terpusat
		8. Inventarisasi infrastruktur TIK
4	Aplikasi	1. Inventarisasi aplikasi TIK
		2. Situs resmi instansi /OPD
5	Perencanaan	1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK
		2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK
		3. Rencana induk TIK
		4. Anggaran penerapan TIK
Aspek Proses		
6	EDM01	1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7	EDM02	1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
8	EDM03	1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan TI
9	EDM04	1. Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat TI
10	EDM05	1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11	APO01	1. Mengintegrasikan proses pelaksanaan TI dengan orientasi instansi
12	APO02	1. Cara instansi mengidentifikasi potensi teknologi dan menciptakan pelayanan publik
13	APO03	1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan TI yang optimal
14	APO04	1. Ketersediaan divisi TI pada struktur instansi
15	APO05	1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan penawaran investasi
		2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan layanan dan kapabilitas TI
16	APO06	1. Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
17	APO07	1. Kesesuaian proses rekrutmen personel TI dengan kebijakan dan prosedur instansi
18	APO08	1. Koordinasi dalam penerapan integrasi pengelolaan jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19	APO09	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20	APO11	1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas TI
21	APO12	1. Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22	APO13	1. Kepemilikan keamanan TI yang memadai
23	BAI01	1. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan TI dengan strategi instansi
		2. Sistem pelaporan kinerja TIK
24	BAI 03	1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware
		2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
		hardware
25	BAI04	1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI
26	BAI05	1. Penetapan rencana uji perubahan TI sudah sesuai dengan standar instansi
27	BAI06	1. Penanganan perubahan TIK yang dilakukan secara mendadak dan pendokumentasiannya
28	BAI07	1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai standar yang ada
29	BAI08	1. Perencanaan pengembangan SDM untuk solusi operasional
30	BAI09	1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI
31	BAI10	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang TI
32	DSS01	1. Implementasi prosedur operasi TI untuk mendukung kinerja instansi
33	DSS02	1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas sesuai dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan
		2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI, penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian resolusi
34	DSS03	1. Pengelolaan permasalahan TI sesuai dengan standar
35	DSS04	1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan hardware pada instansi
36	DSS05	1. Dukungan layanan TI pada instansi
37	DSS06	1. Prosedur untuk back-up data sejalan dengan layanan dan dukungan bisnis
38	MEA01	1. Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola TI dengan tata kelola instansi secara keseluruhan
39	MEA02	1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan
40	MEA03	1. Identifikasi peraturan yang harus dipenuhi untuk dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur dan metodologi TI
Aspek Output		
41	Output	1. Kompleksitas layanan dilihat dari informasi, interaksi, transaksi dan integrasi
		2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk warga dan pelaku usaha
42	Usage	1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi website pemerintah
		2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan publik secara online

Sumber: Pedoman Baku Kuesioner COBIT 2019

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dari kegiatan penyusunan IK-TIK tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran IK-TIK berbasis kuesioner COBIT 2019 yang divalidasi oleh kegiatan SKM pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah sebesar 3,30 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut dimasukkan dalam Level 3. Nilai ini mengalami hanya sedikit peningkatan namun tidak cukup berarti dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,29 (Kategori Baik). Nilai tersebut dapat dikatakan relatif stagnan. Margin peningkatan tahun 2025 dari tahun 2024 hanya sebesar 0,01 poin.
2. Nilai IK-TIK di tahun 2025 disumbang oleh setiap aspek, baik input, proses dan output. Aspek input dan proses terefleksikan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA.
 - a. EDM (Evaluate, Direct and Monitor)
 1. EDM01
SOP sudah ada namun belum terdokumentasi secara formal. Kondisi ini menyulitkan dalam melakukan audit internal, pertanggungjawaban, dan pembelajaran lintas periode. Dokumentasi penting untuk menjamin keberlanjutan proses meskipun terjadi pergantian personel atau pimpinan.
 2. EDM02
Saat ini belum ada dokumentasi. Tidak terdokumentasinya keputusan strategis dan arah kebijakan dapat menimbulkan inkonsistensi arah pengembangan TIK. Padahal, dokumentasi dalam proses pengawasan dan pengendalian menjadi alat bukti penting dalam evaluasi kinerja TIK.
 - b. APO (Align, Plan and Organize)
 1. APO01
Proses berjalan sebagian, dan proses perencanaan belum sepenuhnya matang serta masih belum selaras dengan strategi organisasi. Tanpa perencanaan TIK yang strategis dan terdokumentasi, sulit menjamin integrasi antara kebutuhan organisasi dan pengembangan teknologi.
 2. APO07
Kebutuhan SDM kurang, pegawai dituntut multi-talent. SDM yang terbatas

membuat peran ganda tidak terhindarkan. Hal ini berisiko menurunkan fokus, kualitas, dan pengawasan pada implementasi teknologi. Maka dari itu, penataan struktur organisasi TIK perlu diperhatikan.

3. APO08

Koordinasi ada namun tidak dilakukan secara rutin, hanya via chat/manual. Koordinasi informal tidak cukup untuk menjamin kelangsungan dan akuntabilitas kerja. Komunikasi harus terdokumentasi agar memudahkan tracing, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

4. APO12

Koordinasi dilakukan hanya saat ada masalah. Pendekatan reaktif tanpa dokumentasi prosedural akan menyulitkan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Idealnya, pengelolaan risiko dilakukan proaktif berdasarkan SOP dan dokumentasi yang sistematis.

c. BAI (Build, Acquire and Implement)

1. BAI03

Prosedur sering berubah mengikuti arahan pimpinan. Ketergantungan pada pimpinan tanpa SOP mengindikasikan lemahnya institusionalisasi proses. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan hasil dan rentan terhadap risiko personalisasi kebijakan.

2. BAI05

Ada perubahan saat masalah, tetapi tidak terdokumentasi. Dokumentasi penting agar perbaikan yang dilakukan dapat menjadi referensi ke depan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tanpa dokumentasi, proses pembelajaran organisasi menjadi terganggu.

d. DSS (Deliver, Service and Support)

1. DSS01

SOP ada tapi belum semua dijalankan. Ketersediaan SOP tanpa implementasi menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik, sehingga menghambat efektivitas layanan TIK kepada OPD atau publik.

2. DSS02

Lebih memilih komunikasi manual/chat, yang menyulitkan pengarsipan dan

pertanggungjawaban dalam pelayanan. Padahal komunikasi berbasis sistem akan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

3. DSS04

SOP digunakan hanya saat ada permasalahan. Padahal, SOP seharusnya menjadi panduan kerja utama, bukan alat reaktif. Pendekatan ini menunjukkan belum terbentuknya budaya kerja berbasis tata kelola.

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess)

1. MEA01

Sudah ada laporan dasar, namun pemeriksaan masih manual. Pengawasan manual tidak efisien dan berpotensi terlewat. Monitoring seharusnya berbasis indikator kinerja dan sistem pelaporan yang terstruktur.

2. MEA03

Evaluasi ada tapi tidak rutin. Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan kegiatan TIK. Evaluasi yang tidak konsisten menyulitkan deteksi dini dari permasalahan.

3. Evaluasi kinerja tata kelola TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga didasarkan pada hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berbasis output TIK, yang dievaluasi melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM juga mendukung pengukuran IK-TIK khususnya pada aspek output dengan menilai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis output TIK. Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan indeks rata-rata sebesar 3,11 dan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis output TIK sebesar 77,73. Indeks kepuasan tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 78,19. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh tuntutan terhadap kualitas website dan aplikasi yang semakin meningkat, terutama dari sisi muatan/konten yang seharusnya mencakup informasi, interaksi, transaksi, dan integrasi.
4. Akar masalah dalam meningkatkan kematangan tata kelola TIK didasarkan pada 5 (lima) kategori penyebab utama, yaitu: (i) SDM, yaitu persoalan kapabilitas dan ketersediaan personel yang terlibat dalam pengembangan dan website/aplikasi; (ii) metode/prosedur, berkaitan dengan persoalan proses, alur kerja, dan standar

operasional yang digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi; (iii) teknologi, mencakup persoalan infrastruktur, perangkat lunak, dan hardware yang mendukung operasional website/aplikasi; (iv) informasi/konten, yang berfokus pada persoalan kualitas, relevansi, dan penyajian data atau informasi yang ada di dalam website/aplikasi; dan (v) kebijakan/manajemen, yang berkaitan dengan persoalan kerangka kerja aturan, keputusan, dan arahan dari pimpinan atau pengambil kebijakan yang memengaruhi pengembangan dan pengelolaan website/aplikasi.

5. Terdapat 9 (sembilan) strategi prioritas yang perlu difokuskan pada peningkatan kematangan TIK di tahun mendatang, yaitu:
 - a. Strategi memperbaiki BAI03, dengan mentransformasi proses identifikasi dan pembangunan solusi TIK dari yang ad hoc dan reaktif menjadi sistematis, terstandar, dan terintegrasi dengan tata kelola TIK.
 - b. Strategi memperbaiki APO07, dengan mentransformasi pengelolaan SDM TIK menjadi sistematis, berbasis kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis TIK Pemerintah Daerah. Strategi memperbaiki KEL2, yang sama dengan APO07, yaitu mentransformasi pengelolaan SDM TIK menjadi sistematis, berbasis kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan strategis TIK Pemerintah Daerah.
 - c. Strategi memperbaiki DSS02.01, dengan memastikan bahwa SOP yang sudah ada benar-benar dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait, sekaligus mengoptimalkan proses untuk efisiensi dan efektivitas.
 - d. Strategi memperbaiki MEA01, dengan mentransformasi proses pengukuran dan evaluasi kinerja TIK dari manual menjadi otomatis, terpusat, dan analitis, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang didorong oleh data dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
 - e. Strategi memperbaiki MEA03, dengan mengubah kegiatan evaluasi yang bersifat event-driven menjadi proses yang terstruktur, terjadwal, dan terintegrasi dengan siklus manajemen TIK secara keseluruhan, dengan dukungan otomatisasi yang relevan.
 - f. Strategi memperbaiki OUT01, dengan bergeser dari penyediaan informasi dan interaksi dasar ke penciptaan layanan digital yang memungkinkan transaksi end-to-end dan didukung oleh integrasi sistem, dengan focus pada pengalaman

pengguna dan keamanan.

- g. Strategi memperbaiki KEL1, dengan mengembangkan, merekrut, dan mengelola SDM TIK secara holistik di seluruh Perangkat Daerah, focus pada pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualifikasi untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.
- h. Strategi memperbaiki USA02, dengan menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola konten digital, memastikan semua layanan public online menyajikan informasi yang lengkap, akurat, mudah dipahami, dan selalu up-to-date.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 4 : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika, target 2.88 (terkelola) dengan realisasi tahun 2025 yaitu Belum Rilis.

Pada Tahun 2025 hasil SPBE pada Pemerintah Kabupaten Jombang tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB, sehingga hasil pada tahun 2025 yaitu Belum Rilis.

Namun apabila mengacu pada nilai SPBE tahun 2024 maka Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika mengacu pada Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/213/415.10.1.3/2022 tentang Tim Asesor Internal dan Kelompok Kerja Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
1	Pembangunan Aplikasi SPBE	<p>Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi ini terdiri dari: (i) aplikasi umum; dan (ii) aplikasi khusus. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus Pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan: (i) perencanaan Pembangunan dan pengembangan aplikasi; (ii) proses perumusan analisiskebutuhan aplikasi; (iii) proses perancangan teknis; (iv) proses pembuatan kode program (coding) (v); proses pengujian aplikasi; dan (vi) proses implementasi aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Dalam menggunakan aplikasi sejenis, Pemerintah Daerah harus: 	2

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		<p>(i) telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan; (ii) melakukan kajian biaya dan manfaat; (iii) melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan aplikasi umum; dan (iv) mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Khusus Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
2	Layanan Pusat Data	Layanan Pusat Data dalam SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah komponen infrastruktur yang menyediakan sarana penyimpanan data dan aplikasi secara aman dan terintegrasi untuk Instansi	5

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		Pusat/Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan data, efisiensi penyimpanan, dan interoperabilitas layanan melalui Pusat Data Nasional.	
3	Layanan Jaringan Intra	Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra, Pemerintah Daerah menetapkan: (i) SOP penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan (ii) petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.	4
4	Penggunaan Sistem Penghubung	Pemerintah Daerah menggunakan sistem penghubung layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib: (i) membuat keterhubungan dan akses	3

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		<p>jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan jaringan intra pemerintah; (ii) memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan (iii) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelayakan keamanan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.</p>	
5	Manajemen Keamanan Informasi	<p>Manajemen Keamanan Informasi adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.</p> <p>Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.</p> <p>Manajemen Keamanan Informasi tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE, yakni Peraturan</p>	5

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	
6	Manajemen Data	Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data yang dihasilkan produsen data harus: (i) memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan; (ii) memiliki metadata yang mengikuti struktur dan format baku; dan (iii) memenuhi kaidah interoperabilitas data, yaitu data harus konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.	5

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
7	Layanan Pengaduan	Layanan Pengaduan yang dimaksud adalah layanan pada LAPOR SP4N	4
8	Layanan Data Terbuka	Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.	2

Tidak dilaksanakannya penilaian pada Indeks SPBE dikarenakan terdapat peralihan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital pada Tahun 2026. Berikut penjelasan sederhana mengenai tidak digunakannya lagi Indeks SPBE pada tahun 2026 dan digantikan dengan Indeks Pemerintahan Digital.

1. Perubahan Paradigma Digital Pemerintahan

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran transformasi digital pemerintah menggunakan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks ini menilai penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti aplikasi, layanan digital, tata kelola TI, dan infrastruktur.

Namun mulai tahun 2026, pemerintah melakukan penyempurnaan konsep tersebut menjadi Indeks Pemerintahan Digital. Perubahan ini bertujuan agar pengukuran tidak hanya menilai keberadaan sistem elektronik, tetapi juga menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh.

2. Perbedaan Fokus Penilaian

Perubahan dari SPBE ke Indeks Pemerintah Digital terjadi karena pendekatan lama dianggap masih berfokus pada implementasi aplikasi atau sistem, sedangkan konsep baru menilai aspek yang lebih luas, yaitu:

- a. Integrasi layanan digital pemerintah
- b. Pemanfaatan dan tata kelola data pemerintah
- c. Interoperabilitas sistem antar instansi
- d. Transformasi proses bisnis pemerintahan
- e. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital

Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat jumlah aplikasi, tetapi juga seberapa terintegrasi dan bermanfaatnya sistem digital bagi masyarakat dan pemerintah.

3. Dampak bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, perubahan ini berarti:

- a. Fokus pengembangan tidak hanya pada pembuatan aplikasi baru.
- b. Harus memperkuat integrasi sistem informasi antar perangkat daerah.
- c. Mengembangkan layanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- d. Memperkuat pengelolaan data dan keamanan informasi pemerintah.

Dengan tidak digunakannya lagi Indeks SPBE pada tahun 2026, pemerintah beralih pada pengukuran yang lebih komprehensif melalui Indeks Pemerintah Digital, yang menilai kematangan transformasi digital pemerintahan secara lebih luas dan terintegrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap indeks dan target yang ditetapkan pada RPD 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 5 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS), target 2.5 (terkelola) dengan realisasi tahun 2025 yaitu 3.06 dan capaian realisasi yaitu 122.40%

Hasil Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2025 adalah:

1. Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan persiapan sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.
2. Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah kabupaten/kota se Jawa Timur.
3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Catatan:

Domain
 Aspek
 Indikator

Hasil Penilaian EPPS pedomain

Domain	Bobot	Self Assessment
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI	28%	2.75
Domain Kualitas Data	24%	3.10
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	3.11
Domain Kelembagaan	17%	3.21
Domain Statistik Nasional	12%	3.44

Domain/Aspek	Bobot ¹	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	2.00
Metadata Statistik	25%	3.00
Interoperabilitas Data	25%	3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3.00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3.00
Akurasi	16%	3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3.50
Aksesibilitas	21%	3.00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3.00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3.33
Pengumpulan Data	26%	3.00
Pemeriksaan Data	21%	3.00
Penyebarluasan Data	21%	3.00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2.75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	4.00
Pengorganisasian Statistik	35%	3.00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3.00

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain

Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	2.00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3.00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3.00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3.00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3.00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3.00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3.00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	4.00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3.00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3.00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3.00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	4.00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3.00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3.00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3.00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3.00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	2.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3.00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	4.00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	4.00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3.00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3.00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	4.00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	4.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan ⁿ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	3.00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan

1. Kelengkapan Dokumen Kebijakan Kedua kegiatan telah memiliki dokumen kebijakan yang memuat penjelasan rinci mengenai penerapan berbagai aspek penting pengelolaan statistik, antara lain: Standar Data Statistik (SDS), metadata statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi. Hal ini menunjukkan komitmen awal yang baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang tertib dan terdokumentasi.
2. Ketersediaan Reviu Dokumen untuk Penilaian EPSS Kedua produsen data sudah melampirkan bukti reviu lokus yang mendukung proses penilaian EPSS. Ini menunjukkan upaya untuk melakukan penilaian internal terhadap proses penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Perhatian pada Standarisasi dan Interoperabilitas Adanya kebijakan rinci tentang interoperabilitas data dan kode referensi menjadi dasar yang kuat untuk mendukung integrasi data antar sektor serta peningkatan kualitas data secara berkesinambungan.

Kekurangan

1. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Belum Optimal Meskipun dokumen kebijakan sudah tersedia, dalam praktiknya setiap indikator, variabel, dan konsep yang digunakan belum dilengkapi standar data statistik yang sesuai. Hal ini menjadi catatan penting karena ketiadaan standar dapat mempengaruhi konsistensi, validitas, dan keterbandingan data antar periode maupun antar

wilayah.

2. Belum Ada Reviu Metadata yang Berkala dan Berkelanjutan Proses evaluasi penerapan metadata statistik oleh produsen data belum dilakukan secara rutin oleh pembuat kebijakan. Bukti reviu yang tersedia hanya bersifat lokus dan spesifik untuk penilaian EPSS, bukan hasil reviu periodik yang mencerminkan pemantauan implementasi metadata dalam kegiatan sehari-hari.
3. Reviu Interoperabilitas Data Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Sama halnya dengan metadata, proses reviu berkala terhadap penerapan interoperabilitas data belum dilaksanakan. Selain itu, belum disertakan bukti pendukung seperti URL API atau screenshot kode API yang dapat menunjukkan kesiapan teknis integrasi data secara real time atau machinereadable.
4. Reviu Penerapan Kode Referensi Belum Berkelanjutan Evaluasi penerapan kode referensi juga hanya dilakukan pada lingkup penilaian EPSS, belum ada mekanisme pemantauan rutin yang memastikan konsistensi dan keseragaman kode referensi dalam seluruh proses statistik.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Dokumen Pedoman Seluruh tahapan dalam kedua kegiatan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/168/415.10.1.3/2024 tentang Daftar Data Statistik dan Geospasial Kabupaten Jombang 2024, serta dilengkapi dengan KAK, SOP kegiatan, dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disusun oleh Walidata.
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data Hampir seluruh aspek pada Domain 2 telah diakomodasi, meliputi: relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi, aktualitas, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data, akses media penyebarluasan, ragam format data, keterbandingan, dan konsistensi statistik.
3. Pelaksanaan Rapat Evaluasi pada Beberapa Aspek Untuk indikator aktualitas data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data, dan konsistensi statistik, telah dilakukan rapat reviu dan evaluasi serta pembahasan tindak lanjut, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu pada sebagian komponen.

4. Keterbukaan Akses Data yang dihasilkan telah disebarluaskan melalui berbagai kanal, seperti website OPD, portal Sambang, media sosial, publikasi, dan open data yang dapat diakses publik.
5. Konsistensi dan Keterbandingan Data Informasi yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah, serta konsistensi angka pada berbagai publikasi, yang meningkatkan kepercayaan pengguna data.

Kekurangan Pelaksanaan Kegiatan

1. Minimnya Reviu dan Evaluasi Berkala Hampir seluruh indikator pada Domain 2 belum memiliki rapat reviu dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Sebagian evaluasi hanya dilakukan untuk kebutuhan penilaian EPSS, bukan sebagai mekanisme rutin.
2. Reviu Tindak Lanjut Belum Merata Walaupun beberapa indikator telah dilakukan reviu dan tindak lanjut, penerapannya belum menyeluruh pada semua aspek, khususnya relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi data, ketepatan waktu diseminasi, dan ketersediaan data.
3. Monitoring Implementasi SOP Belum Optimal Meskipun SOP telah disusun dan terdokumentasi, belum terdapat bukti monitoring terstruktur yang menilai sejauh mana SOP tersebut diikuti secara konsisten oleh produsen data.
4. Evaluasi Aspek Kritis Masih Terbatas Beberapa aspek yang krusial seperti relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data belum memiliki forum khusus untuk menampung umpan balik pengguna secara rutin, sehingga potensi penyempurnaan data belum tergal optimal.

3. Proses Bisnis Statistik

Kelebihan

1. Dokumen kebijakan dan pedoman sudah lengkap Tersedia Buku Pedoman PSS, SOP, KAK, serta Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang menjadi standar acuan bagi seluruh tahapan proses bisnis. Ini menunjukkan adanya komitmen formal dalam pengelolaan statistik.
2. Seluruh tahapan proses bisnis sudah berjalan Mulai dari identifikasi kebutuhan, desain, penyiapan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data telah dilaksanakan, dan ada bukti dukung berupa laporan,

dokumentasi, serta aplikasi pengolahan data.

3. Evaluasi dan reviu dilakukan secara berkala. Walaupun masih bersifat umum, namun adanya kegiatan evaluasi berkala menunjukkan proses perbaikan terus diupayakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kekurangan

1. Evaluasi belum detail per aspek/indikator. Reviu yang dilakukan masih bersifat umum, sehingga belum mampu mengidentifikasi kelemahan secara spesifik di setiap tahapan proses bisnis.
2. Bukti mutu belum lengkap. Uji validitas instrumen, reliabilitas, dokumentasi data cleaning, serta standar kualitas data belum terdokumentasi secara memadai sehingga sulit memastikan kualitas data.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur. Mekanisme untuk menindaklanjuti temuan evaluasi belum jelas dan monitoring kepatuhan OPD/produsen data terhadap pedoman belum terukur dengan indikator kinerja.

4. Proses Kelembagaan

Kelebihan:

1. Proses Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh seluruh produsen data dan berdasarkan prosedur baku yaitu mengacu pada Peraturan dari Kementerian Induk
2. Proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data dan diidentifikasi pada OPD lokus. serta sudah ada prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.
3. Proses Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data, dimana pada Laporan Akhir kegiatan statistik sektoral data yang dimuat tidak mencantumkan informasi individu. Serta sudah ada prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.
4. Proses Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Statistik maupun Bidang Manajemen Data telah dilakukan dengan baik dengan dilaksanakan diklat di bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS dan BKPSDM Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan rapat reviu dan evaluasi secara berkala.

5. Proses Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah diwujudkan dalam dokumen resmi dan ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat dan sosialisasi.
6. Penyelenggaraan Forum Satu Data selain tersedia Rencana Aksi SDI juga telah tersedia dokumen monitoring dan evaluasi dari seluruh Rencana Aksi SDI yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan SDI.
7. Proses Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal dibuktikan dengan adanya MOU kerjasama antara Pemkab Jombang dengan BPS Kabupaten Jombang.
8. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan dengan baik dimana tersedia peraturan/dokumen resmi penetapan walidata, tersedia rincian tugas walidata, seluruh tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan.

Kekurangan

Dokumen kebijakan yang memuat Proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum memuat seluruh poin yang terdapat pada Draft Penjelasan Indikator EPSS 2024_Rev1 beserta implementasinya.

5. Proses Statistik Nasional

Kelebihan:

1. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
2. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
3. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun Masyarakat luas.
4. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat

Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan revidi serta evaluasi secara berkala

5. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025
6. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral

Kekurangan:

Walidata telah melakukan penyebarluasan data melalui portal Satu Data Kabupaten Jombang <https://sambang.jombangkab.go.id/>, namun belum terhubung dengan portal SDI.

Dapat disimpulkan hasil EPPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 – Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :

1. Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.
2. Sudah ada pedoman atau SOP resmi.
3. Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.
4. Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing unit.

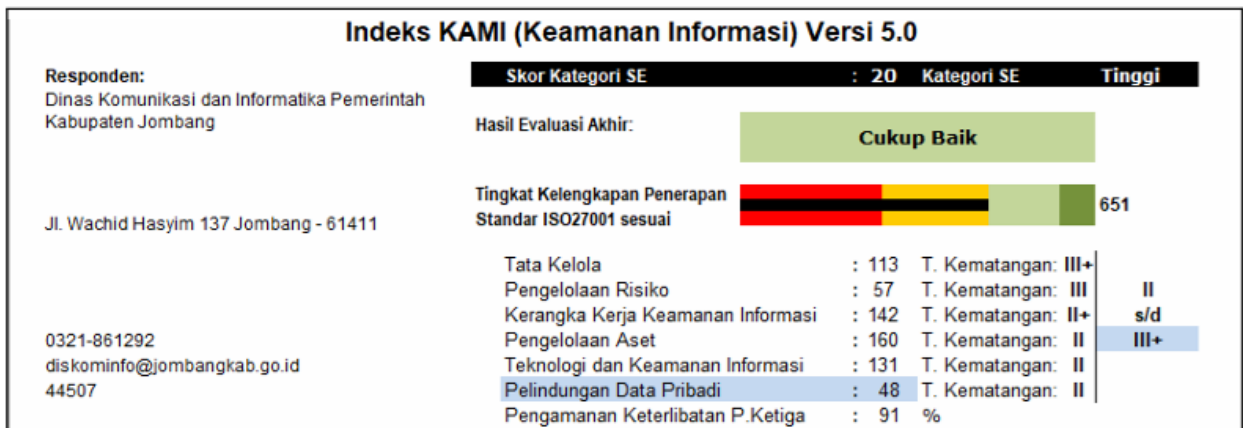
Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 6 : Indeks Keamanan Informasi, target 620 (tinggi) dengan realisasi tahun 2025 yaitu 651 dan capaian realisasi yaitu 105%.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

1. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
2. Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
5. Pengelolaan Aset Informasi
6. Teknologi dan Keamanan Informasi
7. Pelindungan Data Pribadi
8. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan)

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses pada Indeks KAMI versi 5.0 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang data pengukuran didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut :



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan tersebut ditunjukkan pada hasil perhitungan Indeks KAMI dengan skor kategori sistem elektronik sebesar 20 yang termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang diperoleh, tingkat penerapan keamanan informasi berada pada kategori cukup baik dengan skor 651. Hasil ini menggambarkan bahwa kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sudah memenuhi sebagian besar elemen penting keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Apabila dilihat pada grafik hasil penilaian, kondisi keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Jombang berada pada level warna kuning menuju hijau, yang menandakan posisi keamanan informasi berada pada tingkat cukup baik namun masih memerlukan penguatan di aspek tertentu.

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan	Responden	Skor Maksimal	Persentase
Tata Kelola	113	126	89%
Pengelolaan Risiko	57	72	79%
Kerangka Kerja	142	192	73%
Pengelolaan Aset	160	258	62%
Teknologi	131	186	70%
PDP	48	84	57%

Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa;

1. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori Cukup Baik.
2. Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dari 612, pada tahun 2025 menjadi 650.
3. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi, pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Indikator 7 : Nilai Evaluasi AKIP PD target 80.10 dengan realisasi 76.05 dan capaian realisasi 94.94%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 1 Agustus 2025, Nomor : 000.8.6.3/5682/415.10/2025, Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 Pada tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.43	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.19	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.56	18.75
Nilai Hasil Evaluasi			79.19	76.05
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dalam dokumen pokin belum didapati informasi terkait hubungan kinerja atau crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu strategis;
- b) Telah dilakukan analisis sebagai dasar penetapan target kinerja namun tindak lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya belum tergambar dalam analisis/dasar penetapan target dalam KKPT;
- c) Telah dilakukan dialog kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala namun tidak semua pegawai mampu memahami dan peduli karena dalam hasil survey lapangan sebagian pegawai tidak mampu menjelaskan hasil dari pembahasan forum perencanaan kinerja maupun pembahasan evaluasi kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi dalam penyesuaian strategi/aksi hal ini terlihat dari hasil monev renaksi renaksi tribulan IV seluruh aksi pada dokumen monev renaksi Kepala Perangkat Daerah maupun bawahan telah tercapai 100 %, namun pada dokumen pengukuran kinerja Tribulan IV terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu nilai AKIP, hal ini menunjukkan bahwa terdapat aksi dari bawahan yang tidak mendukung aksi atasan atau aksi bawahan tidak menjadi penyebab tercapainya kinerja atasan;
- 2) Pada dokumen Kurja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika belum disajikan terkait dengan anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP, sehingga tidak diketahui efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- 3) Dari hasil survei lapangan didapati bahwa sebagian pegawai menganggap bahwa hasil pengukuran kinerja tidak berpengaruh dalam melakukan penyesuaian rencana aksi

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Belum mengupload LKJIP pada website resmi kominfo.jombangkab.go.id;
- 2) Penulisan sub bab pada LKJIP belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan dengan analisis mendalam sehingga tidak diketahui apa factor yang mempengaruhi

kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya;

- 4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, hanya menarasikan isi dari table efisiensi;
- 5) Dari hasil survey lapangan didapati bahwa pegawai telah membaca LKJIP namun belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas LKJIP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025 dengan adanya penurunan pada 3 komponen, dan juga kinerja Perangkat Daerah dimana 1 indikator sasaran mengalami penurunan.

Dari hasil evaluasi AKIP yang telah diuraikan diatas, seluruh rekomendasi telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP sesuai target maka Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja

Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi serta memastikan indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.

2. Penguatan Cascading Kinerja

Melakukan penyesuaian (cascading) sasaran strategis dari tingkat perangkat daerah hingga ke unit kerja dan individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja

Mengoptimalkan sistem pengukuran kinerja melalui pemanfaatan data yang akurat dan valid, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, analitis, dan mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal

Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif apabila terdapat deviasi antara target dan realisasi.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP

Meningkatkan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan AKIP melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP diuraikan sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
1	Agar dokumen Pohon Kinerja disusun secara lebih komprehensif dengan memuat penjabaran hubungan kinerja lintas Perangkat Daerah (crosscutting performance), terutama pada sasaran yang bersifat makro dan isu-isu strategis daerah	Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah, yang menggambarkan crosscutting performance terhadap pencapaian sasaran makro dan isu strategis daerah	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pemetaan Lintas Perangkat Daerah (Crosscutting) dengan mengidentifikasi PD yang terlibat	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang memuat penjabaran pohon kinerja lintas	V			V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Perangkat Daerah (crosscutting performance) dijabarkan kedalam penyusunan Renstra 2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa sasaran tersebut penting, PD mana saja yang terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun dan Tantangan dan peluang dalam hubungan kinerja lintas PD)							Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
2	Agar penyusunan target kinerja dalam KKPT (Kertas Kerja Perencanaan Tahunan) tidak hanya berdasarkan analisis kondisi saat ini, namun jugamempertimbangkan tindak lanjut dan pembelajaran dari capaian sertaketidaktercapaian target kinerja tahun sebelumnya	Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap Kinerja Tahun Sebelumnya			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelumnya dalam LKJIP			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penyusunan Target Kinerja dalam KKPT dengan Kolaborasi Antar Bidang dan melibatkan seluruh ASN Dinas Kominfo			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
									plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap tribulan			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
3	Melibatkan seluruh pegawai secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi, tidak hanya pada saat forum, tetapi juga dalam proses tindak lanjut dan penyusunan rencana aksi individu/unit	Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai melalui alur kinerja mulai dari Perencanaan dan Evaluasi			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Melibatkan seluruh ASN dinas kominfo dalam Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Partisipasi Penyusunan Rencana Aksi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
4	Kepala Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi unit kerja di bawahnya telah di-cascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, melalui penyalarsan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala;	Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas Kominfo mengadakan rapat koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa rencana aksi telah dicascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan untuk memantau progres pencapaian rencana aksi dan hasil kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan Menyusun laporan evaluasi kinerja dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
5	Agar menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD pada Kurja Kepala Perangkat	Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo dengan menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD untuk dapat diketahui ada tidaknya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
	Daerah, sehingga dapat diketahui ada tidaknya efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja	efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja							plt. Bidang Statistik dan Persandian
6	Mensosialisasikan kembali siklus manajemen kinerja secara menyeluruh khususnya memastikan hasil pengukuran kinerja dibahas secara terbuka dan dijadikan bahan pertimbangan dalam forum evaluasi dan perencanaan berikutnya, termasuk melibatkan pegawai dalam proses identifikasi tindak lanjut	Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Rapat Evaluasi Internal Tribulan yang bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran kinerja dan dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi perencanaan berikutnya dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Hasil Evaluasi Internal Tribulan ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai. Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan perencanaan kinerja pegawai tribulan berikutnya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
7	Agar mengunggah LKIP pada laman resmi kominfo.jombangkab.go.id	LKIP Tahun 2024 telah diupload di kominfo.jombangkab.go.id pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti Dukung Pelaporan Tindak Lanjut akan dilampirkan pada rencana aksi Tindak Lanjut di Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 diupload di kominfo.jombangkab.go.id pada tribulan I Tahun 2026			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
8	Agar melakukan perbaikan pada laporan LKIP sesuai dengan sistematika pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	LKIP Tahun 2024 telah disusun dan ditindaklanjuti sesuai sistematika Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti dukung LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penyusunan LKIP Tahun 2025 disusun sesuai			V				Sekretaris, Kepala Bidang

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tribulan I Tahun 2026							Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
9	Agar melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja	LKIP Tahun 2024 telah dilengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 disusun dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja							
10	Agar menambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja dan dituangkan pada dokumen LKIP	LKIP Tahun 2024 telah ditambahkan penjelasan atau analisa efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 ditambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber daya mampu mendukung capaian kinerja			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
11	Perlu dilakukan penguatan peran serta pegawai dalam proses penyusunan LKIP melalui mekanisme yang mendorong partisipasi aktif, seperti forum	Sosialisasi internal mengenai pentingnya LKIP dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah bagi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dengan narasumber yang kompeten dibidangnya		V					Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
	internal, workshop evaluasi kinerja, atau pemberian ruang umpan balik secara formal. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja kolaboratif agar								
	seluruh pegawai merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas dokumen LKIP	Membentuk Tim Penyusunan LKIP yang melibatkan semua pegawai dan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tim Penyusunan LKIP mempunyai tugas masing-masing yang bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi LKIP secara kolaboratif			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses penyusunan, dari segi partisipasi pegawai maupun kualitas dokumen yang dihasilkan.				V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
12	Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis Hasil Evaluasi ini sehingga Tindak Lanjut benar-benar mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat Daerah	Analisis Hasil Evaluasi dengan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi	V		V				Se sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan ptt. Bidang Statistik dan Persandian
		Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Bidang Melalui Evaluasi Rapat Tribulan	V	V	V	V	V	V	Se sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan ptt. Bidang Statistik dan Persandian

Hal Besar

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Monitoring tribulan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindak lanjut sesuai dengan jadwal dan target kinerja dapat tercapai	V	V	V	V	V	V	Se sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan ptt. Bidang Statistik dan Persandian

Selanjutnya realisasi dan capaian Program berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi	10%	10%	100%

No	Program	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	100%	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	55%	55%	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Rata-Rata Capaian Program pada Renstra 2024-2026 pada tahun 2025 yaitu 100%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, Target : 100%, realisasi 100% capaian 100%

Penetapan Target 100% berdasarkan rata-rata capaian kinerja aparatur meliputi pemenuhan kinerja pegawai didasarkan pada perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pemeliharaan sarpras aset daerah sesuai dengan target kinerja pegawai

Formulasi Perhitungan :

Total Nilai Capaian Kinerja Seluruh Aparatur x 100%

Jumlah Aparatur

3500 (35 orang x capaian 100%)

_____ x 100% = 100%

35 orang

Capaian Kinerja Pada tahun 2025 seluruh pegawai Dinas Kominfo adalah 100%

**BERITA ACARA VERIFIKASI
DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	NAMA	NIP	OPD	JABATAN	RATA RATA CAPAIAN (%)	STATUS	STATUS FINAL
1	ZUHRISA NOOR LAILIA	198704222011012003	Dinas Komunikasi dan Informatika	Statistisi Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
2	SUWARNO	197502201996021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	100%	Aktif	Aktif
3	DIAN AMBARHASTUTI	197401251996022001	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	Aktif	Aktif
4	NANIK SETYONINGRUM	196906121989032009	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
5	TONY WARTONO	197705092010011007	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penelaah Teknis Kebijakan	100%	Aktif	Aktif
6	ENDRO WAHYUDI	198005281999121001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	103%	Aktif	Aktif
7	IDA KHUMAIDA	197407271993022003	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Aktif	Aktif
8	VIKA WARDATUL WAHDAH	198509212009012002	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perencana Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
9	KARYAWATI	197107152008012010	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penelaah Teknis Kebijakan	100%	Aktif	Aktif
10	RADEN WITCAKSONO SETYO PUTRO	198009142005011007	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	100%	Aktif	Aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tanggal cetak : 04-02-2026 07:59

NO	NAMA	NIP	OPD	JABATAN	RATA RATA CAPAIAN (%)	STATUS	STATUS FINAL
11	NABILA ARDHIANA	199706282020122004	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	100%	Aktif	Aktif
12	DEDI ZULKARNAIN	198701122025211006	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	100%	Aktif	Aktif
13	M JAZULI	197201182001121001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
14	KURNIA PUTRI UTOMO	199606212024212018	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	100%	Aktif	Aktif
15	NINA MUTHMAINNAH	198205022014072003	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100%	Aktif	Aktif
16	RAHAYU RETNOWATI	197703232009012003	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	100%	Aktif	Aktif
17	AAN DWI AGUSTIAWAN	198308042024211006	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Ahli Pertama	110%	Aktif	Aktif
18	LAVANNA INDANUS RAMADHAN	199601302019031003	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%	Aktif	Aktif
19	MOHAMMAD CHABIBI ROSYID	199008052024211004	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Terampil	100%	Aktif	Aktif
20	NURIYAH JAUHAR KAMILAH BASA	198305202011012004	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
21	ANUGERAH ANANG	198305212006041008	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengolah Data dan Informasi	100%	Aktif	Aktif
22	ZAKA DWIDIAN	199007302025211012	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	100%	Aktif	Aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tanggal cetak : 04-02-2026 07:59

NO	NAMA	NIP	OPD	JABATAN	RATA RATA CAPAIAN (%)	STATUS	STATUS FINAL
23	ACHMAD NUR FAJAR SUTOPO	198205022025211013	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	100%	Aktif	Aktif
24	NUR FATIH	198907252015052001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penata Layanan Operasional	100%	Aktif	Aktif
25	RADEN MUHAMMAD RIAN TO SAPUTRO	196905251992031016	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	100%	Aktif	Aktif
26	MOCHAMAD NUR HASAN	199902072022031002	Dinas Komunikasi dan Informatika	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	100%	Aktif	Aktif
27	FIRLANA NURDIANSYAH	198302252011011004	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengolah Data dan Informasi	100%	Aktif	Aktif
28	DANY HARDYANTO	198111232010011002	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sandiman Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
29	ALIVIA RAHMAWATI	199807232020122003	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	100%	Aktif	Aktif
30	ASTIKA CENDHANA WANGI	198404032002122001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	100%	Aktif	Aktif
31	MISERI	197006062009011004	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	100%	Aktif	Aktif
32	ANTOK KARTONO	198104182010011005	Dinas Komunikasi dan Informatika	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	Aktif	Aktif
33	ELOK SRI WAHYUNI	197611242005012009	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pranata Komputer Ahli Muda	100%	Aktif	Aktif
34	LULUS SETYOWAHYUNI	197309211996022001	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	110%	Aktif	Aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tanggal cetak : 04-02-2026 07:59

NO	NAMA	NIP	OPD	JABATAN	RATA RATA CAPAIAN (%)	STATUS	STATUS FINAL
35	LUHUR WAHYU WIJAYA	198205182014071001	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	100%	Aktif	Aktif

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Februari 2026

A.n Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Ditandatangani secara elektronik



IDA KHUMAIDA, S.Sos.
NIP 197407271993022003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tanggal cetak : 04-02-2026 07:59

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan informasi, Target : 10%, Realisasi : 10% dengan Capaian 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah daerah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di suatu badan publik untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam UU ini, setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menunjuk PPID.

Tugas dan Fungsi PPID Menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

- a. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang dimiliki badan publik.
- b. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
- c. Melayani permohonan informasi dari masyarakat.
- d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- e. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi kepada atasan badan publik.

Struktur PPID terdiri dari:

PPID Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika

PPID Pembantu : Perangkat Daerah

Jenis Informasi yang Dikelola PPID :

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- Informasi yang diumumkan serta-merta
- Informasi yang tersedia setiap saat
- Informasi yang dikecualikan (harus melalui proses uji konsekuensi) Pada Indikator ini target yang diperjanjikan yaitu 10% dari 53 Perangkat Daerah yang memiliki layanan informasi.

Formula Perhitungan Indikator :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki layanan informasi}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$$

Target 10% yaitu 5 Perangkat Daerah memiliki PPID Pembantu dari 53 Perangkat Daerah meliputi :

1. Inspektorat Kabupaten Jombang;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;
7. Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator : Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, Target : 100%, Realisasi : 100% dengan Capaian 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari Layanan Pemerintahan meliputi Layanan meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Layanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Formula Perhitungan :

Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang}}{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$$

**Data Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik
Tahun 2025 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :**

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	BAG ORGANISASI	BRAVO	bravo.jombangkab.go.id	Sistem Data Reformasi Birokrasi
2	BAG ORGANISASI	SUKMASANTRI	sukmasantri.jombangkab.go.id	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jombang
3	BAG ORGANISASI	E-SAKIP	e-sakip.jombangkab.go.id	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4	BAG PBJ	SIBAJA	sibaja.jombangkab.go.id	Layanan Perencanaan Barang dan Jasa
5	BAG PBJ	SPSE	lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
6	BAG PEMBANGUNAN	E-MONEV	monev.jombangkab.go.id	Layanan Realisasi Anggaran
7	BAG PEMERINTAHAN	LPPD	lppd.jombangkab.go.id	Sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8	BAG PEMERINTAHAN	LENTERA/LAKSAMANA	lentera.jombangkab.go.id	Layanan Elektronik Tata Pemerintahan yang terdiri dari layanan e-LPPD

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
				dan Sistem Informasi Layanan Kerjasama.
9	BAKESBANGPOL	KESBANGPOLSMART	kesbangpolmart.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat
10	BAPPEDA	E-HIBAH	e-hibah.jombangkab.go.id	Sistem usulan hibah dan bantuan sosial
11	BAPPEDA	E-LITBANG	e-litbang.jombangkab.go.id	Sistem Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA
12	BAPPEDA	SIPERANSINDER	monev.jombangkab.go.id/siperansinder	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender
13	BAPPEDA	BERKADANG	berkadang2.jombangkab.go.id/login?next_url=2023/home	Sistem Monev Berkadang
14	BAPPEDA	STUNTING	joss.jombangkab.go.id	Jombang Stop Stunting) merupakan aplikasi stunting dari P2KB Jombang yang mereview capaian stunting di wilayah kecamatan
15	BAPPEDA	E-PIPA / Jos dev	pipa.jombangkab.go.id, jos-dev.jombangkab.go.id	Sistem Pagu Indikatif Pengguna

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
				Anggaran
16	BKPSDM	SIAP ASN	siapasn.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian
17	BPKAD	SILELA	silela.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Lelang Aset OPD
18	BPKAD	E-BMD	e-bmd.jombangkab.go.id	Sistem aplikasi keuangan yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD)
19	DINAS DAGRIN	DIPUN AGEM	dipunagem-dagrinn.jombangkab.go.id	Layanan Sentra Industri IKM Kabupaten Jombang
20	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	mutasis.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Mutasi Siswa yang dibuat khusus untuk membantu proses perpindahan siswa baik masuk maupun keluar daerah Kabupaten Jombang
21	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	eai.disdikbud.jombangkab.go.id	Layanan Arsip Ijazah dikbud
22	DINAS KESEHATAN	SIMPUS	simpus.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
23	DINAS KESEHATAN	E-SPM	e-spm.dinkes.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal
24	DINAS KETAPRIK	E-BANTUAN	e-bantuan-dev.jombangkab.go.id	Aplikasi bantuan
25	DINAS KOMINFO	SAMBANG	sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data Jombang
26	DINAS KOMINFO	SATSET	satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
27	DINAS KOMINFO	DATA COVID	datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid-19 Kabupaten Jombang
28	DINAS KOMINFO	HELPDESK	helpdesk.jombangkab.go.id	Help Desk Pemerintah Kabupaten Jombang
29	DINAS KOMINFO	TEMPLATE SRIKANDI	template.jombangkab.go.id	Template naskah menggunakan SRIKANDI di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
30	DINAS KOMINFO	CSIRT	csirt.jombangkab.go.id	Sistem Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
31	DINAS KOMINFO	E-OFFICE (2023)	e-office-2025.jombangkab.go.id	Sistem Presensi dan Aktivitas TPP Pegawai Pemkab Jombang
32	DINAS KOMINFO	E-CLOUD	cloud.jombangkab.go.id	Sistem Cloud Penyimpanan Dokumen
33	DINAS KOMINFO	LAYANAN SPBE	layanan.jombangkab.go.id	Helpdesk Layanan Aplikasi
34	DINAS KOMINFO	SIMPAN	simpan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Pemerintah
35	DINAS KOMINFO	E-SULASH	e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
36	DINAS KOMINFO	UJICOBA	ujicoba.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
37	DINAS KOMINFO	SSO	sso.jombangkab.go.id	Single Sign-On (SSO) adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan melalui satu kali login
38	DINAS LH	SIALI	siali.dlh.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Resik

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
				Kali
39	DINAS PERHUBUNGAN	UJI KIR	ujikir.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Uji KIR
40	DINAS PERKIM	SIWON	siwon.jombangkab.go.id	Sistem Informasi WC Online (SIWON)
41	DINAS PERTANIAN	E-TRAKTOR	traktor-pertanian.jombangkab.go.id	Sistem Traking dan Monitoring Data Pertanian
42	DINAS PETERNAKAN	SIPERA-SP	sipera-sp.jombangkab.go.id	Sistem Pengendalian Pemeliharaan Sarana Prasarana Aset Dinas Peternakan
43	DINAS PUPR	SIJAKI	sijaki-dev.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Jombang
44	DINAS PUPR	SIMENARA	simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara
45	DINAS SOSIAL	INTUISI	intuisi.jombangkab.go.id	Layanan DATA PMKS dan PSKS
46	DISPORAPAR	SIKEMBANG	sikembang.jombangkab.go.id	Sistem sarana publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran tentang potensi dibidang olahraga di Kabupaten Jombang

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
47	DPMPTSP	GIS POTENSI	gispotensi.jombangkab.go.id	Sistem Aplikasi Berbasis Data Geospasial berbentuk peta digital, sebagai informasi untuk pelaku usaha maupun masyarakat, tentang POTENSI / Peluang INVESTASI di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Jombang.
48	KEC MOJOWARNO	SIGAP	sigap.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Mojowarno
49	KEC PETERONGAN	PECELJAGUNG	pecel-jagung.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Peterongan
50	KEC PLANDAAN	SIPADUKA	sipaduka.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Plandaan

LAYANAN PUBLIK :

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	DPMPD	SAPDOPALON v2.0	sabdopalon2.jombangkab.go.id	SABDOPALON menyediakan akses pada setiap warga Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan surat secara online serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dan Terintegrasi dengan data sosial masyarakat di Kabupaten Jombang (Data kesejahteraan masyarakat, Data Stunting dan Data social lainnya) yang berbasis Data kependudukan. Layanan SABDDOPALON meliputi 54 layanan.
2	DINAS LH	SILAJANG	silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Jombang
3	DPMPD	SIRINDUNONA	perizinan.jombangkab.go.id	Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
4	BAPENDA	APP BAPENDA	bapenda.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Wajib Pajak
5	DUKCAPIL	YAONAH	dukcapil- web.jombangkab.g o.id/yaonah/daftar	Sistem Layanan Online Penduduk meliputi KTP El, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Ket Pindah (Pindah dari Jombang), Surat Ket Datang (Datang ke Jombang), Online NIK/KK, dan SKTT bagi WNA

Total :

Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu 50

Layanan Publik yaitu 5

Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yaitu 55

55

____x100% =100%

55

Realisasi dan capaian pada Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yaitu 100%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator : Persentase data Sektoral yang dipublikasikan Target : 100%, Realisasi : 100%, Capaian 100%

Persentase Data Sektoral yang telah dipublikasikan dengan target 100% telah terealisasi 100% merupakan Seluruh data Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.3.5/61/415.42/2025 tentang Daftar Data

Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah dipublikasikan pada portal sambang.jombangkab.go.id meliputi 1061 data sektoral.

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Data Sektoral yang dipublikasikan di portal sambang x 100% = 100%

Jumlah Data Sektoral

$$\frac{1061}{1061} \times 100\% = 100\%$$

JUMLAH DAFTAR DATA YANG DI LAPORKAN KEPADA WALI DATA BERDASARKAN KESEPAKATAN FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN JOMBANG YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM PORTAL SAMBANG TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jumlah Data yang dilaporkan ke Wali Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 100.3.3.5/61/415.42/2025 tentang Daftar Data Kabupaten Jombang Tahun 2025
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	
4	Badan Pendapatan Daerah	14	
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28	
7	Bagian Hukum	1	
8	Bagian Organisasi	10	
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78	
11	Dinas Kesehatan	132	
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	28	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	

No	Perangkat Daerah/ Produsen Data	Jumlah Data yang dilaporkan ke Wali Data	Keterangan
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	
15	Dinas Lingkungan Hidup	21	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25	
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264	
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35	
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11	
22	Dinas Perhubungan	30	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	
24	Dinas Pertanian	81	
25	Dinas Perumahan dan Permukiman	26	
26	Dinas Peternakan	18	
27	Dinas Sosial	36	
28	Dinas Tenaga Kerja	21	
29	Inspektorat	3	
30	RSUD PLOSO	6	
31	Satuan Polisi Pamong Praja	5	
32	Sekretariat Daerah	1	
33	Sekretariat DPRD	6	
Jumlah		1061	

Realisasi dan Capaian pada indikator ini yaitu 100%. Jumlah Data yang dilaporkan ke Wali Data sebanyak 1061 data telah terupload dan terpublikasi pada sambaing.jombangkab.go.id

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik, Target : 55%, Realisasi 55%, Capaian 100%

Indikator pada program ini merupakan sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik dengan target 55% dan realisasi 55% dengan capaian 100%.

Keamanan informasi menjadi salah satu isu penting dan menjadi perhatian utama dalam keamanan informasi instansi Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Jombang. Pengertian keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, dan perubahan yang tidak sah.

Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tujuan utama keamanan informasi adalah: (i) melindungi kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi; (ii) menjaga integritas, yaitu memastikan bahwa informasi akurat dan lengkap, dan tidak diubah tanpa izin; dan (iii) menjamin ketersediaan, yaitu memastikan bahwa informasi tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Ancaman terhadap keamanan informasi dapat berupa: (i) malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data; (ii) serangan phishing, yaitu upaya untuk menipu orang agar mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan mereka; (iii) serangan peretasan, yaitu upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi; dan (iv) kesalahan manusia, yaitu kesalahan yang dapat menyebabkan kebocoran data atau pelanggaran keamanan lainnya.

Sistem aplikasi strategis adalah aplikasi atau sistem informasi yang memiliki peran krusial (utama dan berdampak besar) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian tujuan organisasi. Lima aplikasi yang telah dilakukan Assesment Keamanan Informasi adalah (1) <https://jombangka.go.id>, (2) bapenda.jombangkab.go.id (3) e-audit.jombangkab.go.id (4) siapasn.jombangkab.go.id, (5) sambaing.jombangkab.go.id pada aplikasi tersebut telah dilakukan penetration test dengan berfungsi baik.

Namun tetap harus dilakukan pemantauan sebagai berikut :

- a. Arsitektur perlu dilakukan perancangan ulang, software dan tools digunakan sudah terlampaui out of date. Langkah-langkah dalam merancang ulang arsitektur sistem antara lain: (i) melakukan analisis terhadap sistem yang ada; (ii) melakukan definisi kebutuhan organisasi pemerintahan daerah; (iii) perancangan arsitektur baru; (iv) pengimplementasian; dan (v) deployment, yaitu deploy sistem baru ke

lingkungan organisasi. Kegiatan ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan pedoman: (i) harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk tim IT, organisasi, dan pengguna akhir; (ii) fokus pada modularitas, yaitu rancang sistem yang modular sehingga mudah diubah dan ditingkatkan; (iii) mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat sejak awal; (iv) memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tren organisasi pemerintahan daerah; dan (v) merencanakan migrasi data dengan hati-hati dan perencanaan yang matang.

- b. Mengimplementasikan Secure Software Development Life Cycle (SDLC) dalam setiap proses pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. SDLC adalah pendekatan sistematis yang mengintegrasikan praktik keamanan informasi ke dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Tujuannya untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih aman dan mengurangi risiko kerentanan sejak tahap perencanaan hingga produksi. Tahapan Secure SDLC dan implementasinya antara lain: (i) perencanaan; (ii) perancangan; (iii) pengembangan; (iv) pengujian; (v) deployment; dan (vi) pemeliharaan.
- c. Membuat dokumentasi yang lengkap, sebagai langkah awal dalam memudahkan kolaborasi dengan sesama stakeholder atau pemangku kepentingan (internal Pemerintah Daerah, masyarakat, UMKM, dll). Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur adalah fondasi yang kuat dalam menjaga keamanan informasi. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai panduan bagi tim IT, pengguna, dan auditor dalam memahami dan mematuhi kebijakan keamanan. Jenis-jenis dokumentasi keamanan informais antara lain: (i) kebijakan keamanan; (ii) Standar Operasional Prosedur; (iii) dokumentasi teknis seperti diagram yang menggambarkan komponen sistem dan hubungan antar komponen; dan (iv) rancangan kontingensi yang mencakup rencana respons bencana dan rencana pemulihan bencana.
- d. Memperbaiki semua temuan kerentanan yang terdapat pada sistem elektronik dengan kategori tinggi serta memiliki tingkat resiko kerentanan yang tinggi. Temuan kerentanan dengan kategori tinggi dan tingkat risiko tinggi merupakan

ancaman serius bagi keamanan sistem.

Mengacu pada Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor : 500.14.2.1/663/415.23/2025 tanggal 26 September 2025, PK Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan PK Perubahan (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	No .	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	1.	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	4.10	n/a	Belum Rilis
2	Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	2.	Indeks Layanan Digital	9.4%	9.4%	100
3	Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100
		4.	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%	100%	100
4	Optimalnya data statistik sektoral	5.	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,06	110
5	Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	6.	Indeks KAMI	640	651	101.56
6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	7.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,10	85.85	107.18
Rata-Rata Capaian						103.12

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada Perubahan Renstra 2025-2029 pada tahun 2025 yaitu 103.12%

Tujuan Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik Indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital Target 4.10 Realisasi belum rilis dengan capaian belum rilis.

Tujuan meningkatnya transformasi digital dan keterbukaan informasi publik diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan pengelolaan informasi publik. Transformasi digital menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, efisiensi proses kerja, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintah Digital. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 4,10. Namun demikian, hingga saat penyusunan laporan kinerja ini dilakukan, nilai realisasi Indeks SPBE/Pemerintah Digital masih dalam proses penilaian oleh instansi yang berwenang sehingga hasil pengukuran kinerja belum dirilis. Sebagai bahan reuvi tahun 2025 dapat diuraikan hasil Indeks SPBE sebagai berikut :

Laporan Review Progress

Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE Tahun 2025

Indikator SPBE yang Dinas Komunikasi Dan Infomatika

1. Pendahuluan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Pelaksanaan Monev SPBE mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pemantauan SPBE dilaksanakan secara selektif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), tidak mencakup seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jombang. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penetapan pendekatan pelaporan capaian indikator SPBE Tahun 2025.

2. Konsideran dan Dasar Penetapan Capaian

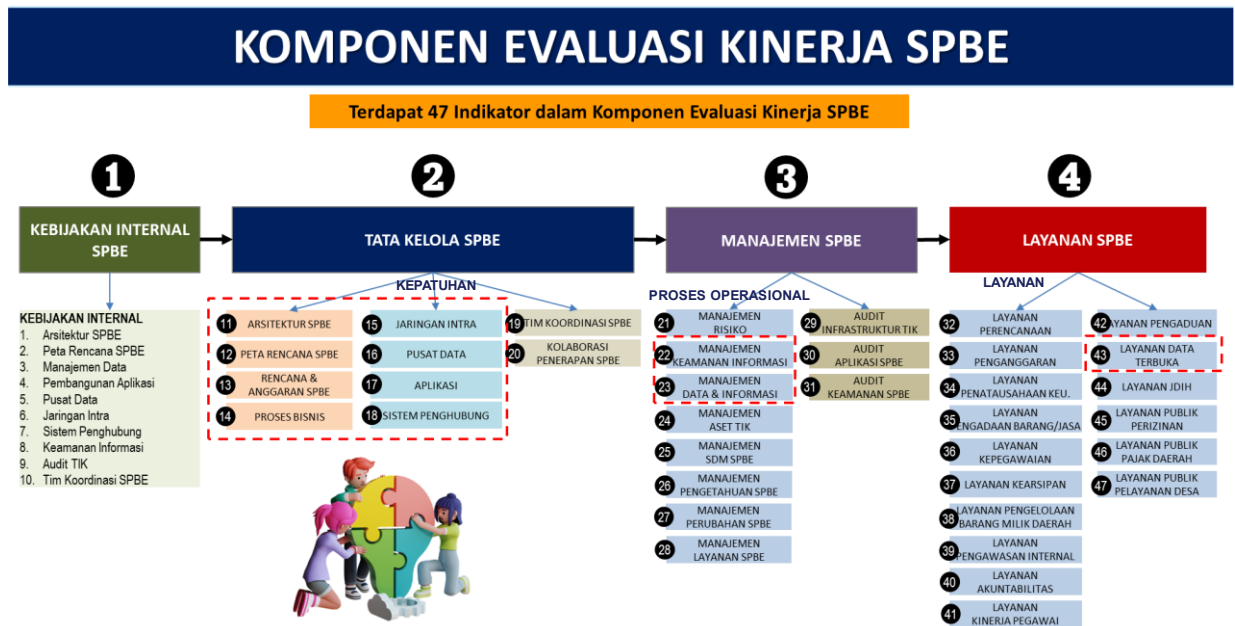
Sebagai dasar pertimbangan (konsideran) dalam penyusunan laporan review progress ini, digunakan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/38/PD.03/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal *Pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025*, yang bersifat Sangat Segera dan ditandatangani secara elektronik oleh Cahyono Tri Birowo, selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemantauan SPBE Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen, dengan daftar instansi yang ditetapkan sebagai peserta pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat dimaksud. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar penerima surat dan instansi peserta pemantauan, Kabupaten Jombang tidak tercantum sebagai pemerintah daerah yang mengikuti pemantauan SPBE Tahun 2025, sehingga tidak dilakukan proses penilaian SPBE terhadap Kabupaten Jombang pada tahun berjalan.

Kondisi tersebut menjadi dasar bahwa tidak terdapat nilai indikator SPBE baru yang dihasilkan melalui mekanisme evaluasi nasional SPBE Tahun 2025.

3. Ruang Lingkup Review dan Indikator yang Diampu

Terdapat 47 indikator SPBE sebagai berikut :



Mengacu pada keputusan bupati jombang nomor: 188.4.45/ 213 /415.10.1.3/2022 tentang tim asesor internal dan kelompok kerja penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tanggal 22 Juni 2022 pengampu indikator pada perangkat daerah sebagai berikut :

C. PENGAMPU INDIKATOR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator	OPD Pengampu	Penanggung Jawab	Koordinator
1. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. Kebijakan Internal Manajemen Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
4. Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
5. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
6. Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
9. Kebijakan Internal Audit TIK	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
10. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
11. Arsitektur SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	M. R. SUNENDAR, ST., MT Kepala Bidang Prasarana Wilayah	WIKE DIAN TRIYONIDA, SE Sub Koordinator Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Indikator	OPD Pengampu	Penanggung Jawab	Koordinator
12. Peta Rencana SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CHRIS MAYA RINELDA, ST., M.KP Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	YUNITA ISLAMIAH, SE., M.S.A Sub Koordinator Sub Substansi Data dan Informasi
13. Keterpaduan Rencana dan Anggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CHRIS MAYA RINELDA, ST., M.KP Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	DADANG NURDYANTO, SE., M.SE Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan
14. Inovasi Proses Bisnis	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	YULIANTO HIDAYANA, SSTP, MPSP Sub Koordinator Sub Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
15. Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	R. WITCAKSONO S.P., S.Si., M.Eng. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	NURIYAH JAUHAR KAMILAH B, S.Kom Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government
16. Layanan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	R. WITCAKSONO S.P., S.Si., M.Eng. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	ELOK SRI WAHYUNI, S.Kom. Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK
17. Layanan Jaringan Intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	R. WITCAKSONO S.P., S.Si., M.Eng. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	ELOK SRI WAHYUNI, S.Kom. Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK
18. Penggunaan Sistem Penghubung	Dinas Komunikasi dan Informatika	R. WITCAKSONO S.P., S.Si., M.Eng. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	NURIYAH JAUHAR KAMILAH B, S.Kom Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government
19. Tim Koordinasi SPBE	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
20. Kolaborasi Penerapan SPBE	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
21. Manajemen Risiko	Inspektorat	EKO PRASETYO, SE. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	MOH. GIRI SANTOSO, S.Pt., MM. Auditor Muda
22. Manajemen Keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	ISAWAN NANANG R., S.Hut., M.Si Kepala Bidang Statistik dan Persandian	DANY HARDYANTO, S. Kom Sub Koordinator Sub Substansi Persandian
23. Manajemen Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	ISAWAN NANANG R., S.Hut., M.Si Kepala Bidang Statistik dan Persandian	RISSA ELERINA MEYASARI, S.E., M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Statistik Sektor
24. Manajemen Aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DWI ARIYANI, S.Si., M.Si Kepala Bidang Aset	DHENY WIDIYASTITI, SE., M.KP Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Sistem Informasi
25. Kompetensi SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MOHAMAD ROFIK, S.Sos., M.KP Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	YANUAR PRISTYAWAN W., S.Kom.MKP. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional dan Sosio Kultural

Indikator	OPD Pengampu	Penanggung Jawab	Koordinator
26. Manajemen Pengetahuan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
27. Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
28. Manajemen Layanan SPBE	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
29. Audit Infrastruktur	Inspektorat	AGUNG HARIADI, ST., MM. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan	TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST. Auditor Muda
30. Audit Aplikasi	Inspektorat	AGUNG HARIADI, ST., MM. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan	TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST. Auditor Muda
31. Audit Keamanan	Inspektorat	AGUNG HARIADI, ST., MM. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan	TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST. Auditor Muda
32. Layanan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	CHRIS MAYA RINELDA, ST., M.KP Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	YUNITA ISLAMIAH, SE., M.S.A Sub Koordinator Sub Substansi Data dan Informasi
33. Layanan Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ENI SULISTIYORINI, SE Kepala Bidang Anggaran	ENY PUDJI MULJOWATI, SE., M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan
34. Layanan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SUPARYONO, SE., M.M Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	SULUH AGUS HENDRAWAN, SE., M.A. Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
35. Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JOKO MURCOYO, ST., M.Si. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	M. ARIF CAHYO SAPUTRO, S.Fil., MM Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
36. Layanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M.KP Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUGIANTO, S. Sos Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
37. Layanan Kearsipan Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	UMMI SALAMAH, S.E., M.M Kepala Bidang Kearsipan	SUTARJI, S.Sos Sub Koordinator Sub Substansi Manajemen Kearsipan
38. Layanan Pengelolaan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DWI ARIYANI, S.Si., M.Si Kepala Bidang Aset	DHENY WIDIYASTITI, SE., M.KP Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Sistem Informasi

Indikator	OPD Pengampu	Penanggung Jawab	Koordinator
39. Layanan Pengawasan Internal	Inspektorat	AGUNG HARIADI, ST., MM. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan	TAUFIK AKBAR SOLIKIN, ST. Auditor Muda
40. Layanan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	YULIANTO HIDAYANA, SSTP, MPSSp Sub Koordinator Sub Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
41. Layanan Kinerja Pegawai	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. Kepala Bagian Organisasi	JARIYAH, S.IP. Sub Koordinator Sub Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
42. Layanan Pengaduan	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIES YUSWANTONO, S.S., M.Si Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik	WAHYUDI SUDARSONO, S.S Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik
43. Layanan Data Terbuka	Dinas Komunikasi dan Informatika	ISAWAN NANANG R., S.Hut., M.Si Kepala Bidang Statistik dan Persandian	RISSA ELERINA MEYTASARI, S.E., M.Si Sub Koordinator Sub Substansi Statistik Sektoral
44. Layanan JDIIH	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	ABDUL MADJID N., SH., M.Si. Kepala Bagian Hukum	INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH Sub Koordinator Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum
45. Layanan Publik Sektor 1 / Layanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	AGUS NURBADE ESTI W., S.T Koordinator Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi	UMI MU'ALIFAH, SIP., M.E. Sub Koordinator Sub Substansi Sistem Informasi
46. Layanan Publik Sektor 2 / Layanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	MOHAMAD MUKHLIS FAUZI, SE. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
47. Layanan Publik Sektor 3 / Layanan Administrasi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	EVY SETYORINI, S.S. Kepala Bidang Pembangunan Desa	ANDRI HERLAMBAH, S.E. Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Kerja Sama Desa



Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jombang mengampu 8 (delapan) indikator SPBE, yaitu :

1. Indikator 15 : Pembangunan Aplikasi SPBE
2. Indikator 16 : Layanan Pusat Data
3. Indikator 17 : Layanan Jaringan Intra
4. Indikator 18 : Penggunaan Sistem Penghubung
5. Indikator 22 : Manajemen Keamanan
6. Indikator 23 : Manajemen Data
7. Indikator 42 : Layanan Pengaduan
8. Indikator 43 : Layanan Data Terbuka

Review progress difokuskan pada:

1. Review Progres Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

- a. Perencanaan & Tata Kelola Aplikasi
- b. Pengembangan Aplikasi
- c. Integrasi & Interoperabilitas
- d. Pengelolaan Data & Keamanan
- e. Operasional & Pemeliharaan

2. Review Progres Kematangan Layanan Pusat Data

- a. Fokus pada proses yang terdokumentasi dan diukur
- b. *Automate where possible* untuk mengurangi risiko manusia
- c. Integrasikan dengan framework lain
- d. Review maturity (kematangan) bukan sekali saja — lakukan secara periodik

3. Review progres Kematangan Jaringan Intra

- a. Instalasi perangkat jaringan utama (router, switch, access point) telah selesai
- b. Konfigurasi IP addressing dan VLAN dasar sudah diterapkan
- c. Konektivitas antar divisi/departemen sudah berfungsi
- d. Akses ke server internal dan layanan intranet berjalan normal
- e. Optimalisasi bandwidth dan manajemen trafik masih dalam tahap penyempurnaan

4. Review Pogres Kematangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Memperkuat regulasi dan peran *data owner* serta *service owner*

- b. Menetapkan SPLP sebagai **satu-satunya kanal integrasi resmi**
- c. Meningkatkan kapasitas SDM (arsitektur, API, keamanan)
- d. Memperluas integrasi layanan prioritas berdampak tinggi
- e. Mengukur kematangan berbasis outcome layanan publik, bukan hanya aspek teknis

5. Review Progres Manajemen Keamanan

- a. kebijakan keamanan seperti (1) memiliki tim pelaksana teknis manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, (2) Melakukan sosialisasi internal keamanan informasi (online maupun offline)
- b. prosedur operasional seperti menjalankan keamanan informasi berupa perubahan password minimal 3 bulan sekali
- c. laporan hasil manajemen risiko berupa pengelolaan risiko keamanan informasi, serta mekanisme pemantauan dan penanganan insiden keamanan informasi.

6. Review Progres Manajemen Data

Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data, meliputi : pemenuhan data prioritas/data OPD, metadata dan rekomendasi statistik dalam portal Satu Data Kabupaten Jombang (SAMBANG)

7. Review Progress Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan melalui penilaian dari ketersediaan sistem pengaduan berbasis elektronik, integrasi layanan pengaduan dengan perangkat daerah terkait, mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta pemantauan penyelesaian pengaduan melalui kanal SP4N-LAPOR!

8. Review Progress Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka meliputi beberapa aspek yang telah dilaksanakan yaitu ketersediaan portal data terbuka pada sambang.jombangkab.go.id, jumlah dan keberagaman data yang dipublikasikan secara terpusat, kelengkapan metadata, serta frekuensi pemutakhiran data oleh perangkat daerah.

Penegasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE Tahun 2025

- 1. Konsistensi pengelolaan indikator;

2. Keberlanjutan dan upaya peningkatan pencapaian kematangan indikator untuk mencapai sangat baik;
3. Penetapan capaian indikator Tahun 2025 dengan pendekatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kondisi Pelaksanaan Monev SPBE Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kabupaten Jombang tidak mengikuti tahapan pemantauan SPBE yang meliputi sosialisasi, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen oleh asesor eksternal Kementerian PANRB. Dengan tidak dilaksanakannya tahapan tersebut, maka tidak tersedia hasil penilaian resmi yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan peningkatan atau penurunan nilai indikator SPBE Tahun 2025.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pelaporan kinerja SPBE Tahun 2025 adalah penyetaraan capaian dengan Tahun N-1 (carry forward), yaitu menggunakan hasil evaluasi SPBE terakhir yang telah dinilai dan divalidasi secara resmi sebagai dasar capaian tahun berjalan.

Hasil Evaluasi SPBE TAHUN 2023-2024

Nama Form	SPBE 2023	SPBE 2024
Tahun	2023	2024
Deskripsi	SPBE 2023	SPBE 2024

Pemerintah Kab. Jombang

K/L/D

Indeks SPBE	3,49	3,91
Predikat SPBE	Baik	Sangat Baik

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	4,20	3,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,20	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	3,30	4,10
Perencanaan Strategis SPBE	3,50	4,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50	3,50
Penyelenggara SPBE	4,50	5,00
Domain Manajemen SPBE	2,82	3,36

Penerapan Manajemen SPBE	2,75	3,50
Audit TIK	3,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3,63	4,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83	4,00

Rekap Tingkat Kematangan

No	Indikator	2023	2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	5
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	4

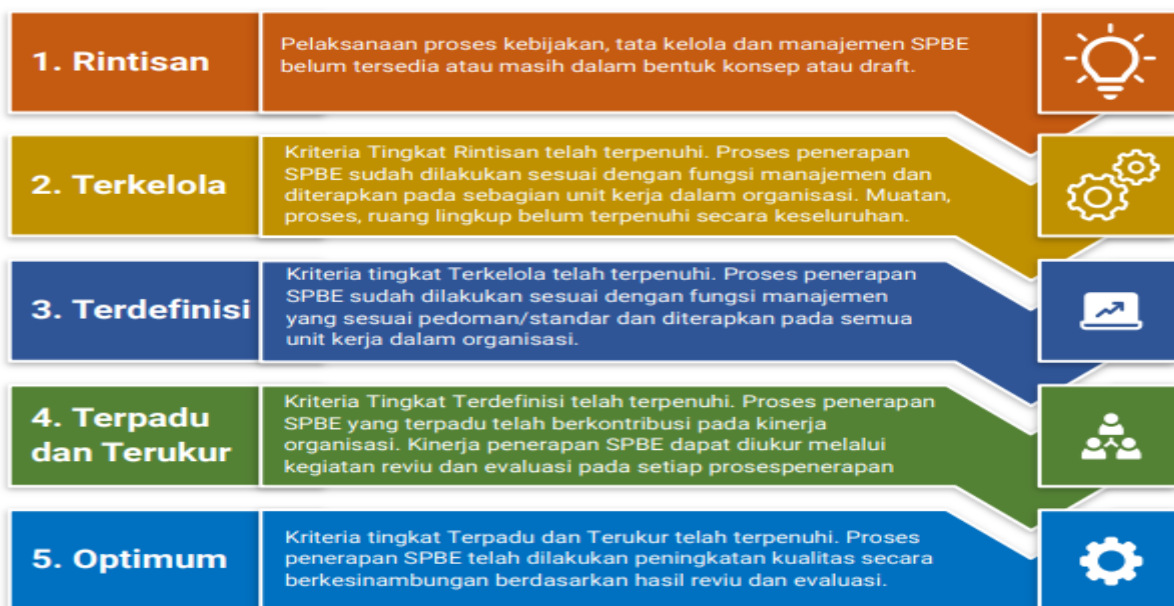
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4	5
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	4
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4

35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5	5

No.	Indikator	2023	2024
1	Indikator yang dapat nilai 1	1	0
2	Indikator yang dapat nilai 2	9	6
3	Indikator yang dapat nilai 3	13	12
4	Indikator yang dapat nilai 4	14	12
5	Indikator yang dapat nilai 5	10	17
J U M L A H		47	47

Tingkat kematangan mencakup kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Kapabilitas proses mengukur kemampuan organisasi dalam suatu proses, digunakan untuk menilai

tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur melalui 5 (lima) tingkatan, yang terdiri dari rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum. Rincian pola pengukuran tingkat kematangan kapabilitas proses implementasi SPBE sebagai berikut :



Gambar 4. Kriteria Tingkat Kematangan Proses

Evaluasi Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan melibatkan penilaian kemampuan kapabilitas teknis suatu layanan. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan juga menjadi dasar untuk mengukur tingkat kematangan layanan SPBE, termasuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan Kapabilitas Layanan diukur melalui 5 (lima) tingkatan, yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Rincian kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan sebagai berikut :



5. Capaian Indikator SPBE Dinas Komunikasi Dan Informatika

5.1 Capaian Umum

Secara umum, indikator SPBE yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap indikator mengalami kenaikan pada Tahun 2025 ditetapkan sama dengan capaian Tahun N-1, baik dari sisi nilai indikator maupun dari sisi persentase pemenuhan indikator dengan nilai minimal 4. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian pada Tahun 2025 karena tidak adanya proses penilaian nasional SPBE terhadap Kabupaten Jombang.

Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi data kinerja, menghindari bias penilaian internal yang tidak tervalidasi, serta memastikan akuntabilitas pelaporan kinerja SPBE.

5.2 Capaian per Indikator

Indikator 15

Capaian indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE pada Tahun 2025 disamakan dengan capaian Tahun N-1. Dokumen pengembangan aplikasi sesuai peta rencana dan arsitektur SPBE juga berita acara pengembangan aplikasi antara OPD pemilik aplikasi dan Dinas Kominfo yang dalam hal ini bidang aptika selalu pengembangan

aplikasi diinginkan.

Indikator 16

Capaian indikator 16 Layanan Pusat Data tetap sama dengan hasil evaluasi sebelumnya, hal ini karena indikator ini sudah memperoleh nilai maksimal yaitu 5 pada evaluasi SPBE tahun 2024.

Indikator 17

Nilai indikator 17 Layanan Jaringan Intra pada Tahun 2025 disamakan dengan nilai Tahun N-1, karena pada indikator ini sudah memperoleh nilai 4, dengan pemenuhan indikator yang tetap dan berkelanjutan.

Indikator 18

Pelaksanaan indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Capaian indikator Tahun 2025 disamakan dengan capaian tahun n-1 yaitu nilai 3.

Indikator 22

Pelaksanaan indikator 22 Manajemen Keamanan pada Tahun 2025 disamakan dengan nilai tahun n-1, dengan nilai yaitu 5. Secara teknis, penilaian manajemen keamanan SPBE mencakup beberapa aspek utama, yaitu kebijakan keamanan informasi, penerapan prosedur operasional keamanan, pengelolaan risiko keamanan informasi, serta mekanisme pemantauan dan penanganan insiden keamanan informasi.

Indikator 23

Pelaksanaan indikator Manajemen Data pada Tahun 2025 disamakan dengan nilai tahun n-1, dengan nilai maksimal yaitu 5. Manajemen Data jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memiliki kenaikan 2 poin yaitu tahun 2023 nilainya 3 sedangkan tahun 2025 nilainya telah maksimal 5. Secara teknis manajemen data meliputi tata kelola data, standar data, pengelolaan metadata, integrasi dan interoperabilitas data antar sistem informasi yang sudah terintegrasi pada sambang.jombangkab.go.id, serta pemanfaatan data dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Pengelolaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh perangkat daerah memiliki kualitas yang baik, konsisten, serta dapat digunakan secara bersama oleh berbagai sistem informasi pemerintah.

Indikator 42

Pelaksanaan indikator 42 Layanan Pengaduan pada tahun 2025 disamakan dengan nilai tahun n-1 yaitu dengan nilai 4. Secara teknis layanan pengaduan tidak memiliki kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 4. Secara teknis, indikator layanan pengaduan menilai beberapa komponen utama, antara lain ketersediaan sistem pengaduan berbasis elektronik, integrasi layanan pengaduan dengan perangkat daerah terkait, mekanisme pengelolaan dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta pemantauan penyelesaian pengaduan melalui satu kanal pengaduan pada SP4N-LAPOR!

Indikator 43

Pelaksanaan Indikator 43 Layanan Data Terbuka pada tahun 2025 disamakan dengan nilai tahun n-1, yaitu dengan nilai 2. Secara teknis nilai layanan data terbuka tidak memiliki kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 2.

6. Persentase Pemenuhan Indikator dengan Nilai Minimal 3

Sejalan dengan penyetaraan capaian indikator Tahun 2025, persentase pemenuhan indikator SPBE dengan nilai 2 diharapkan menjadi nilai minimal 3. Indikator yang masih mendapatkan nilai 2 yaitu :

- a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika)
- b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan (Bagian Organisasi)
- c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (Bagian Organisasi)
- d. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE (Bagian Organisasi)
- e. Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat)
- f. Tingkat kematangan Layanan Data Terbuka (Dinas Komunikasi dan Informatika)

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil review dan dengan mempertimbangkan surat resmi Kementerian PANRB sebagai konsideran, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator SPBE yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat tetap dan berkelanjutan, dengan pendekatan penyetaraan capaian terhadap Tahun N-1. Capaian ini digunakan sebagai baseline strategis untuk penguatan kebijakan, penyempurnaan dokumen tata kelola, data dukung serta peningkatan kualitas implementasi SPBE dalam rangka kesiapan menghadapi pelaksanaan Monev SPBE pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Jombang memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,91 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai indeks SPBE Kabupaten Jombang menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022 nilai indeks SPBE berada pada angka 2,96, kemudian meningkat menjadi 3,49 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 3,91 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah, Indikator Indeks Layanan Digital, Target : 9.4%, Realisasi 9.4%, dengan capaian 100%

Layanan digital yang interoperabel adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan atau sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah interoperabel, layanan digital harus dibangun sesuai standart (data, autentifikasi, teknologi) dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

Jumlah OPD yang memiliki layanan digital sebanyak 53 Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Perhitungan Indeks Layanan Digital :

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki layanan digital yang interoperabel x 100%

Jumlah OPD yang memiliki layanan digital

Realisasi Indeks Layanan Digital

5 = 9.4% (Capaian 100% dari target)

53

Target 2024 :1.9 % (1 OPD)

Realisasi Tahun 2024 : yaitu BKPSDM (SIAP-ASN)

Target 2025 : 9,4% (5 OPD)

Realisasi 2025 : 9,4% (5 OPD)

Tahun 2025 layanan digital pemerintah daerah yang sudah mampu terhubung dan bertukar data secara otomatis antara lain :

1. BKPSDM – SIAP ASN

BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit Kerja, Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan administrasi pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

2. DISNAKER - TALENTA

Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA), menyediakan data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten Jombang (Nama Perusahaan, No Ijin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data pelatihan untuk Masyarakat.

3. PUPR – LAYANAN PUPR

PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti data aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang dialiri), penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.

4. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV

Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan pelaksanaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah . sistem ini

memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

5. DPMPD – SABDOPALON

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah layanan publik yang dari proses layanannya mampu menyediakan data penduduk kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai standar data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Indeks Layanan Digital. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebesar 9,4 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Layanan Digital juga mencapai 9,4 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Indikator 1 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Target : 100%, Realisasi : 100%, Capaian : 100%

Pada Tahun 2025 Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Kabupaten Jombang menduduki urutan ke-4 dari 39 instansi se-Jawa Timur dengan total jumlah aduan 1967, dengan topik aduan meliputi Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Infrastruktur Jalan. Tentunya Keterlibatan unsur Perangkat Daerah dalam Pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
Fungsi komunikasi dan informasi publik Admin pengelola aplikasi
2. Inspektorat
Menangani pengaduan berkadar pengawasan Menjamin akuntabilitas dan tindak lanjut
3. Bagian Organisasi

Evaluasi sistem pelayanan Perbaikan tata laksana Kejelasan pembagian peran dan mekanisme koordinasi menjadi kunci efektivitas penanganan pengaduan.



Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR!
Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Nama Instansi	Jumlah Aduan (update per 26 Januari 2025)	Persentase Tindak Lanjut (update per 26 Januari 2025)	Topik Aduan
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	6034	100%	Pendidikan dan Kebudayaan; Hak Pekerja; Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Pemerintah Kota Malang	4225	100%	Tindak Pidana; Perhubungan; Pendidikan; Pekerjaan
3	Pemerintah Kabupaten Gresik	2248	100%	Jalan Berulang; Pipa; Daerah; Gangguan Layanan; Penyulutan
4	Pemerintah Kabupaten Lumbang	1967	99%	Kesehatan; Perlindungan dan Pemukiman; Infrastruktur Jalan
5	Pemerintah Kota Probolinggo	1684	100%	Pencemaran Lingkungan; Parkir Liar; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6	Pemerintah Kabupaten Tuban	1510	100%	Penerangan Jalan; Jalan Berulang; Infrastruktur Jalan
7	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1334	100%	Bantuan Sosial; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur Jalan
8	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	1227	99%	Parwisata; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pemerintah Kabupaten Lamongan	1051	100%	Infrastruktur Jalan; Pungutan Liar; KTP (Kartu Tanda Penduduk)
10	Pemerintah Kabupaten Bojonegara	696	99%	Jalan Berulang; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Infrastruktur Jalan
11	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	653	100%	Infrastruktur Jalan; Bantuan Sosial; Sarana Prasarana; Perumahan
12	Pemerintah Kota Mojokerto	564	100%	Penerangan Jalan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Ketertiban Umum
13	Pemerintah Kabupaten Kediri	443	98%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Bantuan Sosial; Infrastruktur Jalan
14	Pemerintah Kota Blitar	441	100%	Perhubungan; Pendidikan Dasar dan Menengah; Bantuan Sosial; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
15	Pemerintah Kabupaten Malang	381	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendidikan Dasar dan Menengah; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
16	Pemerintah Kabupaten Blitar	315	100%	Jalan Berulang; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kesehatan
17	Pemerintah Kabupaten Lumajang	272	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pekerjaan dan Penataan Ruang
18	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	266	99%	Perjudian online; Konten Pornografi; Penerangan Jalan
19	Pemerintah Kabupaten Bojonegara	254	98%	Infrastruktur Jalan; Beasiswa; Pendidikan Tinggi
20	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	224	98%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
21	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	212	100%	Kepegawaian; Jalan Berulang; Pendidikan Dasar dan Menengah
22	Pemerintah Kota Pasuruan	153	100%	Perhubungan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perumahan; Pekerjaan
23	Pemerintah Kota Kediri	125	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penerangan
24	Pemerintah Kota Surabaya	117	100%	Jalan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Jalan Berulang; Pekerjaan
25	Pemerintah Kabupaten Magetan	106	100%	Tenaga Kesehatan atau Instansi Kesehatan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Daerah Tertinggal
26	Pemerintah Kabupaten Jember	106	91%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur Jalan; Jalan Berulang; Pendidikan dan Pelatihan
27	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	92	96%	Infrastruktur Jalan; Perhubungan; Drainase; Borong-Gorona (Parti)
28	Pemerintah Kabupaten Situbondo	83	100%	Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; Pertanian; Bangunan; Barang; Jasa
29	Pemerintah Kota Madiun	79	100%	Ketertiban Umum; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Perhubungan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	67	100%	Infrastruktur Jalan; Kepegawaian; Pekerjaan Umum dan Perumahan
31	Pemerintah Kabupaten Ngawi	44	100%	Infrastruktur Jalan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemerintahan
32	Pemerintah Kota Batu	40	100%	Infrastruktur Jalan; Ketertiban Umum; Pengalihan Pemukiman
33	Pemerintah Kabupaten Madiun	38	97%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Infrastruktur Jalan; Tenaga Kesehatan atau Ketertiban
34	Pemerintah Kabupaten Pacitan	26	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur Jalan; Ketertiban Umum
35	Pemerintah Kabupaten Sampang	18	100%	Lampu Penerangan Jalan Umum; Jalan Berulang; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Pemerintah Kabupaten Pesisir	14	89%	Pendidikan Dasar dan Menengah; Pendidikan dan Kebudayaan; Infrastruktur Jalan
37	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	118	87%	Penerangan Jalan; Infrastruktur Jalan; Perhubungan
38	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	45	78%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Bantuan Sosial; Kepegawaian
39	Pemerintah Kabupaten Sumenep	78	72%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penanggulangan Bencana; Layanan Ambulans

Dalam peningkatan pengaduan dan tindak lanjutnya di Kabupaten Jombang SP4N-LAPOR! Menjadi salah satu indikator penilaian RB setiap perangkat daerah di Kabupaten Jombang dengan indikator penilaian sbb :

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
2. Kecepatan/Responsif tindak lanjut
3. Memiliki SK Pengelola
4. Kualitas penyelesaian pengaduan
5. Rating penilaian masyarakat

Rekapitulasi penilaian SP4N-LAPOR! Perangkat Daerah sebagai Indikator Penilaian RB Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA OPD	SK SP4N-LAPORI	INDIKATOR PENILAIAN										SKOR TOTAL	KATEGORI
			JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)			
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	1	306	1	0,2	1	306	0	306	1	5	1	5	Sangat Baik
2	RSUD Ploso	1	73	1	1	1	73	0	73	1	5	1	5	Sangat Baik
3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang	1	51	1	1	1	51	0	51	1	5	1	5	Sangat Baik
4	Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	1	41	1	1,6	1	41	0	41	1	5	1	5	Sangat Baik
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang	1	40	1	1,1	1	40	0	40	1	5	1	5	Sangat Baik
6	Sekretariat Daerah	1	33	1	0,3	1	33	0	33	1	5	1	5	Sangat Baik
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	1	32	1	0,5	1	32	0	32	1	5	1	5	Sangat Baik
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	1	31	1	0,9	1	31	0	31	1	5	1	5	Sangat Baik
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang	1	31	1	0,9	1	31	0	31	1	5	1	5	Sangat Baik
10	Inspektorat Kabupaten Jombang	1	29	1	1,9	1	29	0	29	1	5	1	5	Sangat Baik
11	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang	1	27	1	0,1	1	27	0	27	1	5	1	5	Sangat Baik
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	1	27	1	0,2	1	27	0	27	1	5	1	5	Sangat Baik
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	1	22	1	0,3	1	22	0	22	1	5	1	5	Sangat Baik
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	1	20	1	0,8	1	20	0	20	1	5	1	5	Sangat Baik
15	Kecamatan Peterongan	1	19	1	0,6	1	19	0	19	1	5	1	5	Sangat Baik
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang	1	18	1	0,9	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik
17	BKPSDM Kabupaten Jombang	1	18	1	0,7	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik
18	Kecamatan Tembelang	1	18	1	0,7	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang	1	17	1	0	1	17	0	17	1	5	1	5	Sangat Baik
20	Kecamatan Ngoro	1	17	1	0,2	1	17	0	17	1	5	1	5	Sangat Baik

NO	NAMA OPD	SK SP4N-LAPORI	INDIKATOR PENILAIAN										SKOR TOTAL	KATEGORI
			JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)			
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang	1	16	1	1,7	1	16	0	16	1	5	1	5	Sangat Baik
22	RSUD Jombang	1	16	1	0	1	16	0	16	1	5	1	5	Sangat Baik
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang	1	15	1	1	1	15	0	15	1	5	1	5	Sangat Baik
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	1	15	1	0,3	1	15	0	15	1	5	1	5	Sangat Baik
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang	1	39	1	0,1	1	39	0	39	1	3,79	0	4	Baik
26	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang	1	22	1	1,3	1	22	0	22	1	3	0	4	Baik
27	Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang	1	18	1	1,8	1	18	0	18	1	2,5	0	4	Baik
28	Kecamatan Mojowarno	1	17	1	1	1	17	0	17	1	0	0	4	Baik
29	Kecamatan Diwek	1	13	0	0,6	1	13	0	13	1	5	1	4	Baik
30	Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang	1	11	0	1,1	1	11	0	11	1	5	1	4	Baik
31	Kecamatan Plandaan	1	8	0	0,3	1	8	0	8	1	5	1	4	Baik
32	Kecamatan Bareng	1	7	0	0	1	7	0	7	1	5	1	4	Baik
33	Dinas Peternakan Kabupaten Jombang	1	6	0	1	1	6	0	6	1	5	1	4	Baik
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang	1	5	0	0,7	1	5	0	5	1	5	1	4	Baik
35	Kecamatan Kabuh	1	5	0	0	1	5	0	5	1	5	1	4	Baik
36	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang	1	4	0	0,3	1	4	0	4	1	5	1	4	Baik
37	Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang	1	2	0	2,5	1	2	0	2	1	5	1	4	Baik
38	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	1	5	0	0,4	1	5	0	5	1	0	0	3	Cukup Baik
39	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang	1	3	0	0	1	3	0	3	1	0	0	3	Cukup Baik
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang	1	3	0	0	1	3	0	3	1	0	0	3	Cukup Baik
41	Kecamatan Sumobito	1	2	0	2	1	2	0	2	1	0	0	3	Cukup Baik
42	Kecamatan Wonosalam	1	2	0	1	1	2	0	2	1	0	0	3	Cukup Baik
43	Kecamatan Jogoroto	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik
44	Kecamatan Kesamben	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik
45	Kecamatan Kudu	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik
46	Kecamatan Megaluh	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik

NO	NAMA OPD	INDIKATOR PENILAIAN											SKOR TOTAL	KATEGORI
		SK SP4N-LAPOR!	JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)			
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Kecamatan Perak	1	1	0	6	0	1	0	1	1	5	1	3	Cukup Baik
48	Kecamatan Jombang	1	2	0	6,5	0	2	0	2	1	0	0	2	Kurang Baik
49	Kecamatan Ploso	1	2	0	18,5	0	2	0	2	1	0	0	2	Kurang Baik
50	Kecamatan Mojoagung	1	1	0	5	0	1	0	1	1	0	0	2	Kurang Baik
51	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik
52	Kecamatan Gudo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik
53	Kecamatan Nguksan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik

Jombang, 31 Oktober 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang



ENDRO WAHYU/D, S.STP., M.KP.
NIP. 198005281999121001

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan publik secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Workshop Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! pada tanggal 11 Juni 2025 di Ruang Soero dengan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
2. Sosialisasi SP4N-LAPOR! pada tanggal 04 September 2025 di Itebis PGRI Dewantara Jombang dengan peserta dari mahasiswa Itebis PGRI Dewantara Jombang sebanyak 59 orang
3. Cetak Baliho SP4N-LAPOR! di 17 titik di Kabupaten Jombang untuk sosialisasi pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan serta memperkuat implementasi sistem pengaduan yang terintegrasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengelola SP4N-LAPOR!, diharapkan pengelolaan

pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat waktu, dan terkoordinasi, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator 2 : Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat, Target : 100%, Realisasi 100% dan Capaian 100%

Tingkat Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Jombang dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah daerah, serta berbagai layanan publik kepada masyarakat secara luas dan merata. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak, media elektronik, media luar ruang, maupun media digital dan media sosial resmi pemerintah daerah.

Pada tahun pelaporan, target Tingkat Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat ditetapkan sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi, publikasi, serta pengelolaan kanal komunikasi pemerintah daerah, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

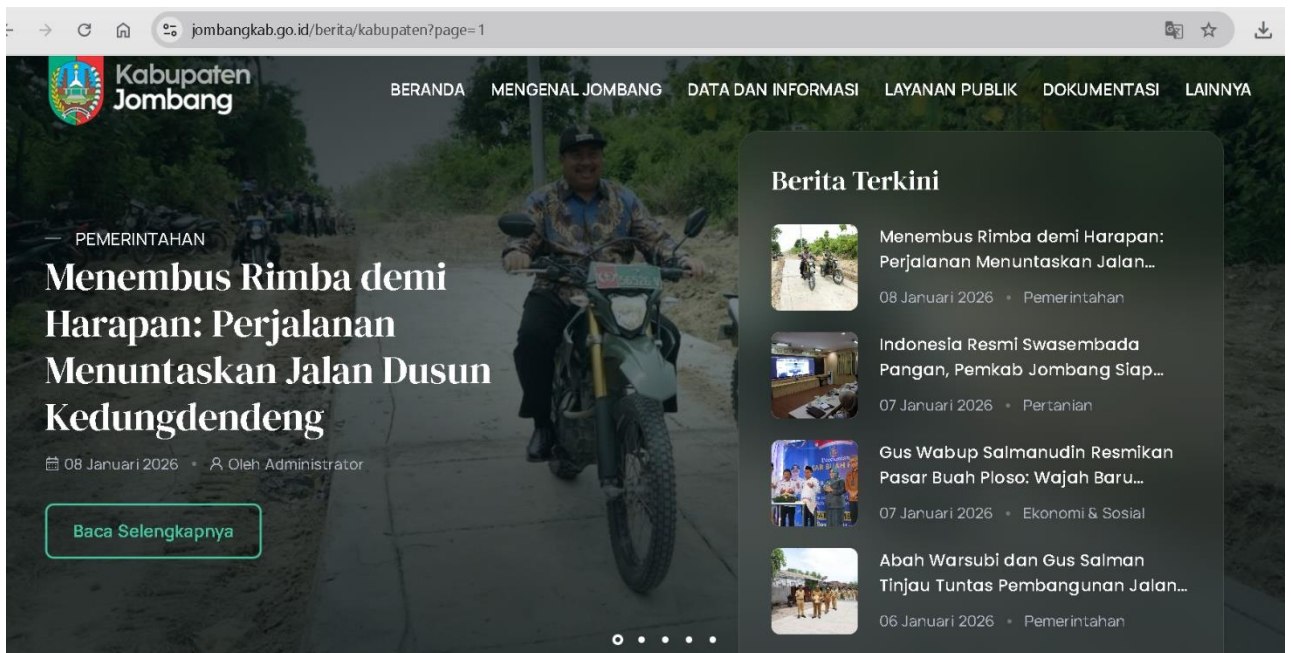
Definisi Operasional :

Jumlah informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang x100%

Jumlah Informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang disebarluaskan

Penyebarluasan Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai 100% Melalui Media sebagai berikut :

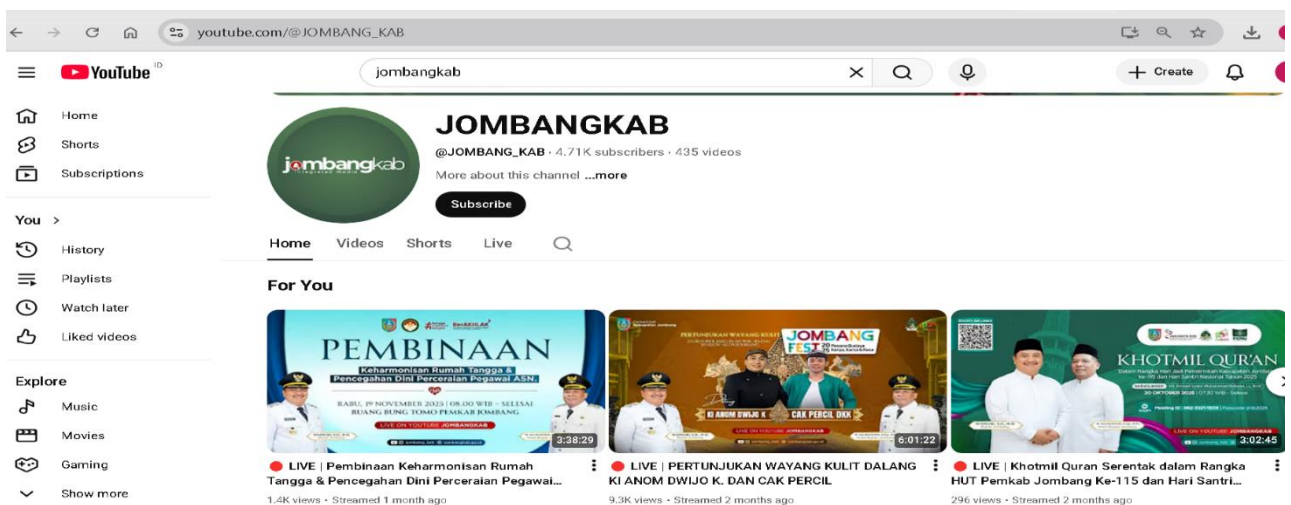
<https://www.jombangkab.go.id/berita/kabupaten>



Perkiraan pengunjung:

- ± 1.602 pengunjung unik per hari (daily unique visitors).
- ± 48.500 kunjungan per bulan (monthly visits).
- ± 8.603 tampilan halaman per hari (daily pageviews).

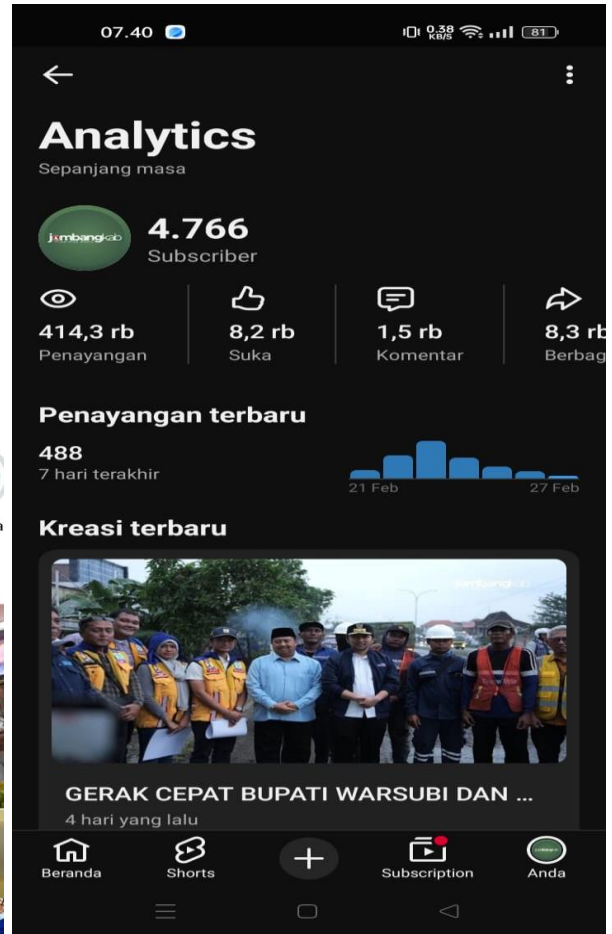
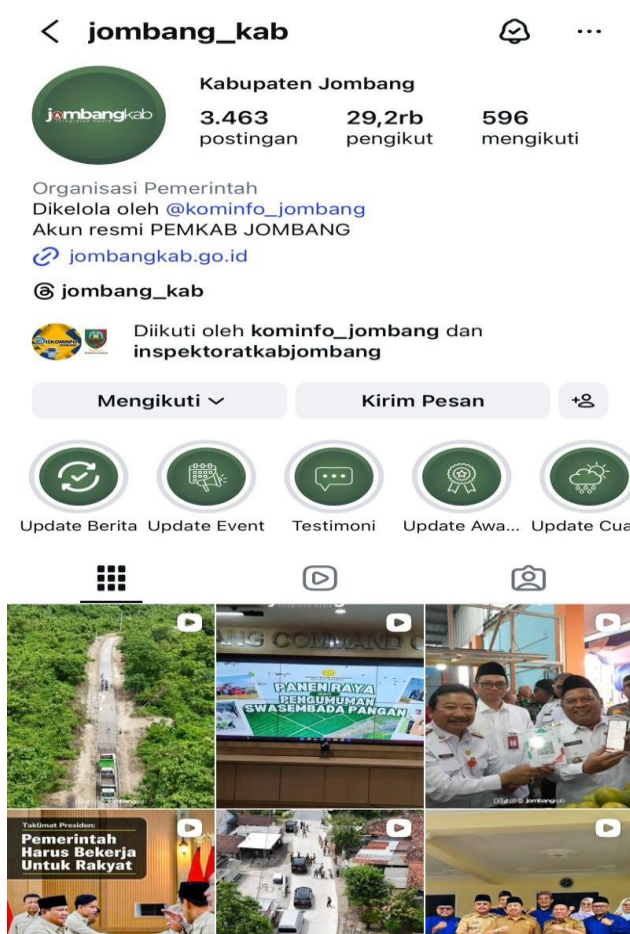
https://www.youtube.com/@JOMBANG_KAB



Jumlah subscriber :4.700

Jumlah video di kanal : 430

https://www.instagram.com/jombang_kab/



Jumlah pengikut : 29.200

Jumlah postingan : 3.463

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi KIM	Komunikasi tatap muka	55 Peserta	55	-
2	Bimtek Media Sosial OPD	Komunikasi tatap muka	130 Peserta	130	-

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Audensi Dengan Media	Komunikasi tatap muka	30 Peserta	30	-
4	Jumpa Fans HUT Radio SJFM dan Hari Pers Nasional	Komunikasi tatap muka	125 Peserta	125	-
5	Sosialisasi Kerjasama/MOU Media dan Tim Verifikasi	Komunikasi tatap muka	63 Peserta	63	-
6	Ngopi Bareng Media dan Pegiat Media Sosial	Komunikasi tatap muka	211 Peserta	211	-
7	Kominfo Goes To School	Komunikasi tatap muka	56 Peserta	56	-
8	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo	Komunikasi tatap muka	60 Peserta	60	-
9	Workshop Pejabat Penghubung Lapror SP4N	Komunikasi tatap muka	68 Peserta	68	-
10	Workshop PPID	Komunikasi tatap muka	68 Peserta	68	-
11	Sosialisasi SP4N LAPOR	Komunikasi tatap muka	59 Peserta	59	-
12	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo	Komunikasi tatap muka	150 Peserta	150	-
13	Workshop Jurnalistik Website Berbasis AI	Komunikasi Tatap Muka	53 Peserta	53	-
14	Sosialisasi Standarisasi Data Sektoral dan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data untuk Perencanaan	Komunikasi Tatap Muka	75 Peserta	75	-

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Daerah				
15	Forum Data dan Sosialisasi Hasil Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2025	Komunikasi Tatap Muka	60 Peserta	60	-
16	Sosialisasi Pengisian Data pada Portal Satu Data Kabupaten Jombang Tahun 2025	Komunikasi Tatap Muka	62 Peserta	62	-
17	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Pemerintah Kabupaten Jombang	Komunikasi Tatap Muka	51 Peserta	51	-
18	Sosialisasi Hasil Asesmen Keamanan Informasi	Komunikasi Tatap Muka	50 Peserta	50	-
19	Jumlah Total Pengunjung website Jombangkab	Media Elektronik	783.584 pengunjung	783.584	-
20	Jumlah total pengunjung website kominfo Jombangkab	Media Elektronik	24.976 pengunjung	24.976	-
21	Jumlah pengunjung youtube	Media Sosial	90.000 pengunjung	90.000	

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	jombangkab TV				
22	Pengikut Instagram @jombangkab	Media Sosial (Instagram)	29,700 pengikut	29,700	-
23	Pengikut Instagram @kominfo_jombang	Media Sosial (Instagram)	5.316 pengikut	5.316	-
24	Subscriber Jombangkab TV	Media Sosial	4.760 subscriber	4.760	-
25	Pendengar Radio SJFM	Media Elektronik Radio	15.300 Orang	15.300	-
Jumlah			960.362	960.362	

Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, aktual, dan terpercaya mengenai kebijakan serta program pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sasaran Strategis Optimalnya data statistik sektoral, Indikator : Indeks Pembangunan Statistik, Target : 2.5, Realisasi : 3.06 dengan Capaian 100%.

Hasil Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2025 adalah:

1. Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan persiapan sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.
2. Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah kabupaten/kota se Jawa Timur.

3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadada Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadada Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akusisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Catatan:

Domain
 Aspek
 Indikator

Hasil Penilaian EPPS per-domain

Domain	Bobot	Self Assessment
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI	28%	2.75
Domain Kualitas Data	24%	3.10
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	3.11
Domain Kelembagaan	17%	3.21
Domain Statistik Nasional	12%	3.44

Domain/Aspek	Bobot ¹	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	2.00
Metadata Statistik	25%	3.00
Interoperabilitas Data	25%	3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3.00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3.00
Akurasi	16%	3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3.50
Aksesibilitas	21%	3.00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3.00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3.33
Pengumpulan Data	26%	3.00
Pemeriksaan Data	21%	3.00
Penyebarluasan Data	21%	3.00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2.75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	4.00
Pengorganisasian Statistik	35%	3.00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3.00

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain

Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	2.00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3.00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3.00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3.00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3.00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3.00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3.00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	4.00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3.00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3.00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3.00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	4.00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3.00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3.00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3.00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3.00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	2.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3.00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	4.00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	4.00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3.00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3.00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	4.00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	4.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	3.00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan

1. Kelengkapan Dokumen Kebijakan Kedua kegiatan telah memiliki dokumen kebijakan yang memuat penjelasan rinci mengenai penerapan berbagai aspek penting pengelolaan statistik, antara lain: Standar Data Statistik (SDS), metadata statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi. Hal ini menunjukkan komitmen awal yang baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang tertib dan terdokumentasi.
2. Ketersediaan Reviu Dokumen untuk Penilaian EPSS Kedua produsen data sudah melampirkan bukti reviu lokus yang mendukung proses penilaian EPSS. Ini menunjukkan upaya untuk melakukan penilaian internal terhadap proses penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Perhatian pada Standarisasi dan Interoperabilitas Adanya kebijakan rinci tentang interoperabilitas data dan kode referensi menjadi dasar yang kuat untuk mendukung integrasi data antar sektor serta peningkatan kualitas data secara berkesinambungan.

Kekurangan

1. Penerapan Standar Data Statistik (SDS) Belum Optimal Meskipun dokumen kebijakan sudah tersedia, dalam praktiknya setiap indikator, variabel, dan konsep yang digunakan belum dilengkapi standar data statistik yang sesuai. Hal ini menjadi catatan penting karena ketiadaan standar dapat mempengaruhi konsistensi, validitas, dan keterbandingan data antar periode

maupun antar wilayah.

2. Belum Ada Reviu Metadata yang Berkala dan Berkelanjutan Proses evaluasi penerapan metadata statistik oleh produsen data belum dilakukan secara rutin oleh pembuat kebijakan. Bukti reviu yang tersedia hanya bersifat lokus dan spesifik untuk penilaian EPSS, bukan hasil reviu periodik yang mencerminkan pemantauan implementasi metadata dalam kegiatan sehari-hari.
3. Reviu Interoperabilitas Data Belum Diterapkan Secara Menyeluruh Sama halnya dengan metadata, proses reviu berkala terhadap penerapan interoperabilitas data belum dilaksanakan. Selain itu, belum disertakan bukti pendukung seperti URL API atau screenshot kode API yang dapat menunjukkan kesiapan teknis integrasi data secara real time atau machinereadable.
4. Reviu Penerapan Kode Referensi Belum Berkelanjutan Evaluasi penerapan kode referensi juga hanya dilakukan pada lingkup penilaian EPSS, belum ada mekanisme pemantauan rutin yang memastikan konsistensi dan keseragaman kode referensi dalam seluruh proses statistik.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan

1. Kelengkapan Dasar Hukum dan Dokumen Pedoman Seluruh tahapan dalam kedua kegiatan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/168/415.10.1.3/2024 tentang Daftar Data Statistik dan Geospasial Kabupaten Jombang 2024, serta dilengkapi dengan KAK, SOP kegiatan, dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor yang disusun oleh Walidata.
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Data Hampir seluruh aspek pada Domain 2 telah diakomodasi, meliputi: relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi, aktualitas, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data, akses media penyebarluasan, ragam format data, keterbandingan, dan konsistensi statistik.
3. Pelaksanaan Rapat Evaluasi pada Beberapa Aspek Untuk indikator aktualitas data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data,

dan konsistensi statistik, telah dilakukan rapat review dan evaluasi serta pembahasan tindak lanjut, yang menunjukkan adanya mekanisme pengendalian mutu pada sebagian komponen.

4. Keterbukaan Akses Data yang dihasilkan telah disebarluaskan melalui berbagai kanal, seperti website OPD, portal Sambang, media sosial, publikasi, dan open data yang dapat diakses publik.
5. Konsistensi dan Keterbandingan Data Informasi yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarwaktu dan antarwilayah, serta konsistensi angka pada berbagai publikasi, yang meningkatkan kepercayaan pengguna data.

Kekurangan Pelaksanaan Kegiatan

1. Minimnya Review dan Evaluasi Berkala Hampir seluruh indikator pada Domain 2 belum memiliki rapat review dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Sebagian evaluasi hanya dilakukan untuk kebutuhan penilaian EPSS, bukan sebagai mekanisme rutin.
2. Review Tindak Lanjut Belum Merata Walaupun beberapa indikator telah dilakukan review dan tindak lanjut, penerapannya belum menyeluruh pada semua aspek, khususnya relevansi data, identifikasi kebutuhan data, akurasi data, ketepatan waktu diseminasi, dan ketersediaan data.
3. Monitoring Implementasi SOP Belum Optimal Meskipun SOP telah disusun dan terdokumentasi, belum terdapat bukti monitoring terstruktur yang menilai sejauh mana SOP tersebut diikuti secara konsisten oleh produsen data.
4. Evaluasi Aspek Kritis Masih Terbatas Beberapa aspek yang krusial seperti relevansi data terhadap pengguna dan identifikasi kebutuhan data belum memiliki forum khusus untuk menampung umpan balik pengguna secara rutin, sehingga potensi penyempurnaan data belum tergalai optimal.

3. Proses Bisnis Statistik

Kelebihan

1. Dokumen kebijakan dan pedoman sudah lengkap Tersedia Buku Pedoman PSS, SOP, KAK, serta Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang menjadi standar acuan bagi seluruh tahapan proses bisnis. Ini menunjukkan adanya komitmen formal dalam pengelolaan statistik.

2. Seluruh tahapan proses bisnis sudah berjalan Mulai dari identifikasi kebutuhan, desain, penyiapan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data telah dilaksanakan, dan ada bukti dukung berupa laporan, dokumentasi, serta aplikasi pengolahan data.
3. Evaluasi dan reviu dilakukan secara berkala Walaupun masih bersifat umum, namun adanya kegiatan evaluasi berkala menunjukkan proses perbaikan terus diupayakan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kekurangan

1. Evaluasi belum detail per aspek/indikator Reviu yang dilakukan masih bersifat umum, sehingga belum mampu mengidentifikasi kelemahan secara spesifik di setiap tahapan proses bisnis.
2. Bukti mutu belum lengkap Uji validitas instrumen, reliabilitas, dokumentasi data cleaning, serta standar kualitas data belum terdokumentasi secara memadai sehingga sulit memastikan kualitas data.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi belum terstruktur Mekanisme untuk menindaklanjuti temuan evaluasi belum jelas dan monitoring kepatuhan OPD/produsen data terhadap pedoman belum terukur dengan indikator kinerja.

4. Proses Kelembagaan

Kelebihan

1. Proses Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh seluruh produsen data dan berdasarkan prosedur baku yaitu mengacu pada Peraturan dari Kementerian Induk
2. Proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data dan diidentifikasi pada OPD lokus. serta sudah ada prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.
3. Proses Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilaksanakan di seluruh produsen data, dimana pada Laporan Akhir kegiatan statistik sektoral data yang dimuat tidak mencantumkan informasi individu. Serta sudah ada prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen

Data.

4. Proses Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Statistik maupun Bidang Manajemen Data telah dilakukan dengan baik dengan dilaksanakan diklat di bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS dan BKPSDM Kabupaten Jombang. Selain itu telah dilaksanakan rapat reviu dan evaluasi secara berkala.
5. Proses Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah diwujudkan dalam dokumen resmi dan ditindaklanjuti melalui kegiatan rapat dan sosialisasi.
6. Penyelenggaraan Forum Satu Data selain tersedia Rencana Aksi SDI juga telah tersedia dokumen monitoring dan evaluasi dari seluruh Rencana Aksi SDI yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan SDI.
7. Proses Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal dibuktikan dengan adanya MOU kerjasama antara Pemkab Jombang dengan BPS Kabupaten Jombang.
8. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan dengan baik dimana tersedia peraturan/dokumen resmi penetapan walidata, tersedia rincian tugas walidata, seluruh tugas/program kerja walidata sudah dilaksanakan.

Kekurangan

Dokumen kebijakan yang memuat Proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum memuat seluruh poin yang terdapat pada Draft Penjelasan Indikator EPSS 2024_Rev1 beserta implementasinya.

5. Proses Statistik Nasional

Kelebihan:

1. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
2. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan

menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.

3. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun Masyarakat luas.
4. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi secara berkala
5. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025.
6. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sektoral

Kekurangan

Walidata telah melakukan penyebaran data melalui portal Satu Data Kabupaten Jombang <https://sambang.jombangkab.go.id/>, namun belum terhubung dengan portal SDI.

Dapat disimpulkan hasil IPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 – Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :

1. Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.
2. Sudah ada pedoman atau SOP resmi.
3. Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.
4. Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing unit.

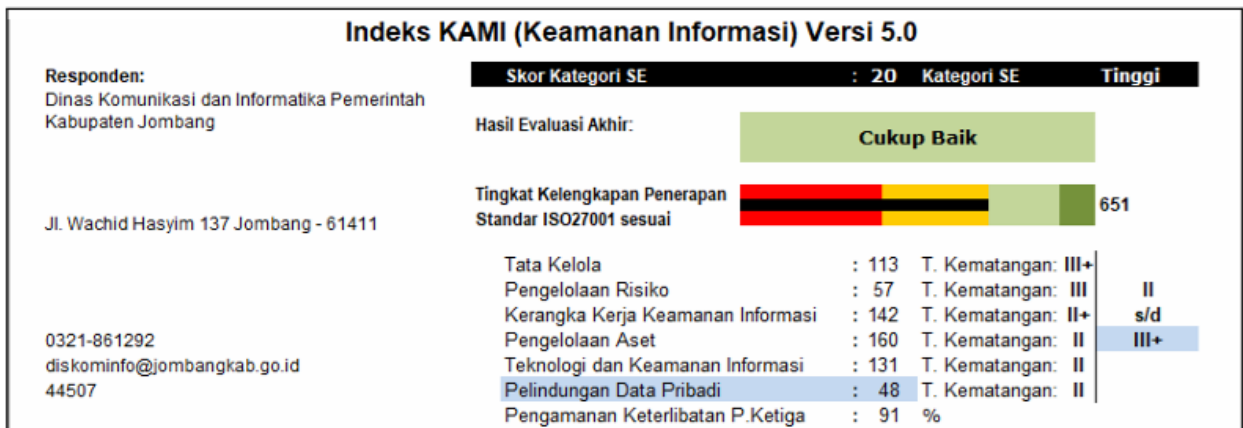
Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Sasaran Strategis Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi, Indikator : Indeks KAMI, Target : 640, Realisasi 651 dengan capaian 101.56%

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

1. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
2. Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
5. Pengelolaan Aset Informasi
6. Teknologi dan Keamanan Informasi
7. Pelindungan Data Pribadi
8. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan)

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses pada Indeks KAMI versi 5.0 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang data pengukuran didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut :



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan tersebut ditunjukkan pada hasil perhitungan Indeks KAMI dengan skor kategori sistem elektronik sebesar 20 yang termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi akhir yang diperoleh, tingkat penerapan keamanan informasi berada pada kategori cukup baik dengan skor 651. Hasil ini menggambarkan bahwa kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sudah memenuhi sebagian besar elemen penting keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Apabila dilihat pada grafik hasil penilaian, kondisi keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Jombang berada pada level warna kuning menuju hijau, yang menandakan posisi keamanan informasi berada pada tingkat cukup baik namun masih memerlukan penguatan di aspek tertentu.

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan	Responden	Skor Maksimal	Persentase
Tata Kelola	113	126	89%
Pengelolaan Risiko	57	72	79%
Kerangka Kerja	142	192	73%
Pengelolaan Aset	160	258	62%
Teknologi	131	186	70%
PDP	48	84	57%

Berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa;

1. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori Cukup Baik.
2. Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2024 dari 612, pada tahun 2025 menjadi 650.
3. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi, pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Target 80.10, Realisasi 85.85 dengan capaian 107.18%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2025 Nomor : 000.8.6/9977/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85 dengan kategori A- predikat Memuaskan dengan Catatan. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	NILAI	
			2024	2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	7.16	8.19
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2.00	1.75
	Rencana Aksi	4%	2.33	3.17
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2.83	3.28
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	72.91	77.66
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41.01	43.29
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31.90	34.36
TOTAL			80.07	85.85

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 perindikator dijelaskan sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi
		2024	2025		
A	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	7.16	8.19	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rekomendasi telah dicantumkan dalam rencana aksi, namun belum terlihat kecukupan secara substansi dimana indikator atas tindak lanjut belum menggambarkan output perubahan yang jelas - Rencana Aksi yang disusun sudah optimal dan terdapat peningkatan kualitas dari tahun sebelumnya, namun sebagian besar indikator rencana aksi hanya berbasis dokumen, belum seluruh indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari rencana aksi yang selaras dengan sasaran dan target indikator RB PD yang ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan kontribusi Agen Perubahan terhadap upaya perubahan pada unit kerja. - Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD. - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB secara berkelanjutan, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi - Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi
		2024	2025		
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang				
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		90.18	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	4.00	5.00		
3	Indeks Penerapan SPBE	99.85	97.67		
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	96.91	89.57		
5	Nilai SAKIP	79.19	76.05	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian c Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	100.00	5.00	Tingkat 5 — Optimum dan Berorientasi Nilai Catatan: Keuasan yang sangat tinggi mencerminkan layanan yang proaktif, adil, responsif, dan stabil pada beban kerja yang meningkat, disertai pengambilan keputusan berbasis data.	Rekomendasi: 1. Menerapkan pemantauan prediktif (peringatan dini lonjakan permohonan), penjadwalan petugas adaptif, dan pengingat masa berlaku dokumen. 2. Melaksanakan riset pengalaman pengguna berkelanjutan (wawancara periodik, uji kegunaan, A/B testing) serta co-design bersama perwakilan pengguna. 3. Memperkuat ketahanan layanan melalui tinjauan pascainsiden, target penurunan MTTR, dan uji ketangguhan (chaos testing) terbatas. 4. Mengoptimalkan efisiensi operasional melalui FinOps/Green IT dengan pengukuran biaya per transaksi tanpa menurunkan CSAT.
7	Tingkat Pembangunan ZI	2.00	3.75	Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai dengan ketentuan.	Terus melakukan penguataan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi
		2024	2025		
					Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal ZI untuk penilaian awal unit kerja yang diusulkan mendapat predikat ZI WBK/WBBM Tahun 2026
8	Maturitas SPIP	3.24	0	Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah	Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5.00	5.00	HASIL KERJA KONSISTEN DAN SANGAT MEMUASKAN	PERTAHANKAN KINERJA YANG SUDAH BAIK
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.53	3.79	Sangat jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	71.13	85.24	Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	92.50	95.00		
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	83.78	95.66	Memuaskan	OK
14	Indeks Pengelolaan Aset	72.72	87.92	Komponen A (Prosesntase Ketepatan Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan) Terdapat ketidaksesuaian antara rencana pengadaan pada RKBMD dengan realisasi belanja BMD Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan) Terdapat beberapa laporan bulanan yang penyampaiannya terlambat Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan Penatausahaan Keuangan)	KOMPONEN A Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD, yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	
		2024	2025			
				Sudah sesuai	berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharannya. KOMPONEN B Laporan pengadaan bulanan wajib dilaporkan kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini merupakan batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik KOMPONEN C Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset telah sesuai dengan data belanja modal.	
II	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	88.33	100.00			Ir
A Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional						
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	100.00	86.67	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai Perencanaan SKP hanya mencapai 6,67 dari 10, Pelaksanaan Kinerja memperoleh nilai 5 dari 10, serta Ketepatan Waktu Penilaian SKP juga	Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan SKP, melengkapi bukti dukung, serta memperbaiki ketepatan waktu penilaian melalui disiplin dan monitoring berkala.	B

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
		2024	2025			
				berada pada nilai 5 dari 10. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan ketepatan waktu penilaian kinerja masih belum optimal dan memerlukan peningkatan konsistensi serta ketelitian dalam penyusunan maupun pelaksanaannya.		
2	Indeks Profesionalitas ASN	87.98	87.36	Kecuali dimensi disiplin, pencapaian maksimal dari nilai semua dimensi masih belum optimal.	Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai, dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN, dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang belum optimal sesuai tingkat jabatan.	BKPSDM
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	2.00	65.80	Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum efektif dalam menanamkan budaya kerja yang telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi.	Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.	Bagian Organisasi
4	Indeks Pelayanan Publik	4.20	4.68	sesuai LHE	sesuai LHE	Bagian Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.11	94.42	untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah	segera melakukan Tindakanlanjutan dari RTL yg ditetapkan	Bagian Organisasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan mencapai kategori A- (Memuaskan dengan Catatan) dengan nilai 85,85. Dalam penilaian Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, nilai tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Jombang pada peringkat ke-4 dari seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi. Urutan pertama yaitu Kecamatan Ngoro dengan nilai 86,47, urutan kedua yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 86,45, Urutan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 86,17, Urutan ke empat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 85,85 dan Urutan kelima yaitu Inspektorat dengan nilai 84,45.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar indikator penilaian pada area perubahan Reformasi Birokrasi dengan hasil melampaui target 72 dengan realisasi 85.85 dengan capaian 119,23%. Reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika menggambarkan bahwa kinerja tata kelola organisasi, akuntabilitas, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan menunjukkan hasil yang positif dibandingkan sebagian besar perangkat daerah lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi yang akan diimplementasi dan ditindaklanjuti pada Tahun 2026.

No	Program	No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76,05	76,05	100
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%	100
		3	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	23%	23%	100

No	Program	No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	3.06	110
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	100	113	110
TOTAL						103.34

Rata-Rata Capaian Program Perubahan Renstra 2025-2029 pada tahun 2025 yaitu 103.34%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Target: 76.05 Realisasi 76.05 dengan capaian 100%

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tanggal 1 Agustus 2025, Nomor : 000.8.6.3/5682/415.10/2025, Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 Pada tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.43	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.19	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.56	18.75
Nilai Hasil Evaluasi			79.19	76.05
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam dokumen pokin belum didapati informasi terkait hubungan kinerja atau crosscutting kinerja lintas Perangkat Daerah yang sudah disusun dengan berfokus pada identifikasi setiap keterlibatan Perangkat Daerah yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral, baik yang bersifat makro maupun yang menjadi isu strategis;
- b. Telah dilakukan analisis sebagai dasar penetapan target kinerja namun tindak lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya belum tergambar dalam analisis/dasar penetapan target dalam KKPT;
- c. Telah dilakukan dialog kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala namun tidak semua pegawai mampu memahami dan peduli karena dalam hasil survey lapangan sebagian pegawai tidak mampu menjelaskan hasil dari pembahasan forum perencanaan kinerja maupun pembahasan evaluasi kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan

rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi dalam penyesuaian strategi/aksi hal ini terlihat dari hasil monev renaksi renaksi tribulan IV seluruh aksi pada dokumen monev renaksi Kepala Perangkat Daerah maupun bawahan telah tercapai 100 %, namun pada dokumen pengukuran kinerja Tribulan IV terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu nilai AKIP, hal ini menunjukkan bahwa terdapat aksi dari bawahan yang tidak mendukung aksi atasan atau aksi bawahan tidak menjadi penyebab tercapainya kinerja atasan;
- b. Pada dokumen Kurja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika belum disajikan terkait dengan anggaran untuk indikator Nilai Evaluasi AKIP, sehingga tidak diketahui efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- c. Dari hasil survei lapangan didapati bahwa sebagian pegawai menganggap bahwa hasil pengukuran kinerja tidak berpengaruh dalam melakukan penyesuaian rencana aksi

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum mengupload LKJIP pada website resmi kominfo.jombangkab.go.id;
- b. Penulisan sub bab pada LKJIP belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan dengan analisis mendalam sehingga tidak diketahui apa factor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya;
- d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan

sumber daya dalam mencapai kinerja, hanya menarasikan isi dari table efisiensi;

- e. Dari hasil survey lapangan didapati bahwa pegawai telah membaca LKJIP namun belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas LKJIP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025 dengan adanya penurunan pada 3 komponen, dan juga kinerja Perangkat Daerah dimana 1 indikator sasaran mengalami penurunan.

Dari hasil evaluasi AKIP yang telah diuraikan diatas, seluruh rekomendasi telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Maka untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP sesuai target maka Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja

Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi serta memastikan indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.

2. Penguatan Cascading Kinerja

Melakukan penyesuaian (cascading) sasaran strategis dari tingkat perangkat daerah hingga ke unit kerja dan individu agar seluruh pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja

Mengoptimalkan sistem pengukuran kinerja melalui pemanfaatan data yang akurat dan valid, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, analitis, dan mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hasil kinerja yang dicapai.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal

Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif apabila terdapat deviasi antara target dan realisasi.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola AKIP

Meningkatkan kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan AKIP melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP diuraikan sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
1	Agar dokumen Pohon Kinerja disusun secara lebih komprehensif dengan memuat penjabaran hubungan kinerja lintas Perangkat Daerah (crosscutting performance), terutama pada sasaran yang bersifat makro dan isu-isu strategis daerah	Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah, yang menggambarkan crosscutting performance terhadap pencapaian sasaran makro dan isu strategis daerah	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pemetaan Lintas Perangkat Daerah (Crosscutting) dengan mengidentifikasi PD yang terlibat	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang memuat penjabaran pohon kinerja lintas	V			V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Perangkat Daerah (crosscutting performance) dijabarkan kedalam penyusunan Renstra 2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa sasaran tersebut penting, PD mana saja yang terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun dan Tantangan dan peluang dalam hubungan kinerja lintas PD)							Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
2	Agar penyusunan target kinerja dalam KKPT (Kertas Kerja Perencanaan Tahunan) tidak hanya berdasarkan analisis kondisi saat ini, namun jugamempertimbangkan tindak lanjut dan pembelajaran dari capaian sertaketidaktercapaian target kinerja tahun sebelumnya	Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap Kinerja Tahun Sebelumnya			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelumnya dalam LKJIP			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penyusunan Target Kinerja dalam KKPT dengan Kolaborasi Antar Bidang dan melibatkan seluruh ASN Dinas Kominfo			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
									plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap tribulan			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
3	Melibatkan seluruh pegawai secara aktif dalam proses perencanaan danevaluasi, tidak hanya pada saat forum, tetapi juga dalam proses tindak lanjut danpenyusunan rencana aksi individu/unit	Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai melalui alur kinerja mulai dari Perencanaan dan Evaluasi			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Melibatkan seluruh ASN dinas kominfo dalam Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Partisipasi Penyusunan Rencana Aksi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
4	Kepala Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi unit kerja di bawahnya telah di-cascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, melalui penyalarsan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala;	Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas Kominfo mengadakan rapat koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa rencana aksi telah dicascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan untuk memantau progres pencapaian rencana aksi dan hasil kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan Menyusun laporan evaluasi kinerja dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
5	Agar menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD pada Kurja Kepala Perangkat	Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo dengan menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD untuk dapat diketahui ada tidaknya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
	Daerah, sehingga dapat diketahui ada tidaknya efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja	efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja							plt. Bidang Statistik dan Persandian
6	Mensosialisasikan kembali siklus manajemen kinerja secara menyeluruh khususnya memastikan hasil pengukuran kinerja dibahas secara terbuka dan dijadikan bahan pertimbangan dalam forum evaluasi dan perencanaan berikutnya, termasuk melibatkan pegawai dalam proses identifikasi tindak lanjut	Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Rapat Evaluasi Internal Tribulan yang bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran kinerja dan dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi perencanaan berikutnya dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Hasil Evaluasi Internal Tribulan ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai. Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan perencanaan kinerja pegawai tribulan berikutnya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
7	Agar mengunggah LKIP pada laman resmi kominfo.jombangkab.go.id	LKIP Tahun 2024 telah diupload di kominfo.jombangkab.go.id pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti Dukung Pelaporan Tindak Lanjut akan dilampirkan pada rencana aksi Tindak Lanjut di Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 diupload di kominfo.jombangkab.go.id pada tribulan I Tahun 2026			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
8	Agar melakukan perbaikan pada laporan LKIP sesuai dengan sistematika pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	LKIP Tahun 2024 telah disusun dan ditindaklanjuti sesuai sistematika Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti dukung LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		Penyusunan LKIP Tahun 2025 disusun sesuai			V				Sekretaris, Kepala Bidang

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tribulan I Tahun 2026							Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
9	Agar melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja	LKIP Tahun 2024 telah dilengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 disusun dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja							
10	Agar menambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja dan dituangkan pada dokumen LKIP	LKIP Tahun 2024 telah ditambahkan penjelasan atau analisa efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKIP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		LKIP Tahun 2025 ditambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber daya mampu mendukung capaian kinerja			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
11	Perlu dilakukan penguatan peran serta pegawai dalam proses penyusunan LKIP melalui mekanisme yang mendorong partisipasi aktif, seperti forum	Sosialisasi internal mengenai pentingnya LKIP dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah bagi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dengan narasumber yang kompeten dibidangnya		V					Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
	internal, workshop evaluasi kinerja, atau pemberian ruang umpan balik secara formal. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja kolaboratif agar								
	seluruh pegawai merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas dokumen LKIP								
		Membentuk Tim Penyusunan LKIP yang melibatkan semua pegawai dan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tim Penyusunan LKIP mempunyai tugas masing-masing yang bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi LKIP secara kolaboratif			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian
		Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses penyusunan, dari segi partisipasi pegawai maupun kualitas dokumen yang dihasilkan.				V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
12	Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis Hasil Evaluasi ini sehingga Tindak Lanjut benar-benar mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat Daerah	Analisis Hasil Evaluasi dengan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian
		Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Bidang Melalui Evaluasi Rapat Tribulan	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian

Hal Besar

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Monitoring tribulan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindak lanjut sesuai dengan jadwal dan target kinerja dapat tercapai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pjt. Bidang Statistik dan Persandian

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Persentase Pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti Target: 100% Realisasi 100% dengan capaian 100%

Pada Tahun 2025 Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Kabupaten Jombang menduduki urutan ke-4 dari 39 instansi se-Jawa Timur dengan total jumlah aduan 1967, dengan topik aduan meliputi Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Infrastruktur Jalan. Tentunya Keterlibatan unsur Perangkat Daerah dalam Pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi melibatkan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika

Fungsi komunikasi dan informasi publik Admin pengelola aplikasi

2. Inspektorat

Menangani pengaduan berkadar pengawasan Menjamin akuntabilitas dan tindak lanjut

3. Bagian Organisasi

Evaluasi sistem pelayanan Perbaikan tata laksana Kejelasan pembagian peran dan mekanisme koordinasi menjadi kunci efektivitas penanganan pengaduan.



Performa Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR! Wilayah Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Nama Instansi	Jumlah Aduan (update per 26 Januari 2025)	Persentase Tindak Lanjut (update per 26 Januari 2025)	Topik Aduan
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	6034	100%	Pendidikan dan Kebudayaan; Hak Pekerja; Pendidikan Dasar dan Menengah
2	Pemerintah Kota Malang	4225	100%	Tindak Pidana; Perhubungan; Pendidikan; Hak Pekerja
3	Pemerintah Kabupaten Gresik	2248	100%	Jalan Berlubang; Pajak Daerah; Gangguan Layanan Penyakutan
4	Pemerintah Kabupaten Jombang	1967	99%	Kesehatan; Pertanian dan Peternakan; Infrastruktur
5	Pemerintah Kota Probolinggo	1884	100%	Pencemaran Lingkungan; Parkir Liar; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6	Pemerintah Kabupaten Tuban	1510	100%	Penerangan Jalan; Jalan Berlubang; Infrastruktur
7	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1374	100%	Bantuan Sosial; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur
8	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	1227	99%	Parwisata; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pemerintah Kabupaten Lamongan	1051	100%	Infrastruktur Jalan; Pungutan Liar; KIP; Kartu Tanda Penduduk
10	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	698	98%	Jalan Berlubang; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Infrastruktur
11	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	653	100%	Infrastruktur Jalan; Bantuan Sosial; Sarana Prasarana
12	Pemerintah Kota Mojokerto	564	100%	Penerangan Jalan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
13	Pemerintah Kabupaten Kediri	443	99%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Bantuan Sosial; Infrastruktur
14	Pemerintah Kota Blitar	441	100%	Perhubungan; Pendidikan Dasar dan Menengah; Bantuan Sosial; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
15	Pemerintah Kabupaten Malang	381	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendidikan Dasar dan Menengah; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
16	Pemerintah Kabupaten Bitar	315	100%	Jalan Berlubang; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kesehatan
17	Pemerintah Kabupaten Lumajang	272	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pekerjaan dan Penataan Ruang
18	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	266	99%	Penjualan online; Konten Pornografi; Penerangan Jalan
19	Pemerintah Kabupaten Bojonegara	254	98%	Infrastruktur Jalan; Bessiswa; Pendidikan Tinggi
20	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	224	98%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
21	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	212	100%	Kepengawasan; Jalan Berlubang; Pendidikan Dasar dan Menengah
22	Pemerintah Kota Pasuruan	153	100%	Perhubungan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Permukiman; Bekerja
23	Pemerintah Kota Kediri	125	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penerangan Jalan
24	Pemerintah Kota Surabaya	117	100%	Jalan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Jalan Berlubang; Bekerja
25	Pemerintah Kabupaten Magetan	108	100%	Tenaga Kesehatan atau Instansi Kesehatan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
26	Pemerintah Kabupaten Jember	106	91%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur Jalan; Jalan Berlubang; Pendidikan dan Kebudayaan
27	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	92	98%	Infrastruktur Jalan; Perhubungan; Drainase; Borong-Sorong (Panti)
28	Pemerintah Kabupaten Situbondo	83	100%	Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; Pertanian; Pengada Barang/Layanan
29	Pemerintah Kota Madiun	79	100%	Ketertiban Umum; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Perhubungan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	67	100%	Infrastruktur Jalan; Kepegawaian; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Pemerintah Kabupaten Ngawi	44	100%	Infrastruktur Jalan; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemerintah
32	Pemerintah Kota Batu	40	100%	Infrastruktur Jalan; Ketertiban Umum; Pengada Barang/Layanan
33	Pemerintah Kabupaten Madiun	38	97%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Infrastruktur Jalan; Tenaga Kesehatan atau Kesehatan
34	Pemerintah Kabupaten Pacitan	26	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Infrastruktur Jalan; Kebukahan
35	Pemerintah Kabupaten Sampang	19	100%	Lainnya; Penerangan Jalan Umum; Jalan Berlubang; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
36	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	374	89%	Pendidikan Dasar dan Menengah; Pendidikan dan Kebudayaan; Infrastruktur
37	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	118	87%	Penerangan Jalan; Infrastruktur Jalan; Perhubungan
38	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	45	78%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Bantuan Sosial; Kepegawaian
39	Pemerintah Kabupaten Sumenep	76	72%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Penganggaran Rencana Layanan dan Perhubungan

Dalam peningkatan pengaduan dan tindak lanjutnya di Kabupaten Jombang SP4N-LAPOR! Menjadi salah satu indikator penilaian RB setiap perangkat daerah di Kabupaten Jombang dengan indikator penilaian sbb :

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
2. Kecepatan/Responsif tindak lanjut;
3. Memiliki SK Pengelola;
4. Kualitas penyelesaian pengaduan;
5. Rating penilaian masyarakat

Rekapitulasi penilaian SP4N-LAPOR! Perangkat Daerah sebagai Indikator Penilaian RB Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA OPD	SK SP4N-LAPORI	INDIKATOR PENILAIAN											SKOR TOTAL	KATEGORI
			JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)				
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang	1	306	1	0,2	1	306	0	306	1	5	1	5	Sangat Baik	
2	RSUD Ploso	1	73	1	1	1	73	0	73	1	5	1	5	Sangat Baik	
3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang	1	51	1	1	1	51	0	51	1	5	1	5	Sangat Baik	
4	Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	1	41	1	1,6	1	41	0	41	1	5	1	5	Sangat Baik	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang	1	40	1	1,1	1	40	0	40	1	5	1	5	Sangat Baik	
6	Sekretariat Daerah	1	33	1	0,3	1	33	0	33	1	5	1	5	Sangat Baik	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	1	32	1	0,5	1	32	0	32	1	5	1	5	Sangat Baik	
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	1	31	1	0,9	1	31	0	31	1	5	1	5	Sangat Baik	
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang	1	31	1	0,9	1	31	0	31	1	5	1	5	Sangat Baik	
10	Inspektorat Kabupaten Jombang	1	29	1	1,9	1	29	0	29	1	5	1	5	Sangat Baik	
11	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang	1	27	1	0,1	1	27	0	27	1	5	1	5	Sangat Baik	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang	1	27	1	0,2	1	27	0	27	1	5	1	5	Sangat Baik	
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	1	22	1	0,3	1	22	0	22	1	5	1	5	Sangat Baik	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	1	20	1	0,8	1	20	0	20	1	5	1	5	Sangat Baik	
15	Kecamatan Peterongan	1	19	1	0,6	1	19	0	19	1	5	1	5	Sangat Baik	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang	1	18	1	0,9	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik	
17	BKPSDM Kabupaten Jombang	1	18	1	0,7	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik	
18	Kecamatan Tembelang	1	18	1	0,7	1	18	0	18	1	5	1	5	Sangat Baik	
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang	1	17	1	0	1	17	0	17	1	5	1	5	Sangat Baik	
20	Kecamatan Ngoro	1	17	1	0,2	1	17	0	17	1	5	1	5	Sangat Baik	

NO	NAMA OPD	SK SP4N-LAPORI	INDIKATOR PENILAIAN											SKOR TOTAL	KATEGORI
			JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)				
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang	1	16	1	1,7	1	16	0	16	1	5	1	5	Sangat Baik	
22	RSUD Jombang	1	16	1	0	1	16	0	16	1	5	1	5	Sangat Baik	
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang	1	15	1	1	1	15	0	15	1	5	1	5	Sangat Baik	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	1	15	1	0,3	1	15	0	15	1	5	1	5	Sangat Baik	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang	1	39	1	0,1	1	39	0	39	1	3,79	0	4	Baik	
26	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang	1	22	1	1,3	1	22	0	22	1	3	0	4	Baik	
27	Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang	1	18	1	1,8	1	18	0	18	1	2,5	0	4	Baik	
28	Kecamatan Mojowarno	1	17	1	1	1	17	0	17	1	0	0	4	Baik	
29	Kecamatan Diwek	1	13	0	0,6	1	13	0	13	1	5	1	4	Baik	
30	Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang	1	11	0	1,1	1	11	0	11	1	5	1	4	Baik	
31	Kecamatan Plandaan	1	8	0	0,3	1	8	0	8	1	5	1	4	Baik	
32	Kecamatan Bareng	1	7	0	0	1	7	0	7	1	5	1	4	Baik	
33	Dinas Peternakan Kabupaten Jombang	1	6	0	1	1	6	0	6	1	5	1	4	Baik	
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang	1	5	0	0,7	1	5	0	5	1	5	1	4	Baik	
35	Kecamatan Kabuh	1	5	0	0	1	5	0	5	1	5	1	4	Baik	
36	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang	1	4	0	0,3	1	4	0	4	1	5	1	4	Baik	
37	Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang	1	2	0	2,5	1	2	0	2	1	5	1	4	Baik	
38	Dinas Sosial Kabupaten Jombang	1	5	0	0,4	1	5	0	5	1	0	0	3	Cukup Baik	
39	Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Jombang	1	3	0	0	1	3	0	3	1	0	0	3	Cukup Baik	
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang	1	3	0	0	1	3	0	3	1	0	0	3	Cukup Baik	
41	Kecamatan Sumobito	1	2	0	2	1	2	0	2	1	0	0	3	Cukup Baik	
42	Kecamatan Wonosalam	1	2	0	1	1	2	0	2	1	0	0	3	Cukup Baik	
43	Kecamatan Jogoroto	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik	
44	Kecamatan Kesamben	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik	
45	Kecamatan Kudu	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik	
46	Kecamatan Megaluh	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	Cukup Baik	

NO	NAMA OPD	INDIKATOR PENILAIAN											SKOR TOTAL	KATEGORI
		SK SP4N-LAPOR!	JUMLAH ADUAN		RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL)		KUALITAS TINDAK LANJUT ADUAN				RATA-RATA HASIL PENILAIAN (RHP)			
			Σ ADUAN	NILAI BOBOT	KECEPATAN TINDAK LANJUT (HARI)	NILAI BOBOT	Σ ADUAN	JAWABAN NORMATIF	JAWABAN SUBTANSI	NILAI BOBOT	RATING BINTANG	NILAI BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Kecamatan Perak	1	1	0	6	0	1	0	1	1	5	1	3	Cukup Baik
48	Kecamatan Jombang	1	2	0	6,5	0	2	0	2	1	0	0	2	Kurang Baik
49	Kecamatan Ploso	1	2	0	18,5	0	2	0	2	1	0	0	2	Kurang Baik
50	Kecamatan Mojoagung	1	1	0	5	0	1	0	1	1	0	0	2	Kurang Baik
51	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik
52	Kecamatan Gudo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik
53	Kecamatan Ngunikan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Kurang Baik

Jombang, 31 Oktober 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang



ENDRO WAHYU D., S.STP., M.KP.
NIP. 198005281999121001

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan publik secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Workshop Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! pada tanggal 11 Juni 2025 di Ruang Soero dengan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
- b. Sosialisasi SP4N-LAPOR! pada tanggal 04 September 2025 di Itebis PGRI Dewantara Jombang dengan peserta dari mahasiswa Itebis PGRI Dewantara Jombang sebanyak 59 orang;
- c. Cetak Baliho SP4N-LAPOR! di 17 titik di Kabupaten Jombang untuk sosialisasi pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan serta memperkuat implementasi sistem pengaduan yang terintegrasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengelola SP4N-LAPOR!, diharapkan pengelolaan

pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat waktu, dan terkoordinasi, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator 2 : Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu, Target 100%, Realisasi 100% Capaian 100%

Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa banyak informasi publik yang diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini selain penyebarluasan informasi juga untuk pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan konten, pelayanan informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, kegiatan peliputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian, penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan media pendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Formulasi perhitungannya:

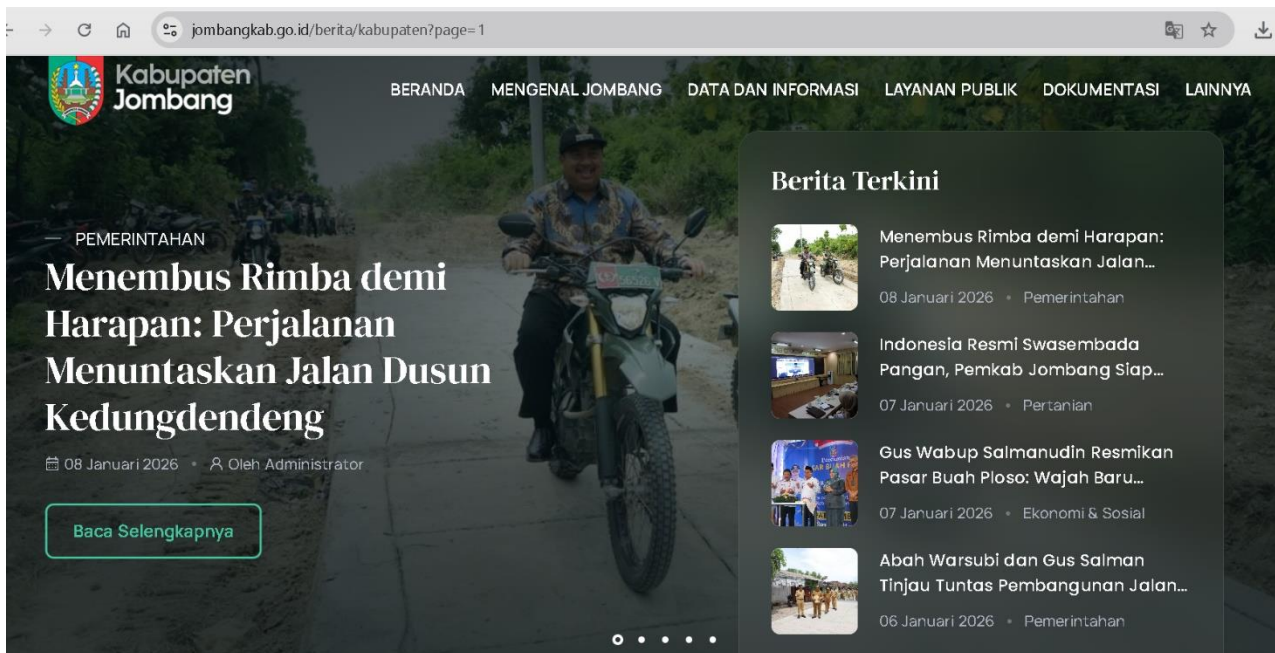
Jumlah informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu
(melalui media pemkab Jombang)

_____ x 100%

Jumlah informasi publik yang ada (kegiatan pemkab Jombang)

Penjelasan:

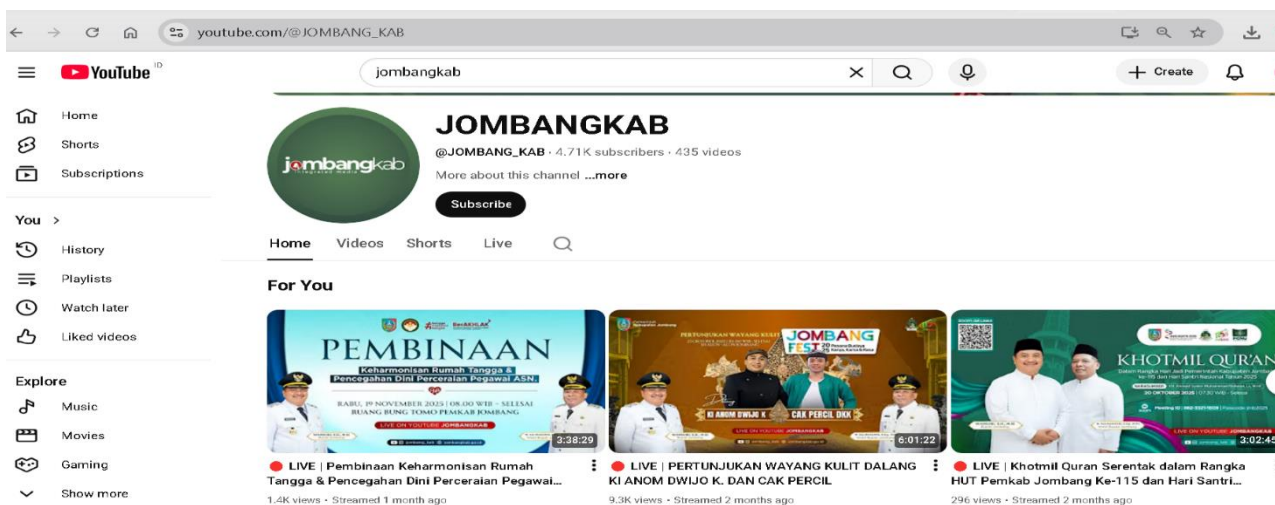
- Jumlah informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu → informasi yang diumumkan sesuai jadwal atau batas waktu yang ditentukan melalui media Pemkab Jombang seperti media cetak, media sosial, media elektronik dan media tatap muka.
- Jumlah informasi publik yang ada → seluruh informasi kegiatan Pemkab Jombang yang wajib disebarluaskan kepada masyarakat.



Perkiraan pengunjung:

- ± 1.602 pengunjung unik per hari (daily unique visitors).
- ± 48.500 kunjungan per bulan (monthly visits).
- ± 8.603 tampilan halaman per hari (daily pageviews).

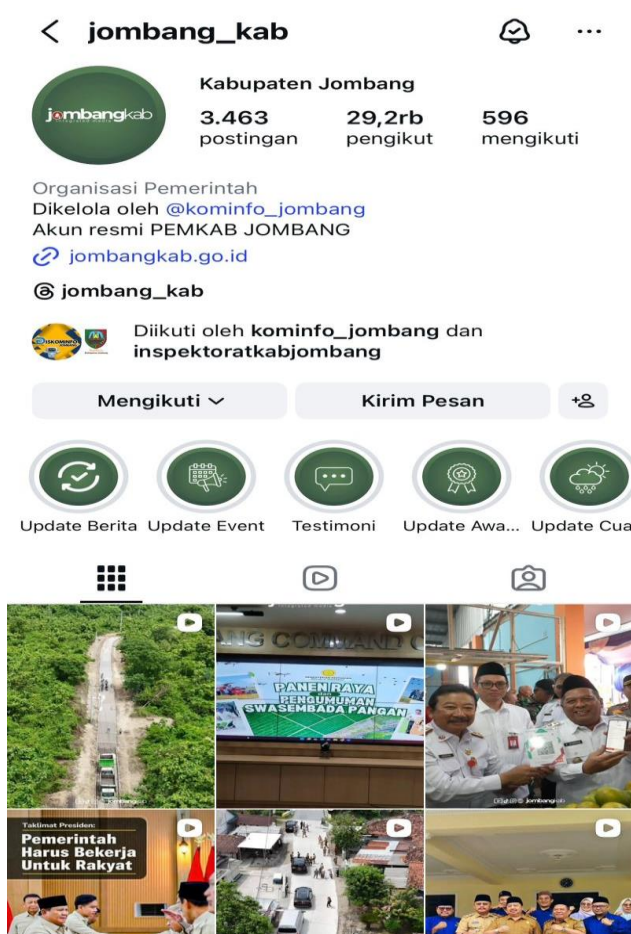
https://www.youtube.com/@JOMBANG_KAB



Jumlah subscriber :4.700

Jumlah video di kanal : 430

https://www.instagram.com/jombang_kab/



Jumlah pengikut : 29.200
 Jumlah postingan : 3.463

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi KIM	Komunikasi tatap muka	55 Peserta	55	-

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Bimtek Media Sosial OPD	Komunikasi tatap muka	130 Peserta	130	-
3	Audensi Dengan Media	Komunikasi tatap muka	30 Peserta	30	-
4	Jumpa Fans HUT Radio SJFM dan Hari Pers Nasional	Komunikasi tatap muka	125 Peserta	125	-
5	Sosialisasi Kerjasama/MOU Media dan Tim Verifikasi	Komunikasi tatap muka	63 Peserta	63	-
6	Ngopi Bareng Media dan Pegiat Media Sosial	Komunikasi tatap muka	211 Peserta	211	-
7	Kominfo Goes To School	Komunikasi tatap muka	56 Peserta	56	-
8	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo	Komunikasi tatap muka	60 Peserta	60	-
9	Workshop Pejabat Penghubung Lapor SP4N	Komunikasi tatap muka	68 Peserta	68	-
10	Workshop PPID	Komunikasi tatap muka	68 Peserta	68	-
11	Sosialisasi SP4N LAPOR	Komunikasi tatap muka	59 Peserta	59	-
12	Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo	Komunikasi tatap muka	150 Peserta	150	-
13	Workshop Jurnalistik Website Berbasis AI	Komunikasi Tatap Muka	53 Peserta	53	-
14	Sosialisasi Standarisasi Data Sektoral dan Optimalisasi Peningkatan	Komunikasi Tatap Muka	75 Peserta	75	-

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kualitas Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah				
15	Forum Data dan Sosialisasi Hasil Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2025	Komunikasi Tatap Muka	60 Peserta	60	-
16	Sosialisasi Pengisian Data pada Portal Satu Data Kabupaten Jombang Tahun 2025	Komunikasi Tatap Muka	62 Peserta	62	-
17	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Pemerintah Kabupaten Jombang	Komunikasi Tatap Muka	51 Peserta	51	-
18	Sosialisasi Hasil Asesmen Keamanan Informasi	Komunikasi Tatap Muka	50 Peserta	50	-
19	Jumlah Total Pengunjung website Jombangkab	Media Elektronik	783.584 pengunjung	783.584	-
20	Jumlah total pengunjung website kominfo Jombangkab	Media Elektronik	24.976 pengunjung	24.976	-

No	Progran Orioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Media yang Digunakan		Jumlah Penduduk 15 s.d 64 Tahun yang Memperoleh Informasi	Keterangan
		Jenis	Jumlah Penerima Informasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Jumlah pengunjung youtube jombangkab TV	Media Sosial	90.000 pengunjung	90.000	
22	Pengikut Instagram @jombangkab	Media Sosial (Instagram)	29,700 pengikut	29,700	-
23	Pengikut Instagram @koinfo_jombang	Media Sosial (Instagram)	5.316 pengikut	5.316	-
24	Subscriber Jombangkab TV	Media Sosial	4.760 subscriber	4.760	-
25	Pendengar Radio SJFM	Media Elektronik Radio	15.300 Orang	15.300	-
Jumlah			960.362	960.362	

Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, aktual, dan terpercaya mengenai kebijakan serta program pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator : Tingkat Keterpaduan Layanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Target : 23%, Realisasi 23% dengan Capaian 100%

Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik merupakan Layanan digital yang interoperabel adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan atau sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah interoperabel, layanan digital harus dibangun sesuai standart (data, autentifikasi, teknologi) dan aturan

yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo. Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik ini sebagai pengembangannya terhubung dengan sso.jombangkab.go.id dan aplikasinya sudah mampu terhubung dan bertukar data secara otomatis.

Terdapat 53 Perangkat Daerah yang menjadi rancangan tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang akan dibangun dari tahun 2025 sampai dengan 2030 dengan rincian ditampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel Matriks Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Tahun						Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik								
a. Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan	Layanan	4	3	3	0	0	0	10
		40%	70%	100%	100%	100%	100%	
b. Tingkat keterpaduan layanan administrasi layanan publik	Layanan	1	4	4	5	22	7	43
		2%	12%	21%	33%	84%	100%	
JUMLAH		5	7	7	5	22	7	53
		9%	23%	36%	45%	87%	100%	

Realisasi Layanan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. BKPSDM – SIAP ASN

BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit Kerja, Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan administrasi pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

2. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV

Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan pelaksanaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah . sistem ini

memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

3. DPMPD – SABDOPALON

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah layanan publik yang dari proses layanannya mampu menyediakan data penduduk kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai standar data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

Realisasi Layanan Publik Tahun 2025 sebagai berikut :

1. DISNAKER - TALENTA

Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA), menyediakan data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten Jombang (Nama Perusahaan, No Ijin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data pelatihan untuk Masyarakat.

2. PUPR – LAYANAN PUPR

PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti data aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang dialiri), penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian layanan pemerintahan dan layanan publik telah tercapai 100%.

Jika terdapat perbandingan Indeks Layanan Digital 9,4% sedangkan indikator Tingkat Keterpaduan Layanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Target : 23%, dikarenakan program dan sub kegiatan mengacu pada target ditahun 2026. Hal ini dikarenakan perubahan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 dimana seluruh nama sub kegiatan berubah di Tahun 2026 sedangkan pada PK Perubahan harus dilakukan perubahan mengacu Renstra 2025-2029 beserta targetnya.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator : Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Target : 2.5 Realisasi : 3.06 Capaian 100%

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah Penilaian terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPPS merupakan instrument penilaian indikator dalam Indeks Pembangunan Statistik sebagai pengukuran kapasitas dan kualitas sistem statistik secara nasional.

Hasil EPPS pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Badan Pembangunan Statistik Pusat, namun tahun 2025 dilakukan penilaian oleh BPS

Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2025 adalah:

- Kegiatan EPSS yang tidak dilaksanakan tahun 2025 maka perlu dilakukan persiapan sebagai strategi dan mitigasi risiko pelaksanaan EPSS kedepan.
- Untuk meningkatkan pemahaman tim penilai baik di provinsi dan kabupaten/kota terkait dokumen-dokumen bukti dukung pada indikator-indikator di Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mendatang di masing-masing wilayah kabupaten/kota se Jawa Timur.
- Sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan/maturitas indikator-indikator pada seluruh domain dengan mengadopsi metodologi penilaian EPSS.

Oleh karena itu hasil realisasi tahun 2025 mengacu pada hasil BPS Provinsi Jawa Timur yaitu 3,06 dengan capaian realisasi yaitu 122.40. Sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2026 akan mengacu pada BPS Pusat.

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akusisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Catatan:

■ Domain ■ Aspek ■ Indikator

Hasil Penilaian EPPS per-domain

Domain	Bobot	Self Assessment
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI	28%	2.75
Domain Kualitas Data	24%	3.10
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	3.11
Domain Kelembagaan	17%	3.21
Domain Statistik Nasional	12%	3.44

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	2.00
Metadata Statistik	25%	3.00
Interoperabilitas Data	25%	3.00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3.00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3.00
Akurasi	16%	3.00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3.50
Aksesibilitas	21%	3.00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3.00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3.33
Pengumpulan Data	26%	3.00
Pemeriksaan Data	21%	3.00
Penyebarluasan Data	21%	3.00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2.75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	4.00
Pengorganisasian Statistik	35%	3.00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3.33
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	4.00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3.00

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain

Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	2.00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3.00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3.00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3.00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3.00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3.00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3.00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	4.00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3.00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3.00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3.00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	4.00
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3.00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3.00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3.00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3.00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3.00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3.00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	2.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3.00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3.00

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ₁	Tingkat Kematangan _n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3.00	
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	4.00	
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	4.00	
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3.00	
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3.00	
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3.00	
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3.00	
	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	3.00
			Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3.00
			Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	4.00
Pengelolaan Kegiatan Statistik		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	4.00	

Dapat disimpulkan hasil IPS tahun 2025 yaitu pada level Penjelasan Level 3 – Terdefinisi yaitu Pada level ini, proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah diselaraskan (diharmonisasi) sehingga tidak ada lagi perbedaan cara kerja antar unit. Setelah proses tersebut diselaraskan, unit yang memiliki fungsi manajemen menetapkan standar, pedoman, atau SOP resmi yang mengatur bagaimana kegiatan statistik sektoral harus dilaksanakan. Standar atau pedoman tersebut kemudian berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi, sehingga setiap unit wajib mengikuti aturan yang sama dalam mengelola, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data statistik sektoral. Pada Pemerintah Kabupaten Jombang artinya :

- 1) Proses kerja sudah jelas dan terdokumentasi.
- 2) Sudah ada pedoman atau SOP resmi.
- 3) Semua unit kerja menggunakan standar yang sama.
- 4) Tidak ada lagi proses yang dilakukan secara berbeda-beda oleh masing-masing unit.

Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral dalam organisasi sudah memiliki standar proses yang baku dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Indikator : Nilai Tata Kelola Indeks KAMI, Target : 100, Realisasi : 113, Capaian 110%

Penilaian Indeks KAMI yang menggunakan tools penilaian indeks KAMI Versi 5.0 mencakup 8 kriteria pengukuran. Kriteria Area pengukurannya mencakup hal berikut :

1. **Kategori Sistem Elektronik:** Pada Kategori ini untuk mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan;
2. **Tata Kelola Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan bentuk Tata Kelola Keamanan Informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi;
3. **Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi;
4. **Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya;
5. **Pengelolaan Aset Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut;
6. **Teknologi dan Keamanan Informasi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam

pengamanan aset informasi;

7. **Pelindungan Data Pribadi:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penerapan 189ontrol keamanan terkait Pelindungan Data Pribadi (PDP)
8. **Suplemen:** Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penerapan mekanisme keamanan terkait risiko keterlibatan pihak ketiga eksternal dalam Operasional penyelenggaraan pelayanan instansi

Persentase Tingkat Keamanan Informasi

Keterangan	Responden	Skor Maksimal	Persentase
Tata Kelola	113	126	89%
Pengelolaan Risiko	57	72	79%
Kerangka Kerja	142	192	73%
Pengelolaan Aset	160	258	62%
Teknologi	131	186	70%
PDP	48	84	57%

Persentase tertinggi yaitu sebesar 89% dari Area Tata Kelola yang memperoleh nilai tertinggi menunjukkan tingkat kematangan yang mendekati pemenuhan standar SNI ISO/IEC 27001:2022.

Hasil analisis Area Tata Kelola Informasi berdasarkan kuesioner Indeks KAMI sebagai berikut :

Tabel 4.2 Status penerapan area tata kelola keamanan informasi


Status Penerapan	Tingkat Kematangan				Total
	II	III	IV	V	
Tidak Dilakukan	0	0	0	0	0
Dalam Perencanaan	0	0	0	0	0
Dalam Penerapan/ Penerapan Sebagian	1	1	3	0	5
Penerapan Menyeluruh	12	2	3	0	17
Total	13	3	6	0	22

Total pertanyaan di Area Tata Kelola Keamanan Informasi terdapat 22 pertanyaan terdiri dari 13 pertanyaan pada tingkat kematangan II, tiga pertanyaan pada tingkat kematangan III, dan enam pertanyaan pada tingkat kematangan IV. Pada tingkat kematangan II diketahui bahwa terdapat 12 pertanyaan yang sudah diterapkan secara menyeluruh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan terdapat satu yang masih diterapkan sebagian. Pada tingkat kematangan III, terdapat dua penerapan menyeluruh dan satu yang masih diterapkan sebagian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pada tingkat kematangan IV, terdapat tiga pertanyaan yang sudah diterapkan secara menyeluruh dan tiga pertanyaan yang masih diterapkan sebagian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

Skor Area Tata Kelola Keamanan Informasi

Keterangan	Skor
Tingkat Kematangan II	52
Tingkat Kematangan III	16
Tingkat Kematangan IV	45
Total	113

Hasil realisasi yaitu 113 dari target 100 dengan capaian 110%. Dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Keamanan Informasi pada tahun 2025 telah tercapai dari target yang telah



ditetapkan. Area Tata Kelola Keamanan Informasi kondisi saat ini Pengontrolan keamanan informasi sudah diterapkan sebagian besar dan sudah ada kebijakan/prosedur terkait untuk meningkatkan kinerja area tata kelola keamanan informasi perlu dilaksanakan pemantauan terkait kepatuhan pegawai internal maupun pemasok terhadap keberjalanan keamanan informasi.

1.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2024 dan 2023, diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

(Renstra 2018-2023)

Sasaran Strategis - Program	Indikat or Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84,5	n/a	n/a	87,32	n/a	n/a
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,53	n/a	n/a	3,45	n/a	n/a
Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2,63	n/a	n/a	2,63	n/a	n/a
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	80 (A/Memuaskan)	n/a	n/a	80.13	n/a	n/a
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a

Sasaran Strategis - Program	Indikator or Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Kabupaten/Kota	n Administrasi Pemerintahan						
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	63 (sedang)	n/a	n/a	66.50	n/a	n/a
	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	84,5 (baik)	n/a	n/a	87.32 (baik)	n/a	n/a
Program Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	n/a	n/a	Level 2	n/a	n/a
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (8 Indikator)	8 indikator terkelola	n/a	n/a	8 indikator terkelola	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan	Persentase data	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a

Sasaran Strategis - Program	Indikator or Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)
Statistik Sektora	Sektoral yang dipublikasikan						
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3.53 (baik)	n/a	n/a	3.45 (baik)	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	n/a	n/a	100%	n/a	n/a

Keterangan

Terdapat perubahan Renstra 2018-2023 menjadi RPD 2024-2026 sehingga terdapat perubahan dokumen pada Target Sasaran Strategis, Program beserta Indikator Kinerja, sehingga Tahun 2023 mengacu pada Renstra 2018-2023 dan Tahun 2024 mengacu pada RPD 2024-2026. Berdasarkan hasil tersebut maka target dan realisasi antara tahun 2023-2025 tidak bisa disandingkan dikarenakan perubahan indikator.

(RPD 2024-2026)

NO	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Sasaran Strategis – Meningkatkan Kemampuan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I- PIKP)	n/a	66 (sedang)	67 (sedang)	n/a	67.17 (sedang)	68.55 (sedang)
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan	n/a	Level 3	Level 3	n/a	Level 3	Level 3

NO	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Komunikasi (I-KTIK)						
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	n/a	2.75 (terkelola)	2.88 (terkelola)	n/a	2.75 (terkelola)	2.88 (terkelola)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	2.2 (terkelola)	2.5 (terkelola)	n/a	2.26 (terkelola)	3.05
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	n/a	290	620 (tinggi)	n/a	612	650
		Nilai Evaluasi AKIP PD	n/a	80.05	80.10	n/a	79.19	76.05
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	100%	n/a	100%	100%
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah OPD yang telah memiliki layanan informasi	n/a	10%	10%	n/a	10%	10%
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang berbasis elektronik	n/a	100%	100%	n/a	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Sektor yang dipublikasikan	n/a	100%	100%	n/a	100%	100%
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi Strategis yang Berfungsi dengan Baik	n/a	50%	55%	n/a	50%	55%

Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun N (2025)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun N (2025)
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	n/a	n/a	4.10	n/a	n/a	n/a
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	n/a	n/a	9.4%	n/a	n/a	9.4%
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	n/a	n/a	2,5	n/a	n/a	3,06
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	n/a	n/a	640	n/a	n/a	651
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	80,10	n/a	n/a	85.85
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	n/a	n/a	76.05	n/a	n/a	76,05
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun N (2025)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun N (2025)
Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	n/a	n/a	23%	n/a	n/a	23%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	n/a	n/a	2.5	n/a	n/a	3.06
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	n/a	n/a	100	n/a	n/a	113

Keterangan

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun 2023, berdasarkan Renstra 2018-2023, Tahun 2024 berdasarkan RPD 2024-2026 dan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.

Seluruh indikator pada Tahun 2025 telah tercapai realisasinya 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPD (2024-2026) dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 merupakan tahun kedua, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

(RPD 2024-2026)

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Sasaran Strategis – Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I- PIKP)	201 (sedang)	134,55 (sedang)	66,94%
	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	9 Level	6 Level	66,66%
	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	8,57 (terkelola)	2,75	65,69%
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	7,5 (terkelola)	2,2	70%
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	885 (tinggi)	1.263	142,71%
	Nilai Evaluasi AKIP PD	240,20 (A)	155,24 (BB)	64,62%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300%	200%	66,66%
Program Pengelolaan Informasi dan	Persentase Perangkat Daerah OPD	30%	20%	66,66%

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Komunikasi Publik	yang telah memiliki layanan informasi			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang berbasis elektronik	300%	200%	66,66%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	300%	200%	66,66%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi Strategis yang Berfungsi dengan Baik	165%	105%	63,64%
TOTAL CAPAIAN				69,72%

Pada tahun 2025, realisasi terhadap Target RPJMD menunjukkan capaian sebesar 69,72% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2024–2026, terdapat beberapa indikator yang mendekati target akhir, namun sebagian lainnya masih memerlukan akselerasi. Pada Nilai Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 tidak mencapai target dari yang ditargetkan 80,05 dengan realisasi 76,05 dengan capaian hanya 95%. Untuk meningkatkan nilai SAKIP ditahun berikutnya maka dibutuhkan langkah-langkah evaluasi yaitu :

1. Melaksanakan Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja;
2. Melaksanakan Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Capaian program PIKP hingga 2025 telah mencapai 66,94% dari target Renstra 2024–2026.

Untuk meningkatkan hasil PIKP pada tahun ke-3 (akhir renstra), maka terdapat beberapa usulan program bagi peningkatan kinerja PIKP ke depan. Usulan program yang dimaksud untuk tahun depan sebaiknya lebih mengarah dan difokuskan pada perbaikan dimensi output dimensi outcome, dengan dukungan dimensi input, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi
 - a. Arah dari kegiatan pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari literature review dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik.
 - b. Arah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi internal secara mingguan dan bulanan untuk mengumpulkan segala jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi publik. Output berupa informasi publik kemudian disampaikan dalam suatu bentuk komunikasi publik. Penugasan pengumpulan data dan informasi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa tema, dimana setiap tema akan menghasilkan satu output informasi publik.
 - c. Strategi utama yang diusulkan kajian ini untuk memperbaiki pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah pembuatan dokumen metadata Laporan Akhir Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP) Tahun 2025 (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik. Sebaiknya Bidang HKP membentuk tim

kecil atau tim khusus beranggotakan beberapa personil yang salah satu Jobdesk utamanya adalah menyusun dokumen metadata bahan informasi publik.

- d. Pengumpulan data dan informasi berikutnya adalah mengumpulkan pendapat umum yang dapat dilakukan melalui model polling, dengan tahapan:
- Mengidentifikasi masalah yang akan dibuat polling
 - Merumuskan masalah polling
 - Menyusun instrumen dan menentukan sampel
 - Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data
 - Menyusun poin-poin penting pendapat umum yang dijadikan bahan informasi dan untuk menyerap opini serta aspirasi publik.

2. Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Program perbaikan kualitas pelayanan dan komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan prinsip prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah konten dan pengikut (follower) serta menggandeng influencer lokal.
- b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak

lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online.

- c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (fast response) pada layanan Lapor SP4N. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pengelolaan saran dan pengaduan dengan unit organisasi, unit kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut didukung dengan:
 - (i) penyediaan Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N; dan atau
 - (ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp.
- d. Perbaikan halaman website dan aplikasi agar lebih mudah diakses dengan cara memperbesar bandwidth.
- e. Perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll), misal penggunaan infografis yang lebih komunikatif dan penggunaan ilustrasi bagan alur pelayanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat.
- f. Perbaikan website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (web traffic) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat

mengakses website.

- g. Website atau aplikasi menampilkan interactivity seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.
- h. Mudah dan cepat untuk mendapatkan (download) informasi pada website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang.
- i. Bahasa website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang mudah dipahami.

3. Program Peningkatan Aspirasi Publik

- a. Program ini dapat dilakukan dengan memantau aduan masyarakat dengan tahapan:
 - o Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - o Memilah jenis aduan masyarakat
 - o Menganalisis aduan masyarakat o Membuat rekomendasi termasuk isu strategis.
- b. Program peningkatan aspirasi publik juga termasuk kegiatan untuk melakukan monitoring opini dan aspirasi publik dengan mengevaluasi dan memilih isu publik, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - o Pada tahap pertama dilakukan analisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil aduan masyarakat.
 - o Tahap kedua membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat dan aduan masyarakat.
 - o Tahap ketiga memetakan hasil monitoring untuk menentukan isu prioritas.
 - o Tahap keempat adalah menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu strategis.
 - o Tahap kelima adalah mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas kepada Perangkat Daerah terkait.

4. Program Perbaikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Arah dari kegiatan Monev adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP. Kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Monev 3 bulanan atau semesteran. Kajian ini mengusulkan bentuk dokumen Laporan Monev Bidang HKP dalam bentuk Policy Brief yang lebih operasional. Policy Brief adalah suatu paper/laporan/tulisan singkat yang muatannya mengarah pada perbaikan pelaksanaan program. Sasaran pembaca dari Policy Brief adalah atasan tertinggi (Kepala Dinas) dan level Kepala Bidang (Kabid).
5. Program Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk memantau informasi kebijakan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah, dengan teknis tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - b. Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - c. Mengumpulkan bahan (database) yang berasal dari:
 - (i) regulasi Pemda;
 - (ii) program prioritas Pemda;
 - (iii) informasi kebijakan Pemda; dan
 - (iv) data serta informasi pendukung.
 - d. Dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas
 - e. Menganalisis informasi kebijakan Pemerintah Daerah
 - f. Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah agar dapat menjadi input dalam menyusun informasi publik berbasis program prioritas daerah.

6. Program penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik. Teknis program kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:
 - a. Melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan peningkatan literasi informasi.
 - c. Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik.
 - d. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi komunitas informasi dan komunikasi publik yang berprestasi.
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh komunitas informasi dan komunikasi publik dalam diseminasi informasi.

Capaian program Indikator 2 yaitu Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK) hingga 2025 telah mencapai 66,66% dari target Renstra 2024–2026.

Meskipun telah mencapai target namun diperlukan Untuk meningkatkan Indeks Kematangan TIK , Dinas Kominfo akan menindaklanjuti dari hasil Rekomendasi penyusunan IKTIK sebagai berikut :

1. Peningkatan Kematangan Manajemen Tata Kelola TIK
 - a. Dokumentasi SOP seluruh proses prioritas secara tertulis dan digital.
 - b. Penetapan PIC untuk setiap domain COBIT agar ada akuntabilitas jelas.
 - c. Monitoring dan evaluasi reguler, tidak hanya saat terjadi

- kendala.
- d. Penggunaan aplikasi dashboard/sistem audit TIK untuk transparansi dan efisiensi.
 - e. Pelatihan dan sertifikasi TIK bagi SDM secara berkala.
 - f. Dokumentasi SOP seluruh proses prioritas secara tertulis dan digital.
 - g. Penetapan PIC untuk setiap domain COBIT agar ada akuntabilitas yang jelas.
 - h. Pelatihan dan sertifikasi TIK bagi SDM secara berkala.
 - i. Monitoring dan evaluasi reguler, tidak hanya saat terjadi kendala.
 - j. Penggunaan aplikasi dashboard/sistem audit TIK untuk transparansi dan efisiensi.
2. Saran untuk Perbaikan Fitur Website/Aplikasi sebagai Output TIK
- a. Menyusun Template Standar UI/UX
 - o Membentuk tim UI/UX terpadu di bawah Diskominfo
 - o Menggunakan framework standar seperti Bootstrap 5
 - o Menerapkan template dan desain konsisten pada semua subdomain

Hal ini berguna bagi pengalaman pengguna yang konsisten dan profesional

- b. Menyediakan Landing Page Publik
 - o Semua subdomain wajib memiliki halaman informasi publik
 - o Halaman berisi deskripsi layanan, cara penggunaan, kontak admin, dan dokumen terkait. Hal ini berguna untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses

- c. Mengembangkan Portal Terintegrasi
 - o Membangun portal induk di jombangkab.go.id
 - o Menambahkan fitur login tunggal, dashboard, dan status layanan. Hal ini bermanfaat untuk satu pintu akses layanan dan efisiensi pengelolaan.
- d. Audit Sistem Berkala
 - o Dilakukan minimal 2 kali per tahun
 - o Indikator audit antara lain uptime, keamanan (HTTPS), responsive desain, ketersediaan informasi, dan SEO. Hal ini bermanfaat untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem digital
- e. Menambahkan Fitur Pengaduan & Feedback
 - o Menggunakan form online, sistem rating, dan log pengaduan publik.
 - o Mengintegrasikan dashboard pengelolaan pengaduan, yang berguna untuk meningkatkan partisipasi publik dan kecepatan tanggapan layanan.

Capaian program Indikator 3 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika hingga 2025 telah mencapai 65,69% dari target Renstra 2024–2026. Apabaila Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang mengacu pada tahun 2024 yaitu 3.91 (sangat baik), sedangkan tahun 2025 belum rilis dikarenakan belum dilakukan perhitungan. Berdasarkan Hasil Indeks SPBE Tahun 2024 dari 47 indikator tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 mengampu pada 8 indikator terkelola dengan total nilai perindikator 2.88 yang tercapai sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2026, Indeks SPBE tahun 2026 akan menggunakan indikator Indeks Pemerintah Digital dikarenakan Indeks SPBE sudah tidak dipergunakan lagi. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada seluruh komponen Indeks

Pemerintah Digital di Kabupaten Jombang.

Capaian Indikator 4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terhadap Target Jangka Menengah yaitu 70% Hasil IPS Kabupaten Jombang yaitu 3.06. Hasil IPS pada Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan hasil IPS nasional yaitu 3,48, maka untuk meningkatkan hasil IPS di Tahun depan, Dinas Kominfo berkoordinasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Jombang untuk melakukan input data secara benar dan valid ke SIPD e-walidata.

Capaian Indikator 5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terhadap target jangka menengah yaitu 142,71% Hasil Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Jombang Hasil Indeks KAMI Tahun 2024 yaitu 612 dan Tahun 2025 yaitu 651 dengan total capaian 1263. Capaian pada tahun ke-2 ini telah melampau target yang telah ditetapkan. Maka diperlukan perubahan target dan tetap melaksanakan peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi dan area pengelolaan risiko keamanan informasi serta perlu adanya komitmen terkait penerapan keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD (2025-2029) dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 merupakan tahun pertama, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	12.30	Belum Rilis	n/a
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	201,8%	9,4%	4,6%
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	500%	100%	20%
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	500%	100%	20%
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	13.5	3,06	22,88%
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	3490	651	18,65%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	510.10	85.85	16.83%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	463,55	76.05	16,40%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	500%	100%	20%

Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	500%	100%	20%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	302%	10%	3,3%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	13.5	3.06	22.88%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	520	113	21,73%

Berdasarkan Renstra 2025-2029 dan Renstra 2024-2026 terdapat beberapa indikator yang sama yaitu :

1. Indeks SPBE/Pemerintah Digital
2. Indeks Pembangunan Statistik
3. Indeks KAMI
4. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Pada indikator diatas telah diuraikan pada matriks Renstra 2024-2026, sehingga yang akan diuraikan beberapa indikator yang tidak sama dengan indikator sebelumnya. Target jangka menengah berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah tahun kesatu.

Capaian Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah dengan Indikator Indeks Layanan Digital terhadap Target Jangka Menengah Tahun Kesatu yaitu 4,6%

Dalam rangka mencapai target tersebut, berbagai upaya telah mulai dilaksanakan, antara lain pengembangan dan peningkatan kualitas platform layanan digital, integrasi sistem layanan antar perangkat daerah, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Capaian sebesar 4,6% pada tahun pertama mencerminkan progres awal dalam mewujudkan layanan digital pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Meskipun masih berada pada tahap awal penguatan, capaian ini menjadi peran penting untuk pengembangan layanan digital yang lebih luas dan berkualitas di tahun-tahun berikutnya. Ke depan, peningkatan indeks layanan digital diharapkan dapat terus dilakukan melalui inovasi layanan, pemanfaatan teknologi yang adaptif, serta peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Dapat dijabarkan dalam matriks pengembangan layanan digital sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Tahun						Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik								
a. Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan	Layanan	4	3	3	0	0	0	10
		40%	70%	100%	100%	100%	100%	
b. Tingkat keterpaduan layanan	Layanan	1	4	4	5	22	7	43

administrasi layanan publik								
		2%	12%	21%	33%	84%	100%	
JUMLAH		5	7	7	5	22	7	53
		9%	23%	36%	45%	87%	100%	
	LAYANAN ADMINISTRASI	SETDA	INSPEKTORAT	SETWANA	BPKAD			
		DPMD	KOMINFO	SATPOLPP				
		BKPSDM	BAPPEDA	KESBANGPOL				
	LAYANAN PUBLIK	DISNAKER	DISDIKBUD	DINKES	DINKOPUM	DISDAGRI	DISPORAPAR	
		PUPR	DLH	PERKIM	BAPENDA	21KEC	DISPERTA	
			DISHUB	DINSOS	RSUD	JBG	DKP	
			DISNAK	DUKCAPIL	RSUD PLOSO		DPMPTSP	
							DISPERSIP	
							DPPKB-PPPA	
							BPBD	

Capaian Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan indikator satu yaitu Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terhadap Target Jangka Menengah Tahun Kesatu yaitu 20%

Capaian sebesar 20% pada tahun pertama menunjukkan bahwa perangkat daerah telah menyelesaikan seluruh aduan yang diterima serta penanganan pengaduan yang lebih terstruktur dan responsif sesuai SOP SP4N-LAPOR!. Berbagai upaya telah diimplementasikan pada tahun 2025, antara lain :

- a. peningkatan kapasitas pejabat penghubung/operator SP4N-LAPOR! kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
- b. Memastikan seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, dengan target meliputi :
 - i. Persentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah adalah 100%;
 - ii. Waktu respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti aduan adalah maksimal 1 hari
 - iii. Rata-Rata hasil penilaian (RHP) tindaklanjut pengaduan oleh pelapor dengan bintang 4.1 dari maksimal bintang 5
- c. Melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat melalui Goes To Campus dengan audience mahasiswa dan dosen

Ke depan dalam capaian target akhir jangka menengah RENSTRA, diharapkan tingkat penyelesaian pengaduan dapat terus meningkat seiring dengan penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan indikator satu yaitu Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat Target capaian Jangka Menengah Tahun Kesatu yaitu 20%

Capaian Strategis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada indikator yaitu Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat, pada tahun pertama difokuskan pada kanal diseminasi informasi melalui social media seperti Instagram dan website pada seluruh perangkat daerah pada penyebarluasan informasi dilaksanakan tepat waktu. Pada tahun kesatu ini, capaian 20% menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mulai membangun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya peningkatan ketepatan waktu publikasi terus didorong melalui perbaikan alur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Ke depan, diharapkan persentase informasi yang dipublikasikan tepat waktu dapat terus meningkat seiring dengan semakin baiknya sistem pengelolaan informasi serta meningkatnya kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu 16.83%

Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” pada tahun pertama difokuskan pada penguatan implementasi reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah. Indikator yang digunakan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, ditargetkan mencapai 16,83% sebagai capaian jangka menengah tahun kesatu. Meskipun pada

Renstra 2025-2029 Indeks RB merupakan tahun kesatu, namun RB pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah diterapkan sejak tahun 2021 dan RB merupakan penunjang salah satu indikator pada perolehan TPP. Pada Tahun 2025 nilai RB pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 80,07 menjadi 85,85 di tahun 2025. Beberapa Langkah strategi pelaksanaan RB yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

- a. Melaksanakan Tindak Lanjut dari RB tahun 2024;
- b. Optimalisasi Agent Of Change dan Menerapkan strategi kegiatan Bank Sampah Unit pada seluruh pegawai Dinas Kominfo melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Agent Of Change;
- c. Sosialisasi Core Values Bebas Korupsi dan Zona Integritas;
- d. Membangun Zona Integritas Berkelanjutan;
- e. Menerapkan Core Value Berakhlak pada setiap kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator ke-1 Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu 20%

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun pertama pelaksanaan difokuskan pada penguatan sistem penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif dan terintegrasi melalui SP4N-LAPOR!. Dengan target capaian jangka menengah sebesar 20% untuk indikator persentase pengaduan yang diterima dan telah ditindaklanjuti, berbagai upaya telah mulai diimplementasikan, antara lain :

- Peningkatan kapasitas pejabat penghubung/operator SP4N-LAPOR! kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang;
- Memastikan seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, dengan target meliputi :
 - i. Persentase penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti oleh

- Perangkat Daerah adalah 100%;
- ii. Waktu respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti aduan adalah maksimal 1 hari
 - iii. Rata-Rata hasil penilaian (RHP) tindaklanjut pengaduan oleh pelapor dengan bintang 4.1 dari maksimal bintang 5
- Melaksanakan sosialisasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat melalui Goes To Campus dengan audience mahasiswa dan dosen

Capaian dengan indikator kedua Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu maka capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu 20%

Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada indikator kedua, yaitu persentase informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu, pada tahun pertama difokuskan pada kanal diseminasi informasi melalui social media seperti Instagram dan website pada seluruh perangkat daerah. Sosialisasi dilakukan oleh bidang Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, serta peningkatan pemanfaatan media informasi resmi masing-masing perangkat daerah. Pada tahun kesatu ini, capaian 20% menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mulai membangun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, meskipun masih dalam tahap penyesuaian. Upaya peningkatan ketepatan waktu publikasi terus didorong melalui perbaikan alur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Ke depan, diharapkan persentase informasi yang dipublikasikan tepat waktu dapat terus meningkat seiring dengan semakin baiknya sistem pengelolaan informasi serta meningkatnya kesadaran seluruh perangkat daerah terhadap pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat.

Capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik target capaian jangka menengah tahun kesatu yaitu 3,3%

Capaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada tahun pertama menunjukkan progres awal dalam upaya peningkatan keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Dengan target capaian jangka menengah sebesar 3,3%, berbagai langkah strategis telah mulai dilaksanakan, antara lain pengembangan dan integrasi aplikasi layanan, peningkatan interoperabilitas sistem, serta penguatan infrastruktur pendukung melalui platform sso.jombangkab.go.id. Meskipun capaian masih berada pada tahap awal, namun upaya koordinasi antar perangkat daerah serta standarisasi data dan layanan menjadi fokus utama guna mendorong efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, diharapkan capaian ini dapat terus meningkat seiring dengan optimalisasi implementasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana pengembangan dan keterpaduan telah diselaraskan pada Matriks sesuai dengan pengembangan indeks layanan digital sehingga tercapai keterpaduan layanan pemerintahan dan layanan publik sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Tahun						Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik								
a. Tingkat keterpaduan layanan	Layanan	4	3	3	0	0	0	10

administrasi pemerintahan								
		40%	70%	100%	100%	100%	100%	
b. Tingkat keterpaduan layanan administrasi layanan publik	Layanan	1	4	4	5	22	7	43
		2%	12%	21%	33%	84%	100%	
JUMLAH		5	7	7	5	22	7	53
		9%	23%	36%	45%	87%	100%	
	LAYANAN ADMINISTRASI	SETDA	INSPEKTORAT	SETWA N	BPK AD			
		DPMD	KOMINFO	SATPOL PP				
		BKPSDM	BAPPE DA	KESBANGPOL				
	LAYANAN PUBLIK	DISNAKER	DISDIKBUD	DINKES	DINKOPUM	DISDAGRIN	DISPORAPAR	
		PUPR	DLH	PERKIM	BAPENDA	21KEC	DISPERTA	
			DISHUB	DIN SOS	RSUD JBG		DKPP	
			DISNAK	DUKCA PIL	RSUD PLOSO		DPMPTSP	
							DISPERSIP	
							DPP KB-PPPA	
							BPBD	

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral target capaian jangka menengah tahun kesatu 22.88%

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun pertama difokuskan pada penguatan tata kelola data dan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik di masing-masing perangkat daerah. Indikator yang digunakan, yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, ditargetkan mencapai 22,88% sebagai capaian jangka menengah tahun kesatu. Pada tahap awal ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target, antara lain penyusunan kebijakan dan pedoman teknis statistik sektoral, peningkatan koordinasi antar produsen data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik. Selain itu, mulai dilakukan pembenahan sistem pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data agar lebih terstandar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI target jangka menengah tahun kesatu 21,73%

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada tahun pertama difokuskan pada penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Indikator yang digunakan, yaitu Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi (Indeks KAMI), ditargetkan mencapai 21,73% sebagai capaian jangka menengah tahun kesatu. Dalam upaya mencapai target tersebut, berbagai langkah strategis telah mulai dilaksanakan, antara lain penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kesadaran (awareness) keamanan informasi bagi seluruh pegawai, serta penguatan pengelolaan risiko

keamanan informasi. Dalam upaya menjaga keamanan data dan Sistem Pemerintahan Kabupaten Jombang maka dibentuklah secara resmi Computer Security Inciden Response Team (CSIRT). CSIRT Jombang merupakan tim khusus yang dibentuk untuk menanggapi insiden keamanan siber yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Tim yang berada di masing-masing Perangkat Daerah berperan aktif dalam mendeteksi, menganalisis dan mengatasi berbagai ancaman siber seperti serangan peretas, malware dan ransomware. Tim inilah yang setiap tahunnya akan dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM.

1.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disandingkan dengan Level Nasional/Internasional sebagai berikut:

Berdasarkan Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Sasaran Strategis – Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	67 (sedang)	77,58
	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I- KTIK)	Level 3	Level 2
	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2.88 (terkelola)	4,75
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3.06	3,48
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	620 (tinggi)	591
	Nilai Evaluasi AKIP PD	76.05	73

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah OPD yang telah memiliki layanan informasi	10%	78%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang berbasis elektronik	100%	100%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Sektor yang dipublikasikan	100%	100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem aplikasi Strategis yang Berfungsi dengan Baik	55%	95%

Analisis Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional:

a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.” Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja yang dibandingkan dengan capaian nasional.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) Kabupaten Jombang memperoleh nilai 67 (kategori sedang), masih berada di bawah capaian nasional sebesar 77,58. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik dan keterbukaan informasi di daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan layanan informasi oleh perangkat daerah.

Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK) mencapai Level 3, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada Level 2. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan baik dan relatif lebih maju dibandingkan rata-rata nasional. Namun tentunya masih perlu banyak perbaikan sesuai hasil rekomendasi penyusunan dokumen I-KTIK.

Namun demikian, pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait layanan komunikasi dan informatika, Kabupaten Jombang memperoleh nilai 2,88 (kategori terkelola), masih tertinggal dibandingkan capaian nasional sebesar 4,75. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi layanan digital dan penerapan SPBE masih memerlukan penguatan.

Pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS), capaian daerah sebesar 3,06, sedikit di bawah nasional sebesar 3,48, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral.

Di sisi lain, Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 620 (kategori tinggi), melampaui capaian nasional sebesar 591, yang mencerminkan sistem keamanan informasi di Kabupaten Jombang sudah cukup baik.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 76,05, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 73, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

b) Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang bervariasi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 100%, setara dengan capaian nasional, yang menunjukkan kinerja aparatur yang optimal.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan capaian sebesar 10%, jauh di bawah capaian nasional sebesar 78%. Hal ini menjadi perhatian utama karena masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang memiliki layanan informasi publik.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai 100%, setara dengan nasional, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan dengan baik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral juga mencapai 100%, setara nasional, yang menunjukkan komitmen dalam penyediaan dan publikasi data sektoral.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan capaian sebesar 55% dibandingkan nasional telah mencapai 95%, yang mengindikasikan bahwa sistem aplikasi strategis masih perlu ditingkatkan.

Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	n/a	4.75
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	9.4%	44.53%
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%	100%
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3,06	3,48
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	651	591
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85.85	87.00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76,05	73

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%
	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	10%	44,53
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3.06	3,48
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	113	n/a

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik” yang diukur melalui berbagai indikator kinerja utama yang merepresentasikan aspek transformasi digital, layanan publik, tata kelola informasi, statistik sektoral, keamanan informasi, serta reformasi birokrasi.


Pada indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital, realisasi daerah belum tersedia (n/a), sementara capaian nasional berada pada nilai 4,75. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam pengukuran dan pelaporan indeks SPBE di tingkat daerah agar dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap transformasi digital pemerintahan. Nilai n/a atau belum tersedia pada Kabupaten Jombang dikarenakan pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB.

Indikator Indeks Layanan Digital menunjukkan capaian daerah sebesar 9,4%, jauh di bawah capaian nasional sebesar 44,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat integrasi dan pemanfaatan layanan digital pemerintahan masih relatif rendah dan perlu percepatan dalam pengembangan serta interoperabilitas sistem layanan.

Pada aspek pengelolaan komunikasi dan informasi publik, indikator tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui LAPOR mencapai 100%, setara dengan capaian nasional. Demikian pula dengan tingkat penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang juga mencapai 100%, menunjukkan bahwa fungsi layanan informasi publik telah berjalan optimal.

Untuk indikator Indeks Pembangunan Statistik, capaian daerah sebesar 3,06, masih berada di bawah capaian nasional sebesar 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan statistik sektoral masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi, kualitas data, dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.

Pada indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), daerah memperoleh nilai 651, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 591. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola keamanan informasi di daerah telah berjalan dengan baik dan memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.



Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan capaian sebesar 85,85, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 87,00. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan kategori yang baik dan mencerminkan adanya upaya peningkatan tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mencapai 76,05, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 73, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik.


Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan beberapa indikator telah mencapai target maksimal.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan capaian optimal, di mana persentase pengaduan yang diterima dan telah ditindaklanjuti mencapai 100%, serta persentase informasi publik yang dipublikasikan tepat waktu juga mencapai 100%, setara dengan capaian nasional.

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, indikator tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik baru mencapai 10%, masih jauh di bawah capaian nasional sebesar 44,53%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi layanan digital masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor memiliki nilai evaluasi sebesar 3,06, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,48, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pemanfaatan data statistik sektoral.



Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, nilai tata kelola keamanan Indeks KAMI tercatat sebesar 113, namun belum tersedia pembandingan nasional untuk indikator ini. Meskipun demikian, capaian sebelumnya pada indeks KAMI yang tinggi menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi telah menjadi kekuatan daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai Evaluasi AKIP yang mendukung peningkatan akuntabilitas organisasi secara keseluruhan.

1.1.5 Analisis atas realisasi kinerja Diuraikan tentang penyebab keberhasilan/kegagalan dan/atau peningkatan/penurunan kinerja.

Capaian Program/Kegiatan Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	4.10	n/a	Belum Rilis	24.340.787.745	23.314.170.759	95.78
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	9.4%	9.4%	100			
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100			
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%	100%	100			
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,06	110			
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	640	651	101.56			

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,10	85.85	107.18			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76.05	76,05	100	11.170.531.957	10.352.562.479	92,68
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%	100	3.465.713.750	3.454.886.761	99,69
	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	23%	23%	100	7.636.502.065	7.507.291.792	98.31
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	3.06	110	1.345.374.148	1.337.991.227	99.45

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	100	113	110	722.665.825	661.438.500	91.53
---	--	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang Berhasil dan Efektif terdapat 5 indikator yaitu pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif sangat berhasil, dengan capaian 107,18% untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Sasaran Strategis Optimalnya data statistik sectoral dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan capaian 110%, Sasaran Strategis Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Indeks KAMI dengan capaian 110%, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian 110% dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Nilai Tata Kelola Indeks KAMI dengan capaian 110%
- Sasaran Strategis/Program yang efektif dengan target dan realisasi 100% terdapat 7 indikator meliputi Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah dengan Indeks Layanan Digital 100%, Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan capaian 100% dan Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat capaian 100%, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian 100%, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase pengaduan yang diterima telah

ditindaklanjuti capaian 100% dan indikator Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu dengan capaian 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Adanya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
- b. Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah menjangkau seluruh PD;
- c. Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
- d. Aktifnya website dan social media Pemerintah Daerah sebagai penyajian informasi dan release secara berkala;
- e. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan perangkat TIK harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- f. Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara nasional dan Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik;
- g. Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Forum Komunikasi Sandi Kabupaten Jombang terkait pembinaan persandian, peningkatankapasitas Keamanan Informasi dan penerbitan sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya permasalahan dalam kegagalan dan penurunan kinerja yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- a. Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan Indikator yaitu Indeks SPBE digantikan dengan Indeks Pemerintah Digital. Indeks Pemerintah Digital akan diberlakukan mulai 2026 namun untuk indikator penilaiannya belum disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah.

- b. Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana IT dan publikasi kinerja yang memadai;
- c. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- d. Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan Nasional dan kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi.
- e. Belum semua Sistem Informasi dan database terintegrasikan.
- f. Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut

- a. Berkoordinasi dengan Kemenpan RB maupun perangkat daerah terkait perubahan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital dan segera disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah;
- b. Mengusulkan anggaran prioritas peningkatan sarana dan prasarana TIK dan publikasi;
- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- d. Koordinasi yang baik dengan lembaga sandi negara sebagai Pembina persandian dan rutin melaksanakan forum komunikasi sandi kepada instansi terkait dengan memberikan informasi akan pentingnya melakukan pengamanan informasi.
- e. Optimalisasi sistem informasi di berbagai sektor layanan, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- f. Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan layanan Pemerintah Digital

1.2 Realisasi Anggaran

1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis – Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	67	85.85	119,23	24.340.787.745	23.314.170.759	95.78
	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	Level 3	Level 3	100			
	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2.88	Belum Rilis	Belum Rilis			
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.5	3.06	122.40			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	620	651	105			

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Nilai Evaluasi AKIP PD	80.10	76.05	94.94			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	11.170.531.957	10.352.562.479	92,68
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah OPD yang telah memiliki layanan informasi	10%	10%	100	3.465.713.750	3.454.886.761	99,69
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang berbasis elektronik	100%	100%	100	7.636.502.065	7.507.291.792	98.31
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100	1.345.374.148	1.337.991.227	99.45
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Persentase Sistem aplikasi Strategis yang	55%	55%	100	722.665.825	661.438.500	91.53

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
Informasi	Berfungsi dengan Baik						

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada sasaran strategis Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai bahkan melampaui target, sementara realisasi anggaran meskipun belum 100% namun sudah diatas 90%.

Pada indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PKIP), capaian kinerja mencapai 119,23% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar 95,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran mampu menghasilkan kinerja yang jauh melampaui target, sehingga mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat baik.

Indikator Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK) menunjukkan capaian sebesar 100%, yang berarti target telah tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika belum dapat disajikan karena tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran yang tinggi, sehingga Indeks SPBE yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.


Pada indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS), capaian kinerja mencapai 122,40%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan data statistik sektoral telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas perencanaan pembangunan. Namun realisasi yang digunakan adalah penilaian dari BPS Provinsi Jawa Timur karena tahun ini tidak dilakukan oleh BPS Pusat.

Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan capaian sebesar 105%, yang berarti kinerja melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola keamanan informasi telah dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja hanya mencapai 94,94%, atau belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Dari sisi program, seluruh program menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan tingkat realisasi anggaran yang bervariasi antara 91,53% hingga 99,69%.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 92,68%, anggaran belum terserap maksimal pada gaji.
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,69%, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 98,31%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,45%, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 91,53%, maka diperlukan evaluasi pada kegiatan yang belum terserap maksimal.



Secara keseluruhan, terdapat korelasi yang positif antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja, dimana sebagian besar indikator menunjukkan capaian kinerja yang tinggi meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- Belum tersedianya data capaian pada indikator SPBE
- Belum tercapainya target pada indikator AKIP
- Perlu optimalisasi perencanaan agar serapan anggaran lebih proporsional tanpa mengurangi efisiensi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran berdasarkan Renstra 2025-2029 akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	4.10	n/a	Belum Rilis	24.340.787.745	23.314.170.759	95.78
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	9.4%	9.4%	100			
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100			
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100%	100%	100			
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,06	110			
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	640	651	101.56			

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,10	85.85	107.18			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76.05	76,05	100	11.170.531.957	10.352.562.479	92,68
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100%	100%	100	3.465.713.750	3.454.886.761	99,69
	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	100%	100%	100			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	23%	23%	100	7.636.502.065	7.507.291.792	98.31
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	3.06	110	1.345.374.148	1.337.991.227	99.45

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	100	113	110	722.665.825	661.438.500	91.53
---	--	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------

Perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sumber daya anggaran yang telah digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan, begitula dengan capaian realisasi anggaran yang rata-rata sudah diatas 90%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal dan memberikan output serta outcome yang sesuai dengan perencanaan dengan didukung oleh penyerapan anggaran.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum dapat disajikan karena tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Namun demikian, dari sisi realisasi anggaran telah tercapai sebesar 95,78%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sebagai penerapan SPBE diseluruh perangkat daerah.

Selanjutnya, pada sasaran Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah serta Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian sebesar 100%, yang berarti seluruh target telah terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan digital serta pengelolaan komunikasi publik yang efektif.

Pada sasaran Optimalnya Data Statistik Sektoral, capaian Indeks Pembangunan Statistik

mencapai 110%, melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral yang signifikan.

Demikian pula pada sasaran Optimalnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, capaian Indeks KAMI sebesar 101,56% menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi telah berjalan dengan baik dan melampaui target minimal yang ditetapkan.

Sementara itu, pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 107,18%, yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Dari sisi program, seluruh program menunjukkan capaian kinerja yang optimal, dengan rata-rata capaian sebesar 100% hingga 110%. Di sisi lain, realisasi anggaran pada masing-masing program berada pada kisaran 91,53% hingga 99,69%. Program Penyelenggaraan Persandian bahkan menunjukkan capaian kinerja sebesar 110% dengan realisasi anggaran sebesar 91,53%.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, dimana target kinerja dapat dicapai tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi prinsip efektivitas dalam pengelolaan realisasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi anggaran tersebut, hal ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perencanaan anggaran di periode berikutnya. Realisasi anggaran yang baik melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk bagian Sekretariat dan Bidang-bidang, sehingga dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran, di mana Tingkat Efisiensi dihitung sebagai selisih antara keduanya. Semakin besar tingkat efisiensi, semakin tinggi pencapaian



kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.

Adapun Efisiensi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar Rp. 1.677.080.276 atau 6,89% sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.340.787.745

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Analisis Efisiensi
Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks SPBE/Pemerintah Digital	Belum Rilis	95.78	n/a	Tidak ada efisiensi dikarenakan capaian kinerja belum rilis
Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah	Indeks Layanan Digital	100	95.78	4.22	Cukup Efisien – Pencapaian sesuai dengan target dengan anggaran yang masih terkendali
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100	95.78	4.22	Cukup Efisien – Pencapaian sesuai dengan target dengan anggaran yang masih terkendali
	Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat	100	95.78	4.22	Cukup Efisien – Pencapaian sesuai dengan target dengan anggaran yang masih terkendali
Optimalnya data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	110	95.78	14.22	Efisien – Kinerja Data statistik meningkat pesat dengan anggaran yang masih terkendali.
Optimalnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Indeks KAMI	101.56	95.78	5.78	Efisien – Pencapaian hanya sedikit lebih tinggi dibanding anggaran yang

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Analisis Efisiensi
					dikeluarkan.
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	107.18	95.78	11.4	Efisien – Kinerja Reformasi Birokrasi meningkat pesat dengan anggaran yang masih terkendali.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100	92,68	7.32	Efisien – Pencapaian sesuai dengan target anggaran yang masih terkendali.
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti	100	99,69	0.31	Cukup Efisien – Pencapaian hanya sedikit lebih tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan.
	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu	100	99,69	0.31	Cukup Efisien – Pencapaian hanya sedikit lebih tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan.
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	100	98.31	1,69	Cukup Efisien – Pencapaian hanya sedikit lebih tinggi dibanding anggaran yang

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Analisis Efisiensi
					dikeluarkan.
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	110	99.45	10.56	Efisien – Kinerja Data statistik meningkat pesat dengan anggaran yang masih terkendali.
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola keamanan Indeks KAMI	110	91.53	18.47	Efisien – Kinerja Pengelolaan Nilai Tata Kelola Keamanan Indeks KAMI meningkat pesat dengan anggaran yang masih terkendali.

Tingkat Efisiensi di Bawah 5% dengan kategori Cukup Efisien pada :

1. Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah dengan indikator Indeks Layanan Digital (4,22%);
2. Sasaran Strategis Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang

- sudah diselesaikan dengan indikator Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (4,22%);
3. Sasaran Strategis Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dengan indikator Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat (4,22%);
 4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase pengaduan yang diterima ditindaklanjuti (0,31%) dan Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu (0,31%).

Memerlukan evaluasi dengan mempertimbangkan faktor penyebab dan upaya untuk lebih efisien dalam meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran yang terbatas. Perlu dilakukan fokus kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dengan biaya lebih terjangkau.


Tingkat Efisiensi 5-20% dengan kategori efisien pada :

1. Sasaran Strategis Optimalnya data statistik sectoral dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (14,22%);
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (11.4%);
3. Sasaran Strategis Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (10,56%)
4. Sasaran Strategis Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi (KAMI) (18.47)

Pada indikator diatas memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi. Peningkatan kinerja jauh lebih tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu diperhatikan kembali target indikator yang disesuaikan dengan kondisi terbaru sehingga dapat untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

1.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja selama tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan



rekomendasi Tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
1	Agar dokumen Pohon Kinerja disusun secara lebih komprehensif dengan memuat penjabaran hubungan kinerja lintas Perangkat Daerah (crosscutting performance), terutama pada sasaran yang bersifat makro dan isu-isu strategis daerah	Menyusun dokumen Pohon Kinerja dengan mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah, yang menggambarkan crosscutting performance terhadap pencapaian sasaran makro dan isu strategis daerah	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiek dan Persandian
		Pemetaan Lintas Perangkat Daerah (Crosscutting) dengan mengidentifikasi PD yang terlibat	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiek dan Persandian
		Penjelasan Dokumen Pohon Kinerja yang memuat penjabaran pohon kinerja lintas	V			V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Perangkat Daerah (crosscutting performance) dijabarkan kedalam penyusunan Renstra 2025-2030 dan Renja meliputi (Mengapa sasaran tersebut penting, PD mana saja yang terlibat, Bagaimana sinergi antar PD dibangun dan Tantangan dan peluang dalam hubungan kinerja lintas PD)							Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
2	Agar penyusunan target kinerja dalam KKPT (Kertas Kerja Perencanaan Tahunan) tidak hanya berdasarkan analisis kondisi saat ini, namun jugamempertimbangkan tindak lanjut dan pembelajaran dari capaian sertaketidaktercapaian target kinerja tahun sebelumnya	Melaksanakan Evaluasi Menyeluruh terhadap Kinerja Tahun Sebelumnya			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut KKPT Berdasarkan Evaluasi Tahun Sebelumnya dalam LKJiP			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Penyusunan Target Kinerja dalam KKPT dengan Kolaborasi Antar Bidang dan melibatkan seluruh ASN Dinas Kominfo			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
									plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala melalui Rapat Evaluasi KKPT setiap tribulan			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
3	Melibatkan seluruh pegawai secara aktif dalam proses perencanaan danevaluasi, tidak hanya pada saat forum, tetapi juga dalam proses tindak lanjut danpenyusunan rencana aksi individu/unit	Penyusunan Mekanisme Partisipasi Pegawai melalui alur kinerja mulai dari Perencanaan dan Evaluasi			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Melibatkan seluruh ASN dinas kominfo dalam Penyusunan Rencana Aksi dan Dialog Kinerja			V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian

Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Partisipasi Penyusunan Rencana Aksi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten			V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pl. Bidang Statistiik dan Persandian
--	--	--	---	--	--	--

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		TW IV 2026
4	Kepala Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi unit kerja di bawahnya telah di-cascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, melalui penyelarasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala;	Penyelarasan Rencana Aksi. Kepala Dinas Kominfo mengadakan rapat koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa rencana aksi telah dicascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiek dan Persandian
		Pemantauan Berkala dengan rapat tribulan untuk memantau progres pencapaian rencana aksi dan hasil kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Kominfo	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiek dan Persandian
		Evaluasi Kinerja dan Tindak Lanjut dengan Menyusun laporan evaluasi kinerja dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiek dan Persandian

5	Agar menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD pada Kurja Kepala Perangkat	Menyusun Kurja Kepala Dinas Kominfo dengan menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD untuk dapat diketahui ada tidaknya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		TW IV 2026
	Daerah, sehingga dapat diketahui ada tidaknya efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja	efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja							plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
6	Mensosialisasikan kembali siklus manajemen kinerja secara menyeluruh khususnya memastikan hasil pengukuran kinerja dibahas secara terbuka dan dijadikan bahan pertimbangan dalam forum evaluasi dan perencanaan berikutnya, termasuk melibatkan pegawai dalam proses identifikasi tindak lanjut	Sosialisasi Siklus Manajemen Kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan tindak lanjut	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Rapat Evaluasi Internal Tribunal yang bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran kinerja dan dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi perencanaan berikutnya dengan melibatkan seluruh pegawai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Hasil Evaluasi Internal Tribunal ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai. Hasil Tersebut menjadi bahan pertimbangan perencanaan kinerja pegawai tribunal berikutnya	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan

								Persandian
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		TW IV 2026
7	Agar mengunggah LKJIP pada laman resmi kominfo.jombangkab.go.id	LKJIP Tahun 2024 telah diupload di kominfo.jombangkab.go.id pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti Dukung Pelaporan Tindak Lanjut akan dilampirkan pada rencana aksi Tindak Lanjut di Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian
		LKJIP Tahun 2025 diupload dikominfo.jombangkab.go.id pada tribulan I Tahun 2026			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian
8	Agar melakukan perbaikan pada laporan LKJIP sesuai dengan sistematika pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	LKJIP Tahun 2024 telah disusun dan ditindaklanjuti sesuai sistematika Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. Bukti dukung LKJIP Tahun 2024 dilampirkan pada Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian

Penyusunan LKJiP Tahun 2025 disusun sesuai			V				Sekretaris, Kepala Bidang
---	--	--	---	--	--	--	------------------------------

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		TW IV 2026
		dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tribulan I Tahun 2026							Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
9	Agar melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja	LKJiP Tahun 2024 telah dilengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKJiP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian

		<p>LKJIP Tahun 2025 disusun dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa</p>			V			<p>Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja							
10	Agar menambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja dan dituangkan pada dokumen LKJIP	LKJiP Tahun 2024 telah ditambahkan penjelasan atau analisa efisiensi sumber dayamampu mendukung capaian kinerja sesuai dengan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2024 pada tanggal 23 Juni 2025. LKJiP Tahun 2024 dilampirkan pada Laporan dan Bukti Dukung Rencana Aksi Tindak Lanjut Tribulan III Tahun 2025	V						Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian
		LKJiP Tahun 2025 ditambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber daya mampu mendukung capaian kinerja			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian

11	Perlu dilakukan penguatan peran serta pegawai dalam proses penyusunan LKJIP melalui mekanisme yang mendorong partisipasi aktif, seperti forum diskusi	Sosialisasi internal mengenai pentingnya LKJIP dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah bagi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dengan narasumber yang kompeten dibidangnya		V					Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pl. Bidang Statistiik dan Persandian
----	---	---	--	---	--	--	--	--	--

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
	internal, workshop evaluasi kinerja, atau pemberian ruang umpan balik secara formal. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja kolaboratif agar seluruh pegawai merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas dokumen LKJiP								
		Membentuk Tim Penyusunan LKJiP yang melibatkan semua pegawai dan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tim Penyusunan LKJiP mempunyai tugas masing-masing yang bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi LKJiP secara kolaboratif			V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian
		Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses penyusunan, dari segi partisipasi pegawai maupun kualitas dokumen yang dihasilkan.				V			Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
12	Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis Hasil Evaluasi ini sehingga Tindak Lanjut benar-benar mampu meningkatkan kualitas implementasi SAK IP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat Daerah	Analisis Hasil Evaluasi dengan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi	V		V				Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian
		Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Bidang Melalui Evaluai Rapat Tribulan	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan plt. Bidang Statistiiik dan Persandian

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
		Monitoring tribulan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindak lanjut sesuai dengan jadwal dan target kinerja dapat tercapai	V	V	V	V	V	V	Sekretaris, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan pt. Bidang Statistiik dan Persandian



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2025. Format penyusunan pada LKjIP Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Persentase capaian kinerja akan disesuaikan dengan skala pengukuran sebagai berikut :

Untuk mempermudah dalam interpretasi dalam pencapaian indikator kinerja, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	>60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110%, dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110%. Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0%.

Hasil Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

- **Tujuan Strategis Meningkatkan Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Indeks SPBE/Pemerintah Digital dengan capaian yang tidak bisa dilakukan penilaian karena kemenpan RB**

tidak melakukan penilaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sehingga hasilnya belum rilis.

- **Sasaran Strategis Optimalisasi Layanan Digital Pemerintah, Indikator Indeks Layanan Digital Capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan Tahun 2025 layanan digital pemerintah daerah yang sudah mampu terhubung dan bertukar data secara otomatis antara lain :
 - a. BKPSDM – SIAP ASN
 - b. DISNAKER - TALENTA
 - c. PUPR – LAYANAN PUPR
 - d. SEKRETARIAT DAERAH - MONEV
 - e. DPMPD – SABDOPALON

Jumlah aplikasi tersebut adalah layanan/aplikasi digital yang mampu saling terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis dengan layanan atau sistem lain. Untuk memungkinkan layanan digital perangkat daerah interoperabel, layanan digital harus dibangun sesuai standart (data, autentifikasi, teknologi) dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo

- **Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Indikator Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan seluruh pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! telah ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah
- **Sasaran Strategis Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Indikator Tingkat Penyebarluasan Informasi ke Masyarakat capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan seluruh Penyebarluasan Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai Melalui Media website, sosial media, radio telah dipublikasikan seluruhnya.

- **Sasaran Strategis Optimalnya Data Statistik Sektoral, Indikator Indeks Pembangunan Statistik capaian 100% dengan kategori baik berhasil dikarenakan :**
 - a. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
 - b. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
 - c. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun Masyarakat luas.
 - d. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi secara berkala.
 - e. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025
 - f. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta lokasi industri.
- **Sasaran Strategis Optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi, indikator Indeks KAMI capaian 100% dengan kategori**

baik berhasil dikarenakan (1) Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori Cukup Baik, (2) Terdapat peningkatan Skor Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dari 612 pada Gap Analisis Awal menjadi 650 namun perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi, pengelolaan risiko dan pengelolaan aset keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

- **Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian 107.18 dengan kategori istimewa sangat berhasil** dikarenakan melampaui target dari yang diperjanjikan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan 5,78% dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah 85.85 dengan kategori A- predikat **Memuaskan dengan Catatan**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	NILAI	
			2024	2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	7.16	8.19
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2.00	1.75
	Rencana Aksi	4%	2.33	3.17
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2.83	3.28
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	72.91	77.66
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41.01	43.29
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31.90	34.36
TOTAL			80.07	85.85

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Nilai Evaluasi AKIP PD capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan
 - a. Telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu,

Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah menyusun cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah.

- b. Telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja.
- c. Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai
- d. Telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Namun dari hasil tersebut perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan hasil rekomendasi yang akan dijelaskan pada poin berikutnya. Pada tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai sebesar 76.05 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada sebagian besar unit kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal serta pengelolaan kinerja secara berkelanjutan telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 1 : Persentase Pengaduan yang telah diterima ditindaklanjuti dengan capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan seluruh pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! telah ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah

- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indikator 2 : Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan tepat waktu dengan capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan seluruh Penyebarluasan Informasi Masyarakat Kegiatan Kepala Daerah tercapai Melalui Media website, social media, radio telah dipublikasikan seluruhnya.
- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator Tingkat keterpaduan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan capaian 100% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan Realisasi Layanan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2025 sebagai berikut :
 - **BKPSDM – SIAP ASN**

BKPSDM , dengan layanan kepegawaian SIAP-ASN, menyediakan data kepegawaian (NIP, Nama ,tanggal lahir, Pangkat, Golongan, Jabatan, Unit Kerja, Pendidikan) yang bisa dibagi pakaikan dengan aplikasi layanan administrasi pemerintah lainnya dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.
 - **SEKRETARIAT DAERAH - MONEV**

Sekretariat Daerah, dengan layanan e-monev yang menyediakan layanan pelaksanaan, dan pelaporan keuangan perangkat daerah . sistem ini memungkinkan sistem lain memanfaatkan data realisasi keuangan, data pemaketan, data pengelolaan anggaran lainnya untuk keperluan monitoring dan evaluasi.
 - **DPMPD – SABDOPALON**

DPMD, dengan aplikasi layanan persuratan desa (SABDOPALON), adalah layanan publik yang dari proses layananannya mampu menyediakan data penduduk kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir) sesuai standar data administrasi kependudukan dan sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

Realisasi Layanan Publik Tahun 2025 sebagai berikut :

- **DISNAKER - TALENTA**

Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan ketenagakerjaan (TALENTA), menyediakan data penduduk angkatan kerja kabupaten Jombang (NIK, Nama, Alamat, tanggal lahir, Pendidikan), data Perusahaan di kabupaten Jombang (Nama Perusahaan, No Ijin Usaha, Alamat, bidang usaha) dan data pelatihan untuk Masyarakat.

- **PUPR – LAYANAN PUPR**

PUPR , dengan Layanan PUPR, menyediakan data layanan PUPR seperti data aset daerah aliran Sungai beserta variabelnya (luasan sawah yang dialiri), penyewaan/peminjaman alat berat, data pengajuan uji lab PUPR.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian layanan pemerintahan dan layanan publik telah tercapai 100%.

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian 110% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan**

- a. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data BPS baik dari data sensus maupun survei di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
- b. Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan dengan menggunakan data statistik sektoral di beberapa kegiatan dan telah melibatkan walidata dalam pelaksanaannya.
- c. Proses Sosialisasi dan Literasi Data Statistik telah dilaksanakan oleh produsen data dengan kegiatan secara online pada website dan media sosial maupun offline yang mengundang pihak eksternal baik OPD maupun

Masyarakat luas.

- d. Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan oleh seluruh produsen data pada awal tahun dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Rekomendasi Statistik oleh BPS dan telah dilakukan reviu serta evaluasi secara berkala.
 - e. Proses Perencanaan Pembangunan Statistik telah dituangkan dalam Rencana Aksi SDI telah dilaksanakan dengan baik. Bukti monitoring dan evaluasi termuat dalam Laporan pelaksanaan SDI tahun 2025
 - f. Proses Pemanfaatan Big Data telah dilaksanakan di beberapa OPD dengan memanfaatkan citra satelit dan data dari beberapa website untuk menghasilkan data statistik pendukung, yaitu penyusunan peta kerawanan bencana dan peta lokasi industri.
- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Indikator Nilai Tata Kelola Keamanan Indeks KAMI dengan capaian 110% dengan kategori baik (berhasil)** dikarenakan pada kondisi saat ini Pengontrolan keamanan informasi sudah diterapkan sebagian besar dan sudah ada kebijakan/prosedur terkait namun tetap harus ada pemantauan terkait kepatuhan pegawai internal maupun pemasok terhadap keberjalanan keamanan informasi

B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi diatas maka seluruh indikator dapat dikatakan baik (berhasil), namun pada indikator Nilai Evaluasi AKIP apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan, maka diperlukan upaya-upaya untuk :

- Agar dokumen Pohon Kinerja disusun secara lebih komprehensif dengan memuat penjabaran hubungan kinerja lintas Perangkat Daerah (crosscutting performance), terutama pada sasaran yang bersifat makro dan isu-isu strategis daerah;

- Agar penyusunan target kinerja dalam KKPT (Kertas Kerja Perencanaan Tahunan) tidak hanya berdasarkan analisis kondisi saat ini, namun juga mempertimbangkan tindak lanjut dan pembelajaran dari capaian serta ketidaktercapaian target kinerja tahun sebelumnya;
- Melibatkan seluruh pegawai secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi, tidak hanya pada saat forum, tetapi juga dalam proses tindak lanjut dan penyusunan rencana aksi individu/unit; Kepala Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi unit kerja dibawahnya telah di-cascading secara tepat dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, melalui penyelarasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala;
- Agar menyajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk Nilai Evaluasi AKIP PD pada Kurja Kepala Perangkat Daerah, sehingga dapat diketahui ada tidaknya efisiensi jika dibandingkan dengan capaian kinerja;
- Mensosialisasikan kembali siklus manajemen kinerja secara menyeluruh khususnya memastikan hasil pengukuran kinerja dibahas secara terbuka dan dijadikan bahan pertimbangan dalam forum evaluasi dan perencanaan berikutnya, termasuk melibatkan pegawai dalam proses identifikasi tindak lanjut;
- Agar mengunggah LKJIP pada laman resmi kominfo.jombangkab.go.id;
- Agar melakukan perbaikan pada laporan LKJIP sesuai dengan sistematika pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- Agar melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022

dan 2023) dengan analisis mendalam sehingga diketahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya di Dokumen Laporan Kinerja;

- Agar menambahkan penjelasan atau analisa bagaimana efisiensi sumber daya mampu mendukung capaian kinerja dan dituangkan pada dokumen LKJIP;
- Perlu dilakukan penguatan peran serta pegawai dalam proses penyusunan LKJIP melalui mekanisme yang mendorong partisipasi aktif, seperti forum diskusi internal, workshop evaluasi kinerja, atau pemberian ruang umpan balik secara formal. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja kolaboratif agar seluruh pegawai merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas dokumen LKJIP;
- Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis Hasil Evaluasi ini sehingga Tindak Lanjut benar-benar mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.

Akhirnya disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jombang, 15 Januari 2026

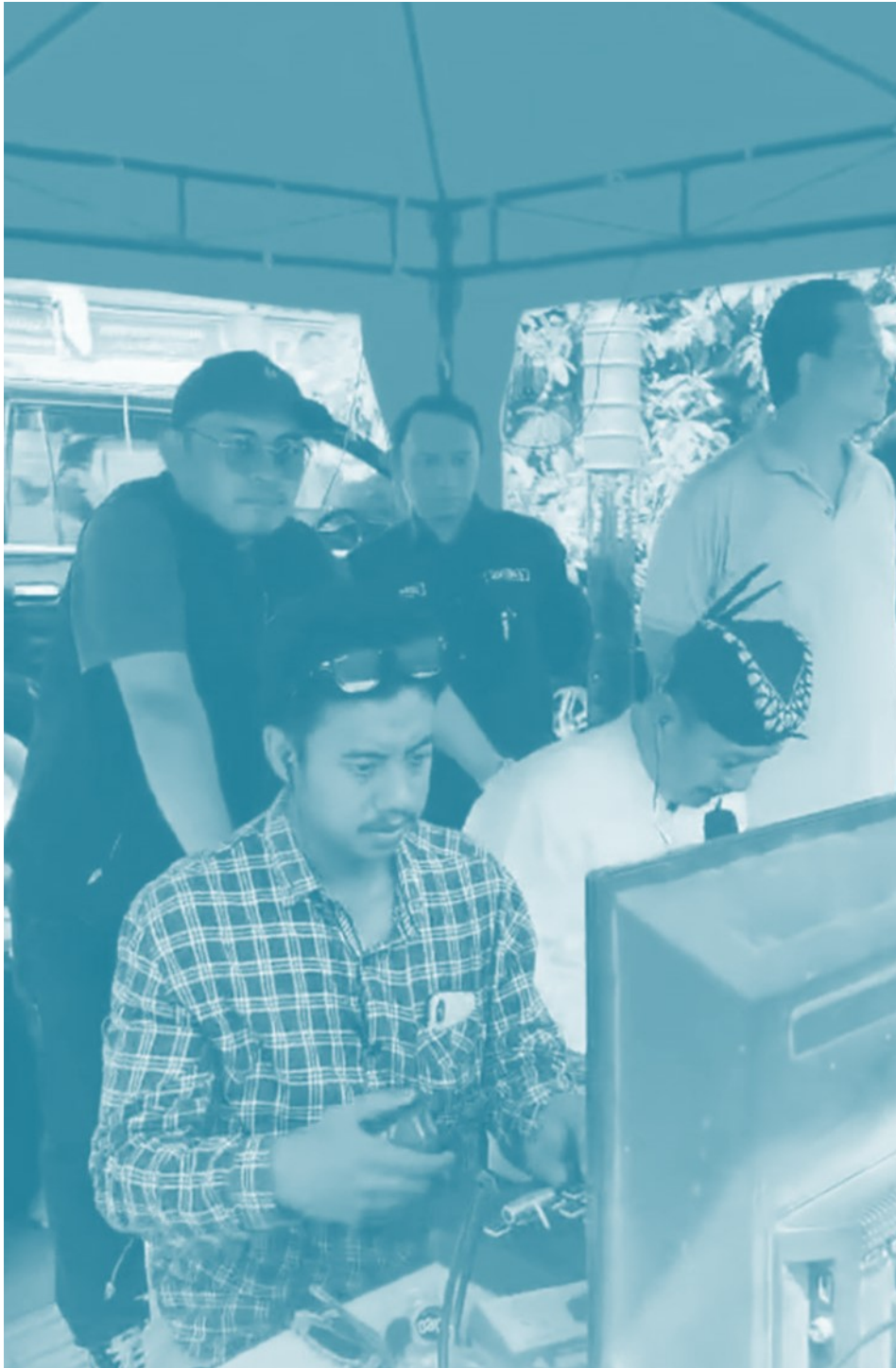
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG



ENDRO WAHYUDI, S.STP.,M.KP

Pembina Tingkat I

NIP. 19800528199912100



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Jenis Dokumen		Link Akses
Perjanjian Kinerja	Renstra 2024 - 2026	https://drive.google.com/drive/folders/10tt3CEMg0lce_Df9FbRb7f-3xqWGJJZc?usp=drive_link
	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/16DGzXWnWPyy6cXivdPIrOSdddIyaUIZi?usp=drive_link
IKU/IKI	Renstra 2024 - 2026	https://drive.google.com/drive/folders/17P8PHu5kICMOcSTCZbdSQj1BEnXSGLDc?usp=drive_link
	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/1tZRD_EhQyklck1u_Chihu5FORNNRz66Q?usp=drive_link
SKP	Renstra 2024 - 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1-yCYllr92R3LXIKi844VsjoWM33XudfO?usp=drive_link
	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/1pmFJ6NpCrQ_o7NmV_tJS1uTX8w9i1PQM?usp=drive_link

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	Renstra 2024 - 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1ncm_0oTWYTDw9jdvJgr9Asji1QK0o0vd?usp=drive_link
	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/1SWjNoBxhaqKC6d-kuk_apCEmW-fXqNNm?usp=drive_link
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/1r0prKbZsO3ndTLWsQzncvyCjBhjZEnSx?usp=drive_link
Pengukuran Kinerja	Renstra 2025 - 2029	https://drive.google.com/drive/folders/15nvsIx6F-upT0yMww_rZ5ARompV_qfyp?usp=drive_link